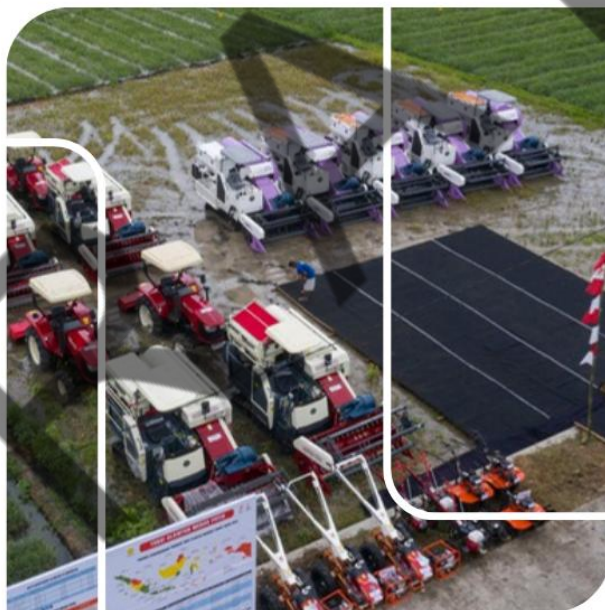




RENCANA STRATEGIS ***KEMENTERIAN PERTANIAN*** ***2025-2029***



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. <i>Kondisi Umum</i>	10
1.1.1. Indikator Makro	10
1.1.2. Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian Strategis.....	15
1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	26
1.1.4. Aspirasi Masyarakat.....	42
1.1.5. Isu Aktual.....	43
1.1.5.1. Sumber Daya Manusia Pertanian.....	43
1.1.5.2. Penerapan Teknologi.....	46
1.1.5.3. Infrastruktur Pendukung Pertanian.....	47
1.1.5.4. Sarana Produksi Pertanian.....	48
1.1.5.5. Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian....	49
1.1.5.6. Praktik Pertanian Berkelanjutan.....	50
1.2 <i>Potensi dan Permasalahan</i>	51
1.2.1. Potensi	51
1.2.2. Permasalahan	57
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN	67
KEMENTERIAN PERTANIAN	67
2.1. Visi Kementerian Pertanian.....	67
2.2. Misi Kementerian Pertanian	69
2.3. Tujuan Kementerian Pertanian	72
2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	75
2.4.1.1. Manajemen Risiko Pembangunan Pertanian.....	83
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	85
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	85

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	120
3.3. Kerangka Regulasi	134
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	137
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	141
4.1. Target Kinerja	141
4.2. Kerangka Pendanaan	142
BAB 5 PENUTUP	144

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional 2020 -2024 ---</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 1. 2 Kontribusi Tenaga Kerja Pertanian terhadap Tenaga Kerja Nasional, 2020-2024 -----</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 1. 3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024-----</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 1. 4 Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Pertanian, 2020-2024 -----</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 1. 5 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pertanian, 2020-2024 -----</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 1. 6 Perkembangan Produksi 5 (Lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024-----</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 1. 7 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura (Tanaman Semusim, 2020-2024) -----</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 1. 8 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura (Tanaman Buah, 2020-2024)-----</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 1. 9 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit 2020-2024 (juta ton)-----</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 1. 10 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2020-2024 ---</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 1. 11 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Peternakan, 2020 - 2024 -----</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 1. 12 Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton) -----</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 1. 13 Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton) -----</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 1. 14 Perkembangan Produksi Telur 2020-2024 (juta ton) -----</i>	<i>25</i>

<i>Gambar 1.15 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas-----</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 1.16 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian-----</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 1.17 Perkembangan Capaian IKSS Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian -----</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 1.18 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas-----</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 1.19 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel-----</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 1. 20 Klasifikasi petani berdasarkan kelompok umur-----</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 2. 1 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 1 -----</i>	<i>76</i>
<i>Gambar 2. 2 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2 -----</i>	<i>77</i>
<i>Gambar 2. 3 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 3 -----</i>	<i>78</i>
<i>Gambar 2. 4 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 4 -----</i>	<i>79</i>
<i>Gambar 2. 5 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 5 -----</i>	<i>80</i>
<i>Gambar 2. 6 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 6 -----</i>	<i>81</i>
<i>Gambar 3. 1 Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian.....</i>	<i>87</i>
<i>Gambar 3. 2 Program Prioritas Presiden terkait Pertanian</i>	<i>88</i>
<i>Gambar 3. 3 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan.....</i>	<i>91</i>
<i>Gambar 3. 4 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi.....</i>	<i>93</i>
<i>Gambar 3. 5 Kerangka Prioritas Nasional terkait Hilirisasi dan Industrialisasi</i>	<i>93</i>
<i>Gambar 3. 6 Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional.....</i>	<i>95</i>
<i>Gambar 3. 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian ..</i>	<i>96</i>
<i>Gambar 3. 8 Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029</i>	<i>122</i>
<i>Gambar 3. 9 Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029</i>	<i>123</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020-2024</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 2. 1 Penerjemahan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</i>	<i>82</i>
<i>Tabel 3. 1 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat.....</i>	<i>88</i>
<i>Tabel 3. 2 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas</i>	<i>89</i>
<i>Tabel 3. 3 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap PP dan KP sesuai Lampiran III RPJMN</i>	<i>103</i>
<i>Tabel 3. 4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029.....</i>	<i>139</i>
<i>Tabel 4. 1 Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029.....</i>	<i>142</i>

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029.....</i>	<i>145</i>
<i>Lampiran 2 Matrik Pendanaan APBN dan Belanja Negara Non APBN Terhadap Kegiatan Prioritas Tahun 2025 – 2029.....</i>	<i>337</i>
<i>Lampiran 3 Matrik Kerangka Regulasi.....</i>	<i>343</i>
<i>Lampiran 4 Manajemen Resiko.....</i>	<i>355</i>
<i>Lampiran 5 Pohon Kinerja.....</i>	<i>348</i>

DRAFT

BAB I

PENDAHULUAN

Situasi pangan global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dan multidimensional, di antaranya meliputi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global yang pesat, serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan perang dagang antarnegara. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, ditandai dengan penurunan produktivitas, perubahan pola tanam, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian, terbatasnya ketersediaan sumber daya air dan mengganggu rantai pasok pangan global.

Pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat mendorong lonjakan kebutuhan pangan secara global. Lonjakan tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pangan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta produk pangan yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan pendapatan terutama di negara-negara berkembang, seperti produk ternak dan minyak nabati. Permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam beberapa dekade mendatang, seiring dengan peningkatan taraf hidup dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Kondisi ini berpotensi semakin kompleks dengan adanya ketegangan geopolitik dan perang dagang yang menyebabkan guncangan signifikan terhadap rantai pasok global serta mendorong peningkatan harga berbagai komoditas pertanian. Hal ini berdampak pada menurunnya nilai dan volume perdagangan internasional, yang pada akhirnya berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Disrupsi ketersediaan pangan di pasar internasional diperkirakan akan semakin sering terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, seiring dengan peningkatan harga pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga pupuk dan BBM meningkatkan biaya usaha tani secara keseluruhan dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi, dapat menyebabkan kenaikan harga pangan sehingga mengancam ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini, sejumlah negara telah mengalami kondisi rawan pangan (*food insecurity*) bahkan krisis pangan (*food crisis*), seperti Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Ethiopia, Yaman, dan beberapa negara di kawasan Jazirah Arab yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.

Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari dampak buruk dari potensi krisis pangan global. Namun demikian, sektor pertanian nasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, penurunan produktivitas lahan, tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti gandum dan kedelai, serta rendahnya tingkat regenerasi petani.

Ketahanan pangan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan pembangunan negara. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketahanan pangan yang kokoh memperkuat posisi negara dalam

menghadapi tekanan global, menjaga kestabilan harga, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko krisis. Dalam perspektif jangka panjang, ketahanan pangan adalah elemen mendasar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.

Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat

Indonesia. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, maka capaian pembangunan pertanian yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran dan fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipatif dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Indikator Makro

Sektor pertanian merupakan tulang punggung peradaban manusia yang tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan populasi dunia tetapi juga memengaruhi ekonomi, lingkungan, dan stabilitas global. Sektor pertanian di Indonesia bahkan mampu bertahan terhadap guncangan pandemi COVID-19 yang mengganggu hampir semua sektor ekonomi. Sektor pertanian telah terbukti menjadi penyangga ekonomi dan ketahanan pangan nasional ketika pandemi tersebut melanda Indonesia dan dunia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi (*year on year*) sektor pertanian Indonesia yang secara konsisten positif selama delapan triwulan (dari triwulan I tahun 2020 hingga triwulan IV tahun 2021), sementara pada saat yang sama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) total tahun 2020 negatif. Secara spesifik, kinerja dan ketahanan relatif sektor pertanian dapat diamati pada beberapa indikator makro sektor pertanian lainnya, antara lain: Tenaga Kerja Pertanian, Nilai Tukar Petani, Neraca Perdagangan, Investasi Pertanian, dan Produksi

Komoditas Pertanian Strategis, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

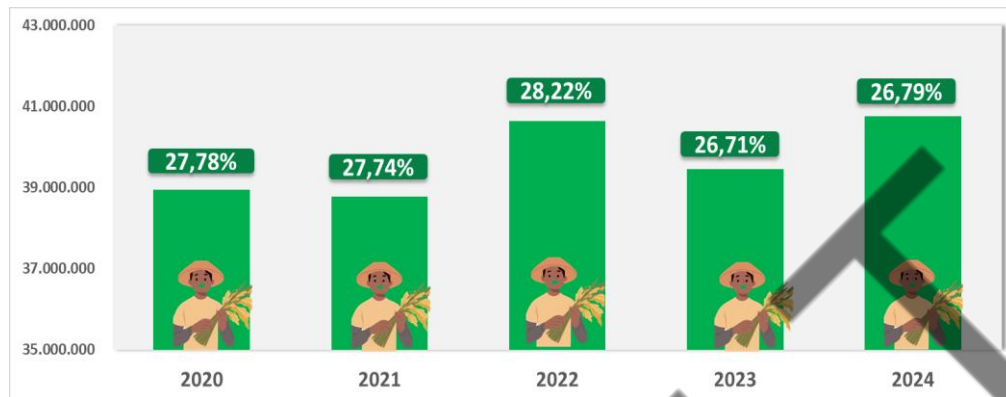
a. PDB Pertanian Indonesia 2020-2024 (*highlight 2020-2022*)



Gambar 1. 1
Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional 2020-2024

Pada tahun 2020-2024, PDB Sektor Pertanian menunjukkan tren positif. PDB pertanian arti luas berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 6,64% dan harga konstan naik 0,68%. Sedangkan pertanian arti sempit berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,05% dan harga konstan naik 0,9%. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya pada awal pandemi covid-19 tahun 2020. Pada tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif 1,77% di saat yang sama PDB nasional tumbuh negatif - 2,07%.

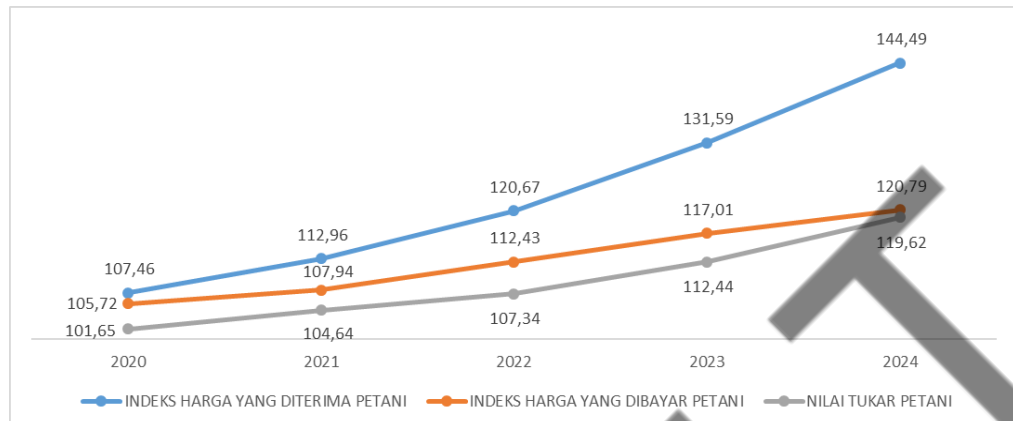
b. Tenaga Kerja Pertanian Indonesia 2020-2024



Gambar 1. 2
Kontribusi Tenaga Kerja Pertanian terhadap Tenaga Kerja Nasional, 2020-2024

Sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selama 5 tahun terakhir (2020-2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,43%. Nilai rata-rata *share* ini setara dengan 39,72 juta pekerja dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia. Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian secara signifikan terjadi pada tahun 2022, salah satunya merupakan akibat dari pemulihan pasca pandemi Covid-19. Sebagian besar tenaga kerja non-pertanian yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau belum bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya, kemudian beralih kepada sektor pertanian. Selain itu, banyaknya program pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alsintan, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian termasuk pelatihan untuk petani muda, menyebabkan banyak masyarakat tertarik untuk berusaha di sektor pertanian.

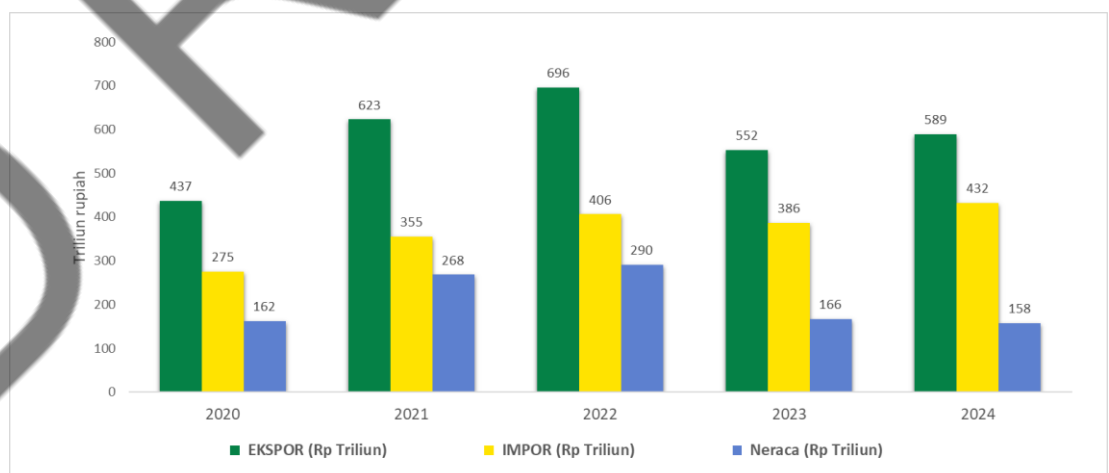
c. Nilai Tukar Petani Indonesia 2020-2024



Gambar 1. 3
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024

Selama periode 2020-2024, nilai NTP terus tumbuh mencapai 119,62 pada tahun 2024 dari angka 101,65 pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan ini merupakan kontribusi dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It), dari 107,46 pada tahun 2020 menjadi 144,49 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual komoditas oleh petani relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran modal untuk produksi pertanian.

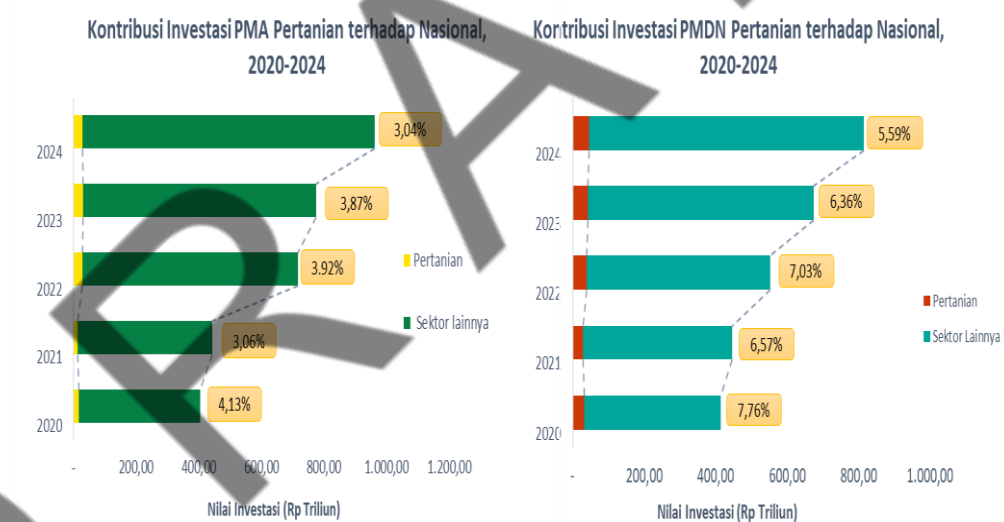
d. Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia 2020-2024



Gambar 1. 4
Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Pertanian, 2020-2024

Sejak tahun 2020-2024, secara kumulatif neraca perdagangan pertanian (segar dan olahan) menunjukkan surplus. Surplus tersebut, sebagian besar disumbang dari subsektor perkebunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 92%, khususnya komoditas kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dan kopi. Penurunan nilai ekspor pada tahun 2022-2024 terjadi karena adanya penurunan ekspor kelapa sawit, karet dan kelapa. Tekanan regulasi EUDR mengakibatkan harga global melemah, tentunya memengaruhi nilai ekspor kelapa sawit. Sementara ekspor karet yang menurun terjadi karena melemahnya industri otomotif global pasca pandemi Covid-19, yang memengaruhi penurunan nilai ekspor karet.

e. Investasi Pertanian Indonesia 2020-2024



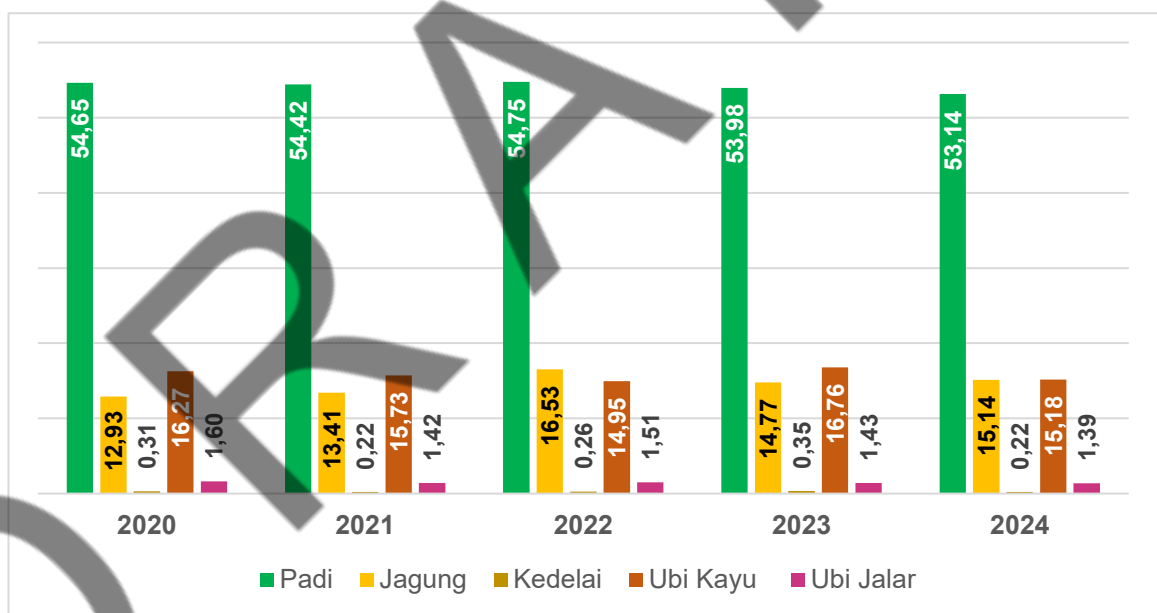
Gambar 1. 5
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pertanian, 2020-2024

Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertanian selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata kontribusi investasi PMA pertanian terhadap PMA nasional sebesar 3,61%, sementara kontribusi investasi PMDN pertanian terhadap PMDN nasional sebesar 6,66%. Adapun total investasi

pertanian (PMA+PMDN) selama 2020-2024 sebesar Rp 306,45 triliun. Kontribusi investasi terbesar pada sektor perkebunan, baik dari PMA maupun PMDN. Oleh karena itu, perlu dorongan investasi pada 3 (tiga) subsektor lainnya yaitu tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan sehingga mampu meningkatkan kinerja produksi maupun hilirisasi pada tiga subsektor tersebut.

1.1.2. Produksi Komoditas Pertanian Strategis

Subsektor Tanaman Pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 591.1 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, komoditas tanaman pangan yang ditetapkan sebagai komoditas strategis oleh Kementerian Pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.



Gambar 1. 6
Perkembangan Produksi 5 (Lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024

Produksi padi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari serangan hama dan penyakit, kondisi iklim, penurunan luas baku sawah, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi pertanian. Pada tahun 2023-2024, Indonesia menghadapi

fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim kering berkepanjangan di sejumlah daerah. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi padi di beberapa wilayah.

Luas lahan baku sawah selama periode 2020-2024 mengalami penurunan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah tercatat sebesar 7.463.948 hektar (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019), menurun sebesar 79.607 ha (1,07%) menjadi 7.384.341 hektar pada tahun 2024 (Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024). Demikian juga dengan luas panen padi kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun dengan persentase penurunan rata-rata 1,46%. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi padi periode 2020-2024.

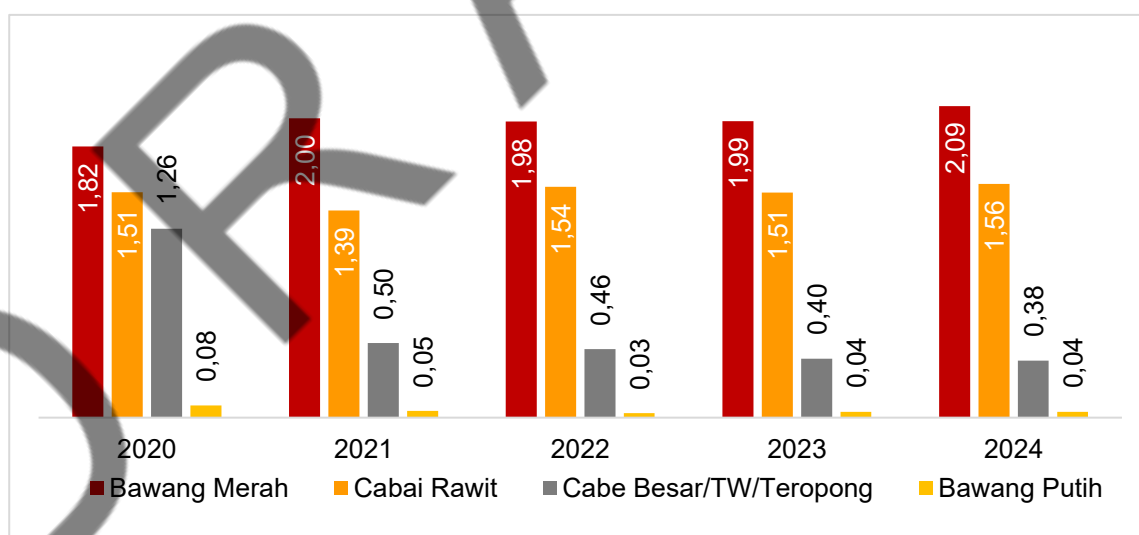
Produksi jagung di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sebagai salah satu komoditas pangan strategis, jagung memegang peran penting, khususnya sebagai bahan baku pakan ternak dan konsumsi rumah tangga di beberapa daerah. Secara rata-rata, produksi jagung selama 5 tahun terakhir berkisar di atas angka 14,5 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 4,7%. Hal ini salah satunya dipicu oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah, sehingga meningkatkan minat petani menanam jagung.

Produksi kedelai di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan nasional yang berkisar di angka 2,7 juta ton per tahun. Produksi kedelai relatif fluktuatif di kisaran 200-350 ribu ton. Adapun rata-rata produksi selama 2020-2024 berkisar pada volume produksi 270 ribu ton per tahun. Artinya produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi sebagian besar dari impor.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi ubi kayu dalam 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata di kisaran 15,78 juta ton per tahun, sementara angka kebutuhan dalam negeri rata-rata berkisar 12,5 juta ton. Artinya produksi ubi kayu dalam negeri sudah cukup memenuhi kebutuhan ubi kayu dalam negeri, bahkan cenderung surplus dan menjadi potensi ekspor. Sementara produksi ubi jalar selama 2020-2024 rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,4% per tahun, dimana pada tahun 2020 produksi ubi jalar sebesar 1,6 juta ton, menurun menjadi 1,39 juta ton pada tahun 2024.

Selain beberapa komoditas strategis subsektor tanaman pangan yang telah diuraikan di atas, Kementerian Pertanian akan mengembangkan komoditas lain seperti gandum dan sorghum sebagai bahan makanan pokok alternatif, sekaligus untuk substitusi impor.

Subsektor Hortikultura



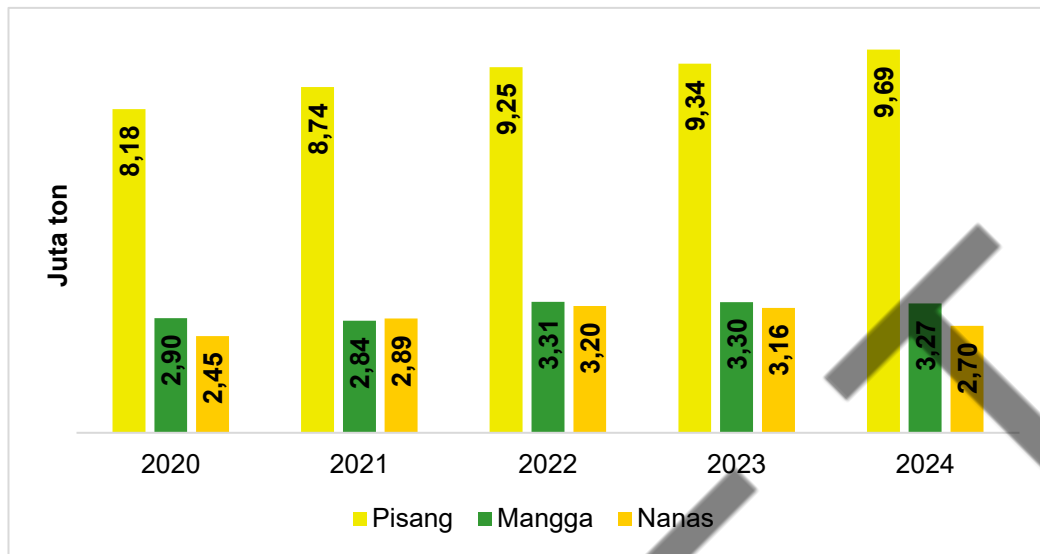
Gambar 1. 7
Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura
(Tanaman Semusim, 2020-2024)

Produksi bawang merah mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024, rata-rata peningkatan produksi sebesar 3,63% per tahun. Total produksi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar

2,09 juta ton. Indikasi kenaikan produksi dapat dilihat dari meningkatnya luas panen pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,33% per tahun.

Produksi bawang putih tahun 2020 sebesar 0,08 juta ton, yang terus menurun sampai tahun 2024 dengan produksinya 0,04 juta. Kondisi saat ini, kebutuhan bawang putih sebagian besar dipenuhi dari impor. Kendala budidaya bawang putih di dalam negeri disebabkan oleh minimnya akses petani untuk mendapatkan bibit unggul, disamping itu budidaya komoditas bawang putih dominan ditentukan oleh kondisi geografis suatu wilayah, sehingga tidak mudah dikembangkan secara meluas di wilayah Indonesia. Ke depan, dalam mengurangi impor komoditas bawang putih, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi komoditas ini.

Produksi cabai rawit dan cabai besar. Produksi cabai rawit sepanjang 2020-2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan cenderung positif sebesar 1,18%. Produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 1,26 juta ton, sedangkan tahun 2024 produksinya turun sebesar 0,38 juta ton, dengan rata-rata penurunan produksi sepanjang 2020-2024 sebesar 21,48%. Produksi cabai dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, lahan, air, bibit, pupuk, dan pestisida. Fluktuasi harga komoditas cabai yang sangat dinamis dan tingkat produktivitas yang tidak stabil secara langsung berkontribusi pada inflasi. Adapun pasar ekspor yang potensial untuk florikultura di antaranya Jepang (penggemar anggrek, bonsai dan bunga potong), Belanda (sebagai hub florikultura dunia, sehingga terbuka untuk bunga tropis), Amerika Serikat sebagai pasar besar untuk anggrek dan tanaman daun serta Singapura yang merupakan pasar regional yang dekat dan mudah dijangkau.

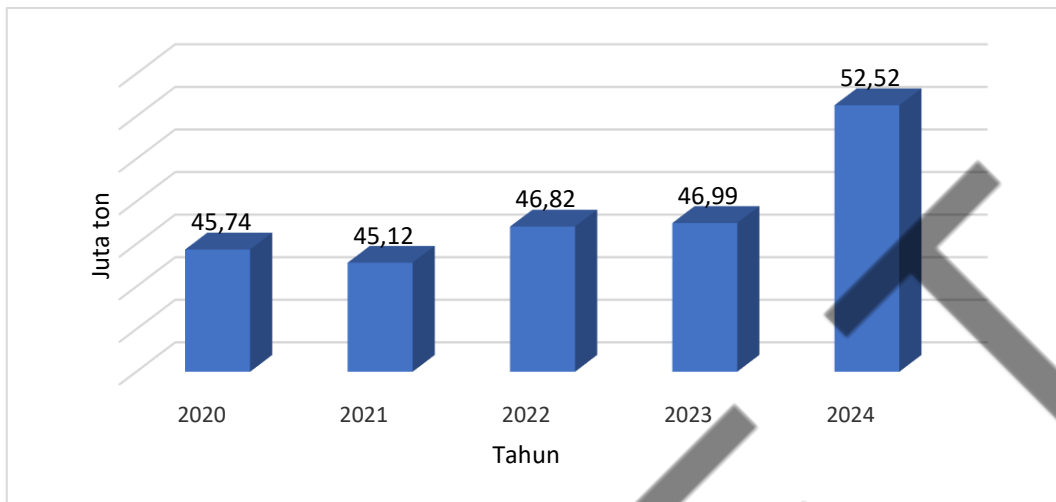


Gambar 1. 8

**Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura
(Tanaman Buah, 2020-2024)**

Produksi tanaman buah. Pisang, mangga dan nanas merupakan 3 (tiga) komoditas hortikultura dalam kelompok tanaman buah yang mempunyai capaian produksi tertinggi. Produksi pisang mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 sebesar 18,38% atau setara dengan peningkatan 1,50 juta ton. Untuk komoditas mangga dan nanas, perkembangan produksinya relatif fluktuatif, namun jika dilihat secara rata-rata perkembangannya tumbuh positif. Rata-rata peningkatan produksi mangga sebesar 3,31% dan nanas sebesar 3,28%. Kedua komoditas ini mengalami produksi tertinggi pada tahun 2022 masing-masing sebesar 3,31 juta ton dan 3,20 juta ton. Ketiga komoditas di atas merupakan komoditas ekspor. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lebih dari 100% untuk ekspor mangga, sementara untuk manggis meningkat 42% dari tahun 2022. Selain itu, komoditas buah yang memiliki potensi besar adalah durian, seperti terlihat dari data produksi tahun 2023 mengalami peningkatan sampai 152%. Komoditas hortikultura potensi ekspor selanjutnya adalah florikultura terutama krisan, mawar dan anggrek.

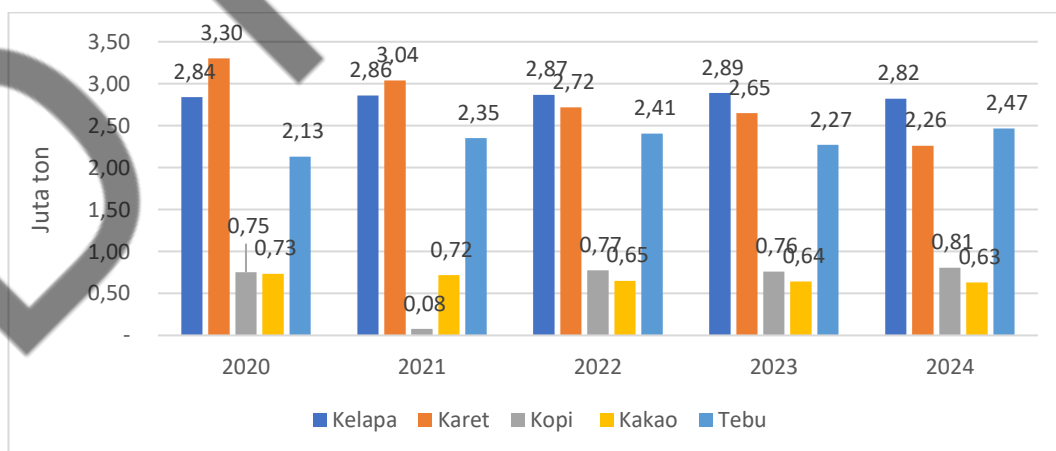
Subsektor Perkebunan



Gambar 1. 9

Perkembangan Produksi Kelapa Sawit 2020-2024 (juta ton)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan. Produksi kelapa sawit cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2024. Rata-rata peningkatan produksi sebesar 14,81%, dengan luas areal saat ini sekitar 16,8 juta ha. Upaya peremajaan kelapa sawit terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan ekspor dan juga pengembangan produk turunan dalam bentuk biodiesel atau industri hilir mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada energi.



Gambar 1. 10

Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2020-2024

Produksi kelapa cenderung stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan bibit kelapa dalam skala besar untuk dikembangkan di areal lahan sub optimal dalam rangka menjaga stabilitas produksi. Sebaran produksi kelapa berdasarkan pulau untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut: Sumatera (4.723.232 ton), Jawa (2.893.738 ton), Sulawesi (3.445.0554 ton), Kalimantan (641.260 ton), Bali dan Nusa (908.104 ton), Maluku (1.547.611 ton) serta Papua (156.615 ton).

Produksi Karet tiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan puncaknya pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan anjloknya harga karet dunia yang mengakibatkan turunnya minat petani untuk menanam karet. Upaya pemerintah dalam mengatasi turunnya harga tersebut yaitu melakukan intervensi dalam bentuk menyerap hasil panen karet mentah dari petani dengan harga normal.

Produksi Kopi tiap tahun berfluktuasi dari tahun 2020-2024, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman serta rendahnya peremajaan tanaman kopi yang sudah tua. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kopi, peremajaan, ekstensifikasi dan intensifikasi.

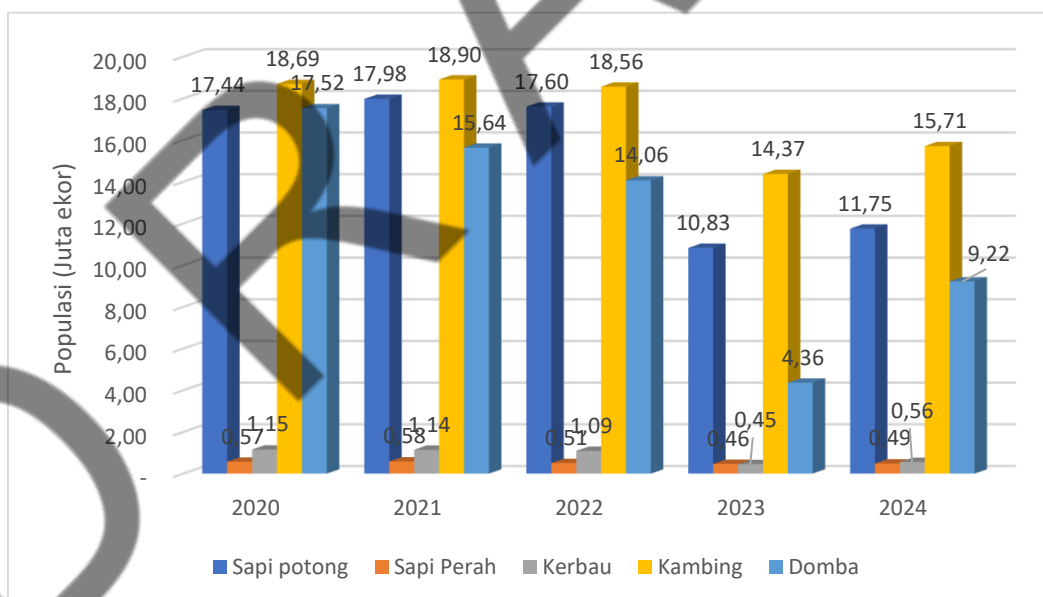
Produksi Kakao. Berdasarkan data *International Cocoa Organization* pada tahun 2022/2023, Indonesia merupakan produsen kakao peringkat ke tujuh dunia. Pada tahun 2022-2024, produksi kakao Indonesia terus mengalami penurunan karena menurunnya luas areal tanaman menghasilkan, menurunnya produktivitas kakao karena kurangnya pemeliharaan tanaman dan serangan hama dan penyakit, serta terjadinya konversi perkebunan kakao menjadi usaha pertanian lain dan non pertanian. Untuk

mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kakao, peremajaan, dan rehabilitasi lahan.

Produksi Tebu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, terutama sebagai bahan utama pembuatan gula. Peningkatan produksi terjadi dari tahun 2020-2022 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2023. Program bongkar ratoon untuk tebu merupakan salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Disamping itu, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian BUMN dan swasta melakukan revitalisasi pabrik gula di beberapa lokasi sentra produksi tebu.

Komoditas perkebunan yang diarahkan untuk mencukupi kebutuhan ekspor diantaranya adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa dalam dan karet.

Sub Sektor Peternakan



Gambar 1. 11

Perkembangan Populasi Komoditas Strategis Peternakan, 2020 - 2024

Populasi sapi potong tertinggi selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,98 juta ekor. Pada tahun 2023, terjadi penurunan populasi sapi potong yang disebabkan oleh

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah melakukan upaya pengendalian penyebaran PMK dengan melakukan vaksinasi secara masif seluruh ternak yang tersebar di wilayah Indonesia.

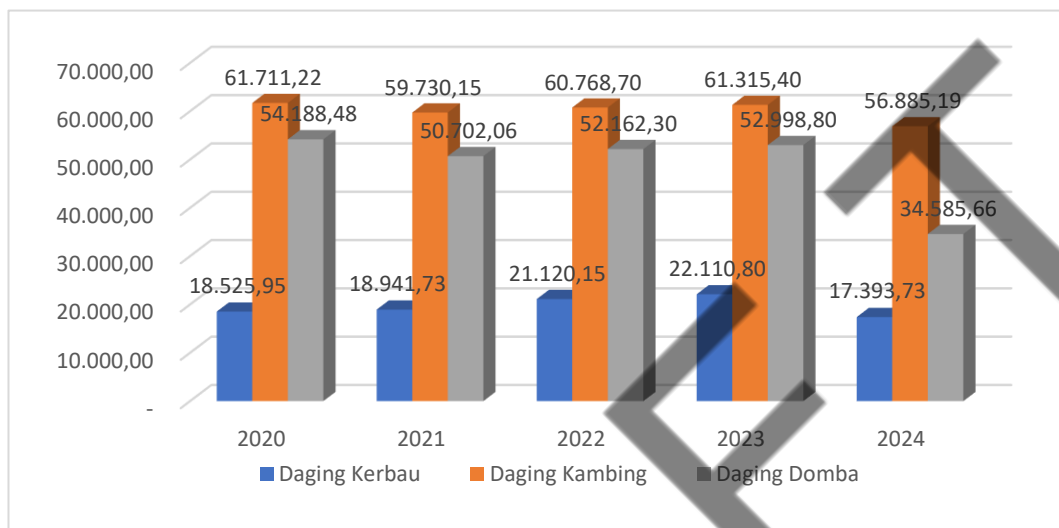
Populasi sapi perah yang paling populer di Indonesia adalah sapi *Frisien Holstein* (FH) yang dikenal memiliki produksi susu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Tahun 2021 menjadi puncak populasi sapi perah sekitar 582.169 ekor, kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan populasi yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya wabah PMK.

Kerbau di Indonesia adalah ternak yang banyak dimanfaatkan, terutama di daerah pedesaan. Populasi kerbau pada tahun 2020-2021 berada di atas 1,1 juta ekor, kemudian menurun pada tahun 2023. Komoditas kerbau di Indonesia sebagian besar berasal dari peternakan rakyat. Kementerian Pertanian mendorong peternak melalui bantuan pakan dan dukungan insentif berupa premi asuransi ternak.

Kambing merupakan ternak yang umum diusahakan di Indonesia, terutama wilayah Pulau Jawa. Populasi kambing pada tahun 2021 sekitar 19 juta ekor. Sesudah itu, hampir tiap tahunnya 2022-2023 terus mengalami penurunan populasi. Pada tahun 2024, populasi kambing kembali meningkat karena dukungan program pemberdayaan peternak, bantuan bibit kambing.

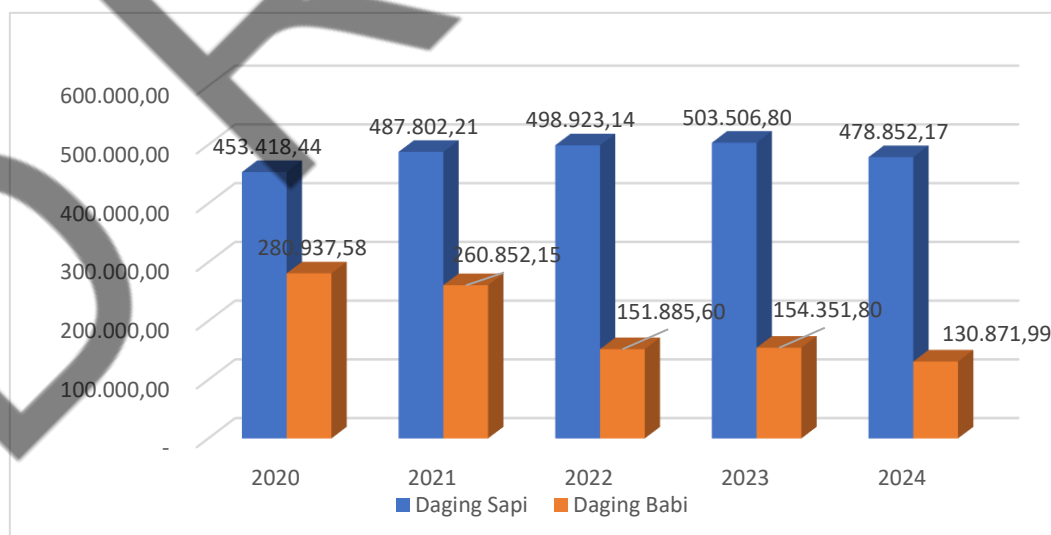
Secara umum, pada tahun 2023, populasi beberapa komoditas peternakan mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selain disebabkan oleh adanya penyakit PMK, penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan metode pengumpulan data, dimana data tahun 2023 pengambilan data menggunakan metode sensus sedangkan data tahun sebelumnya merupakan hasil proyeksi dari hasil sensus pertanian 2013.

Produksi daging kerbau, kambing, dan domba selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stabil dan tidak mengalami dinamika yang terlalu signifikan



Gambar 1. 12
Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton)

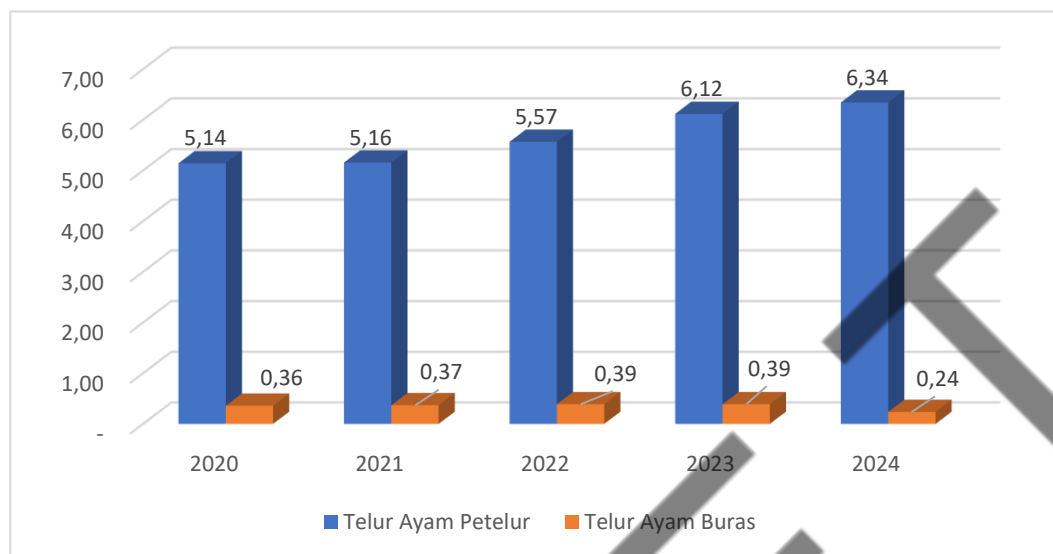
Total produksi daging kerbau, kambing, dan domba tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan total produksi terendah terjadi pada tahun 2024. Penurunan produksi daging kerbau, kambing, dan domba tersebut umumnya disebabkan turunnya populasi ternak akibat dari penyakit PMK.



Gambar 1. 13
Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton)

Produksi daging sapi dan babi berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi daging sapi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020. Meningkatnya produksi sapi tersebut antara lain melalui optimasi pemberian pakan (termasuk kombinasi hijauan dan konsentrat) serta pengendalian penyakit. Sedangkan produksi babi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2024. Penurunan daging babi disebabkan merebaknya wabah *african swine fever* (ASF) di sentra produksi daging babi, yaitu Bali dan Sumatera Utara.

Produksi Susu. Selain ternak ruminansia yang menghasilkan produksi daging untuk memenuhi kebutuhan protein asal ternak, sebagai bahan makanan penambahan nutrisi lainnya yaitu susu. Produksi susu di Indonesia saat ini masih mengandalkan impor yang didominasi oleh produksi susu asal Selandia baru (49,30%). Produksi susu pada kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan dan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 122.114,97 ton atau 12,9% dari produksi susu segar tahun 2021 dan masih berlanjut pada tahun 2023 yang mengalami penurunan 4,48% dibandingkan dengan produksi susu tahun 2022. Produksi susu meningkat kembali pada tahun 2024 yang mencapai angka 808.352,84 ton atau meningkat 2,66% dibandingkan produksi susu tahun 2023. Fluktuasi produksi susu disebabkan oleh penurunan populasi sapi perah, penurunan populasi sapi betina produktif, pakan berkualitas rendah, wabah PMK, cuaca ekstrem serta rendahnya harga jual susu di tingkat peternak.



Gambar 1. 12

Perkembangan Produksi Telur 2020-2024 (juta ton)

Produksi telur ayam petelur selama tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dengan produksi tertinggi pada tahun 2024, sementara produksi telur ayam buras selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi di mana produksi tertinggi pada tahun 2022 dan 2023.

Produk peternakan lainnya adalah susu, namun produksi susu Indonesia tahun 2020-2024 masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Produksi susu pada kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan dan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 122.114,97 ton atau 12,9% dari produksi susu segar tahun 2021 dan masih berlanjut pada tahun 2023 yang mengalami penurunan 4,48% dibandingkan dengan produksi susu tahun 2022. Produksi susu meningkat kembali pada tahun 2024 yang mencapai angka 808.352,84 ton atau meningkat 2,66% dibandingkan produksi susu tahun 2023. Fluktuasi produksi susu disebabkan oleh penurunan populasi sapi perah, penurunan populasi sapi betina produktif, pakan berkualitas rendah, wabah PMK, cuaca ekstrem serta rendahnya harga jual susu di tingkat peternak.

1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Keberhasilan pencapaian sasaran dievaluasi dengan membandingkan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan, kendala maupun permasalahan dalam mencapai target kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi berikutnya.

Hasil evaluasi kinerja sasaran strategis periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa secara umum target indikator kinerja dapat dicapai dengan baik (capaian di atas 80%). Keberhasilan pencapaian tersebut didorong oleh berbagai faktor penentu baik yang berasal dari lingkungan internal, diantaranya peningkatan kualitas SDM aparatur, efektivitas pelaksanaan anggaran, perbaikan regulasi, ketepatan sasaran program, maupun yang berasal dari lingkungan eksternal seperti keberpihakan kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian, dukungan lintas sektor maupun penguatan kerjasama dalam dan luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat berbagai sasaran strategis yang belum dapat dicapai secara optimal karena adanya berbagai dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi kinerja Kementerian Pertanian 2020 – 2024. Beberapa dinamika lingkungan strategis tersebut diantaranya dinamika pada lingkungan internal seperti kebijakan *automatic adjustment* yang diterapkan pada pertengahan periode, perubahan struktur organisasi yang mengurangi cakupan tugas, fungsi dan

kewenangan Kementerian Pertanian, serta dinamika lingkungan eksternal seperti dampak perubahan iklim ekstrem kekeringan (El Niño) dan ekstrem basah (La Niña), serangan hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, pandemi Covid, serta disrupsi terhadap distribusi komoditas pangan strategis akibat ketegangan geopolitik global.

Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana strategis pada tahun 2020 dan 2021, yang berdampak pada perubahan sebagian indikator kinerja. Penjelasan terhadap urgensi penyesuaian tersebut sebagai berikut:

- a. Penyesuaian pada Renstra tahun 2020 karena terjadinya pandemi covid yang melanda dunia menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran, dan kebijakan penting lainnya.
- b. Penyesuaian pada Renstra tahun 2021 akibat adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan direktif Presiden, menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target.

Penyesuaian tersebut menyebabkan adanya penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang secara rinci tahun penggunaan indikator kinerja pada sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERIODE
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri	2020 – 2024
		2	Peningkatan akses pangan	2021
		3	Peningkatan konsumsi pangan berkualitas	2021 – 2022
		4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERIODE
		5	Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani	2020 - 2024
		6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	2020 - 2024
		7	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan	2021 - 2023
		8	Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan	2021 - 2023
		9	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian	2021 - 2024
		10	Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian	2021 - 2024
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian	2020 - 2024
		12	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional	2021 - 2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	2021 - 2022
		14	Persentase petani yang menerapkan teknologi	2020 - 2024
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	2020 - 2024
		16	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	2021 - 2024
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2020 - 2024
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	2020 - 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERIODE
	dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel			

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II, diolah

Analisis ketercapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian periode 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

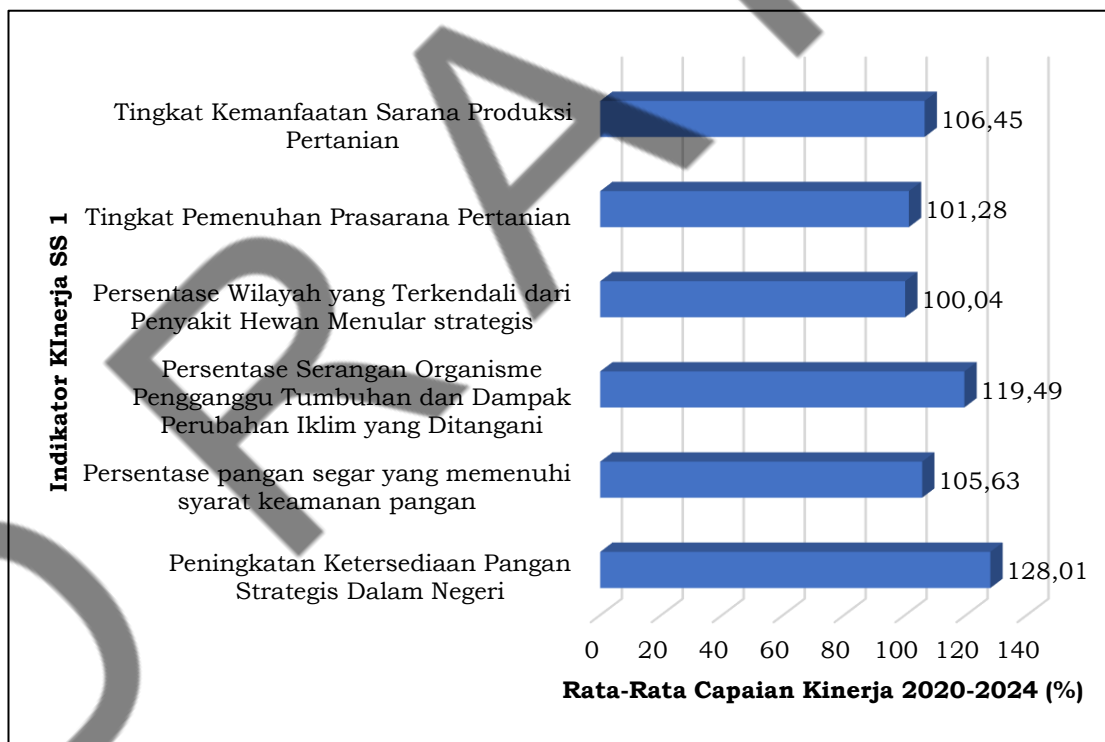
Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas” bertujuan untuk menjamin penyediaan pangan baik jumlah dan mutu, didukung dengan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum target sasaran ini rata-rata dapat dicapai melalui pencapaian target produksi komoditas pangan strategis, penyediaan pangan segar yang memenuhi keamanan pangan, penanganan serangan OPT dan DPI, pengendalian wilayah dari penyakit hewan menular strategis, serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

Sasaran strategis ini diukur melalui 10 IKSS, namun, terdapat 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu IKSS2 “Peningkatan akses pangan,” dan IKSS3 “Peningkatan konsumsi pangan berkualitas” yang tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 serta 2 (dua) indikator terkait perkarantinaaan yaitu IKSS 7 “Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan” dan IKSS 8 “Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan” yang tidak diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2024 karena

adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian, sehingga dalam analisis capaian tidak menyertakan analisis keempat indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 6 (enam) IKSS sebagai berikut.



Gambar 1. 13
Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Berdasarkan data di atas, sebagian besar rata-rata capaian indikator kinerja periode 2020-2024 berada di atas 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Secara rata-rata, pada periode 2020-2024 capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah “Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri” yang mencapai 128,01%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh peningkatan produksi komoditas pangan strategis meliputi peningkatan komoditas tanaman pangan terutama jagung, peningkatan komoditas hortikultura terutama bawang merah dan peningkatan sebagian besar komoditas peternakan (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam, dan telur). Peningkatan produksi ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya penyediaan benih dan bibit unggul, penerapan budidaya yang baik, upaya antisipasi perubahan iklim dan pengendalian serangan OPT serta penyakit tanaman dan hewan.

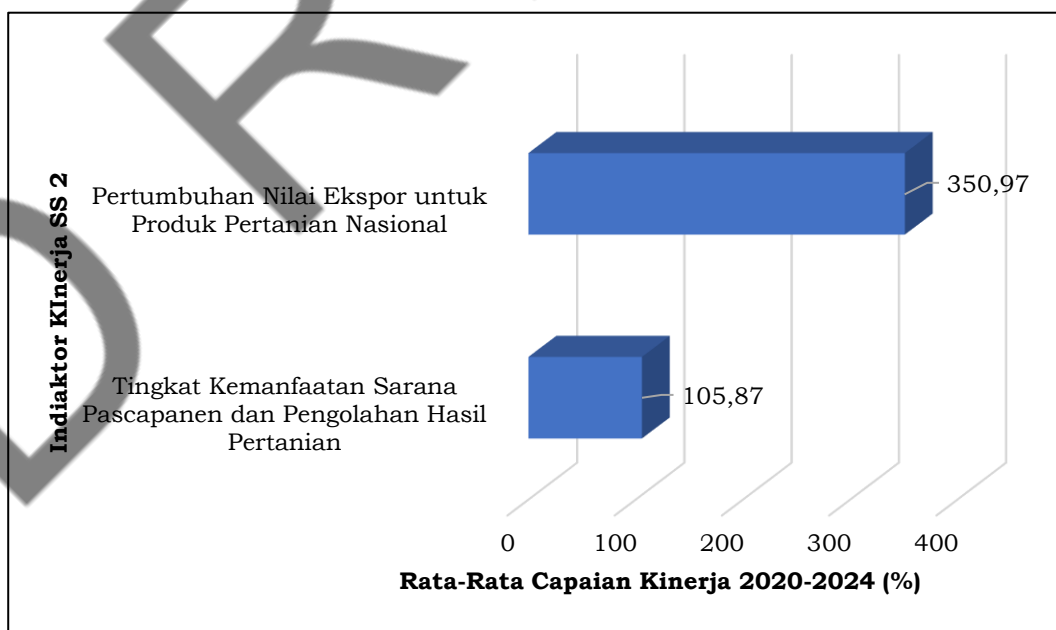
Capaian kinerja IKSS yang terendah adalah “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Namun demikian, capaian indikator ini sebesar 100,04% yang berarti mampu mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengancam dan menghambat pencapaian target, yaitu masih terdapat wilayah kabupaten/kota yang belum dapat dikendalikan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Persentase wilayah yang masih rendah pengendaliannya terutama untuk Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) yang mewabah sejak tahun 2022, *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Septicaemia epizootica* dan rabies. Untuk itu, masih diperlukan strategi dan upaya yang lebih baik guna memperluas wilayah yang dapat dikategorikan terkendali untuk penyakit-penyakit tersebut.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian” bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dengan mendorong penanganan pascapanen yang baik serta pengolahan dan pemasaran hasil komoditas pertanian. Penanganan pascapanen yang baik dapat mengurangi kehilangan hasil, sedangkan pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dalam dan luar negeri. Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan serta perluasan jaringan pemasaran dapat mendukung keberhasilan sasaran ini.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS 11 “Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian” dan IKSS 12 yaitu “Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional”. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 14
Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, kedua IKSS pada sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian” mencapai di atas 100%. Hal ini berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS tertinggi adalah pada indikator kinerja “Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional” dengan rata-rata capaian 350,97%.

Komoditas pertanian yang mengalami peningkatan nilai ekspor cukup signifikan adalah komoditas ubi kayu, kacang hijau, jahe, jamur, durian, bawang merah, cengkeh dan sagu. Selain itu komoditas lain yang cukup konsisten mengalami peningkatan ekspor adalah mangga, nanas, manggis, krisan, bawang merah, cabai, lada, kopi, kakao, nilam, hasil ternak, dan produk hewan non pangan.

Capaian indikator kinerja “Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian” juga menunjukkan pencapaian rata-rata di atas 100% dengan rata-rata capaian 105,87% yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah termanfaatkannya sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang diberikan pemerintah kepada petani. Sarana tersebut digunakan petani untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi komoditas pertaniannya.

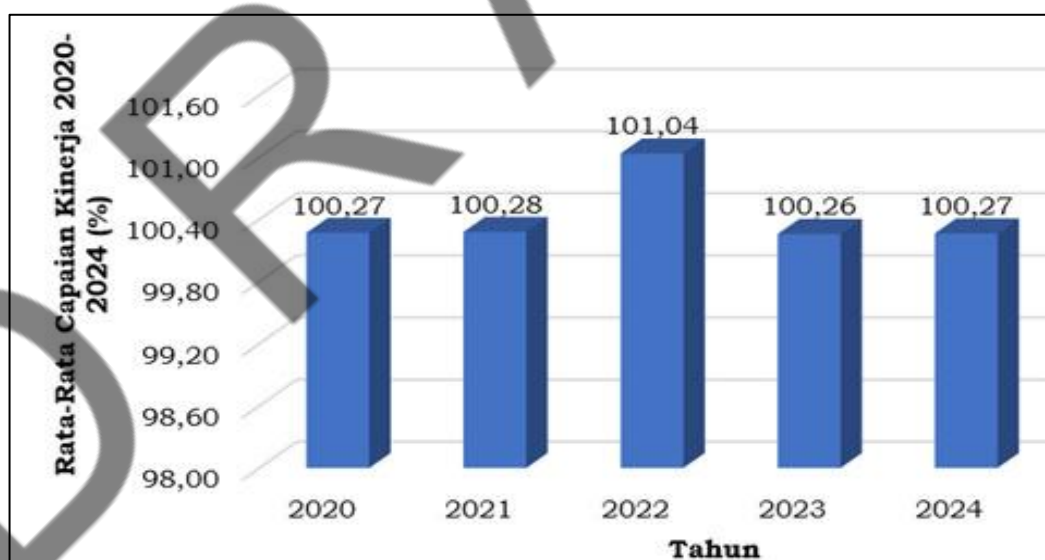
Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian” ditujukan untuk memastikan bahwa petani mampu mengakses, memahami, dan mengimplementasikan

teknologi pertanian yang telah dihasilkan dalam kegiatan usahatani mereka. Pemanfaatan inovasi teknologi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh petani di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk menjembatani hasil-hasil riset dan inovasi pertanian dengan kebutuhan serta kapasitas petani, sehingga teknologi yang tersedia dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani.

Sasaran strategis ini memiliki 2 IKSS yaitu IKSS 13 “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan” dan IKSS 14 “Persentase petani yang menerapkan teknologi”. IKSS 13 tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 karena adanya kebijakan sentralisasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan oleh institusi lain. Pembahasan capaian ini hanya menganalisis IKSS14. Hasil analisis terhadap indikator tersebut pada periode 2020-2024 sebagaimana uraian berikut.



Gambar 1. 15
Perkembangan Capaian IKSS Persentase Petani
yang Menerapkan Teknologi pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, capaian IKSS Persentase petani yang menerapkan teknologi periode 2020-2024 selalu mencapai lebih

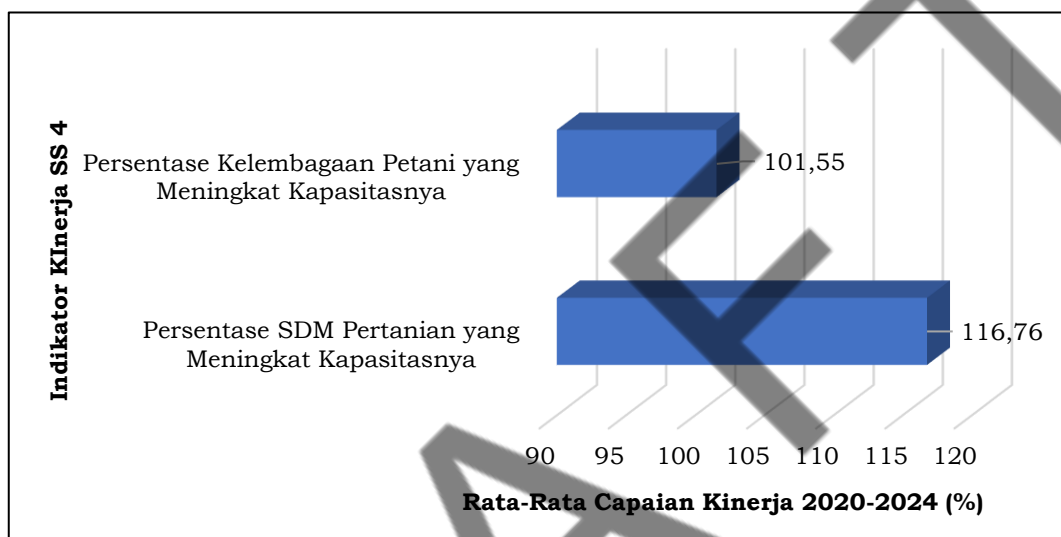
dari 100% dengan rata-rata capaian sepanjang 2020-2024 sebesar 100,42%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan indikator ditandai dengan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadi peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusahatani. Peningkatan kapasitas petani ini didukung melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan penyuluhan pertanian yang meliputi penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pengelolaan OPT, mekanisasi pertanian, pengelolaan panen dan pasca panen serta kegiatan Sekolah Lapang (SL) pertanian organik.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional” bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, sekaligus mendorong perbaikan mutu kelembagaan pertanian. Salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, adalah penyediaan SDM pertanian yang kompeten, mengingat sektor ini kini harus bersaing dengan berbagai industri lain dalam penggunaan tenaga kerja, lahan dan faktor produksi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian yang semakin kompleks. Di sisi lain, kelembagaan petani juga memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang paling mendasar. Penguatan kelembagaan petani perlu terus didorong agar institusi tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam mengakses faktor-faktor produksi serta berbagai sumber daya pendukung usahatani lainnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS15 “Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dan IKSS16 “Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya”. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis ini dilakukan terhadap kedua IKSS tersebut sebagai berikut.



Gambar 1. 16
Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada gambar di atas, rata-rata capaian indikator kinerja kedua IKSS pada periode 2020-2024 adalah lebih dari 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah pada indikator kinerja “Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” yang mencapai rata-rata 116,76%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui masifnya kegiatan pelatihan petani, penentuan metode dan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan petani, peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan widyaiswara, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pelatihan, dan metode pelatihan yang melibatkan interaksi aktif peserta pelatihan.

Di sisi lain, indikator “Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya” secara rata-rata capaian kinerjanya pada periode 2020-2024 sebesar 101,55% atau melebihi target yang ditetapkan. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

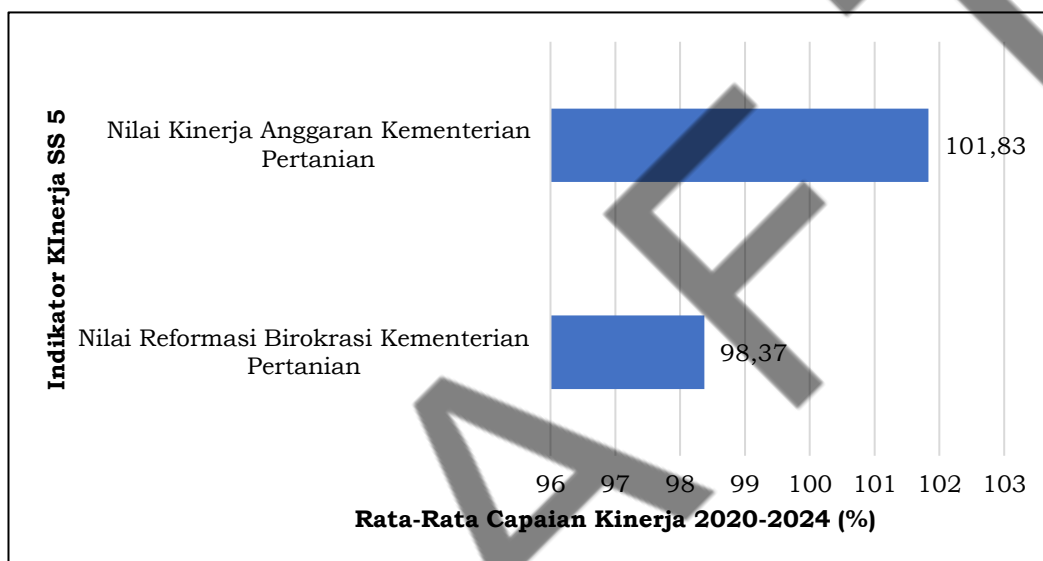
Sasaran Strategis 5:

Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

Sasaran strategis “Terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel” bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif serta birokrasi yang profesional dan transparan. Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, reformasi ini terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, penataan anggaran juga harus dilakukan dengan akuntabel, yang berarti pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dengan baik.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS17 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” dan IKSS18 “Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian”. Kedua indikator ini

selama periode 2020-2024 mengalami dinamika yang cukup mendasar, yaitu: 1) perubahan metode perhitungan nilai reformasi birokrasi sejak tahun 2023; dan 2) indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan kategori pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2024 indikator ini diganti menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) IKSS sebagai berikut.



Gambar 1. 17

Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

Rata-rata capaian IKSS “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel” pada periode 2020-2024 sebesar 100,01% atau sangat berhasil. Namun demikian capaian ini lebih didominasi oleh capaian IKSS “Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian” yang rata-rata capaiannya sebesar 101,83%, sedangkan rata-rata capaian Nilai RB sebesar 98,37%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja NKA Kementerian Pertanian didukung oleh berbagai upaya strategis meliputi pencapaian sasaran strategis, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan, melakukan reviu DIPA untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker/K/L, konsolidasi dan koordinasi internal Kementan dan eksternal (Bappenas dan Kementerian Keuangan), percepatan pencairan anggaran, melakukan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun, optimalisasi belanja kontraktual dengan menyusun RUP di awal tahun dan memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa ditangani dan didaftarkan paling lambat pertengahan semester, serta penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai dan pengelolaan UP dan TUP.

Di sisi lain, Nilai RB Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya indikator yang nilai rata-rata kinerjanya tidak mencapai 100% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah karena adanya perubahan metode perhitungan Nilai Reformasi Birokrasi. Perubahan metode ini berdampak cukup signifikan karena semula menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), kemudian berubah menggunakan hasil perhitungan indikator pada dimensi RB General dan RB Tematik. Hal ini dilakukan karena RB harus dapat mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi berdampak.

Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	%	116,74	133,70	175,82	110	103,76	128,01
		2	Peningkatan Akses Pangan	%	-	18,84	n/a*)	-	-	-
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	-	240,97	231,28	-	-	-
		4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	106,88	106,30	107,05	107,28	100,64	105,63
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	120,78	126,23	120,01	127,80	102,61	119,49
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis	%	100,25	100,30	99,42	100,09	100,15	100,04
		7	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang ditetapkan	%	-	100,00	100,00	100,00	-	-
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	%	146,34	133,93	232,56	227,27	-	-
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	106,29	99,16	102,06	100,82	98,05	101,28
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	109,58	106,25	108,38	105,85	102,18	106,45
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	-	107,69	107,70	106,03	102,06	105,87
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	281,71	165,76	74,92	996,00	236,45	350,97
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	117,03	165,16	162,03	-	-	-
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	100,27	100,28	101,04	100,26	100,27	100,42
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	150,64	106,56	113,60	104,68	108,33	116,76
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	-	104,37	101,25	100,29	100,27	101,55
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	99,30	98,18	97,47	96,87	100,05	98,37
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	101,76	102,36	103,34	101,68	100,01	101,83

1.1.4. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra K/L tahun 2025-2029. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Aspirasi Masyarakat, dapat diperoleh melalui:

- Media Cetak
- Media Elektronik
- Forum konsultasi publik; dan/atau
- Metode penjangkauan aspirasi lainnya yang akuntabel

Beberapa aspirasi masyarakat yang didapat dari berbagai media terkait pembangunan pertanian adalah:

1. Harga dan ketersediaan input sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) yang lebih terjangkau

Petani berharap agar harga input sarana produksi dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau. Harga input sarana produksi yang tinggi dapat menjadi beban bagi petani dan mempengaruhi biaya produksi mereka.

Selain harga yang terjangkau, petani juga mengharapkan ketersediaan input sarana produksi yang lebih terjamin, sehingga pasokan dapat mencukupi kebutuhan petani dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat menghambat aktivitas pertanian.

2. Kepastian kepemilikan lahan pertanian

Para petani sangat membutuhkan kepastian hukum terkait lahan pertanian yang mereka garap. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan mendorong investasi jangka panjang dalam sektor pertanian.

3. Penguatan kelembagaan petani

Penguatan kelembagaan petani seperti Poktan/Gapoktan dan KEP diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dan akses ke pasar.

4. Jaminan akses pasar dan stabilitas harga komoditas pertanian

Akses pasar yang adil dan inklusi adalah fondasi vital bagi kesejahteraan petani dalam ekonomi pertanian. Stabilitas harga komoditas pertanian memberikan dampak pada peningkatan animo petani untuk berusaha tani. Kedua hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Adopsi teknologi pertanian modern

Adopsi teknologi adalah proses dimana petani atau pelaku usaha pertanian mengadopsi dan menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pertanian mereka. Adopsi teknologi dapat berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian.

6. Kemudahan akses petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah

Petani menginginkan kemudahan dalam mendapatkan akses bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana untuk peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.

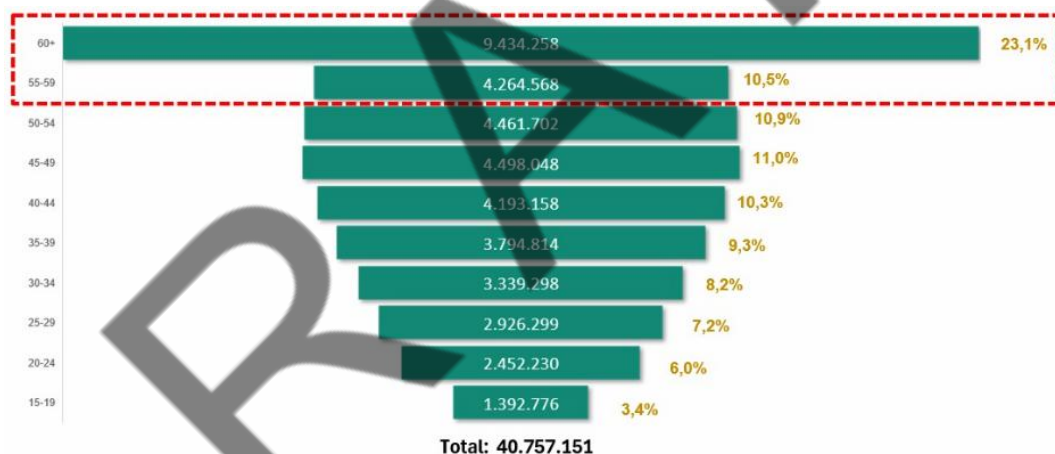
1.1.5. Isu Aktual

1.1.5.1. Sumber Daya Manusia Pertanian

Pembangunan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperkuat kapasitas SDM pertanian sebagai tulang punggung transformasi sektor pertanian Indonesia. Petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian harus dibekali dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap inovatif agar mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan ketahanan pangan. Pengembangan SDM menjadi kunci dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Sampai saat ini sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Pada tahun 2024, sektor pertanian luas menyerap tenaga kerja sebanyak 40,76 juta orang atau 28 persen dari total orang yang bekerja. Dari yang bekerja pada sektor pertanian tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tenaga kerja di sektor pertanian menyerupai pola piramida terbalik, dimana kelompok umur tua semakin besar, dan kelompok umur muda relatif sedikit.



Gambar 1. 18

Klasifikasi petani berdasarkan kelompok umur

Sumber: BPS, 2024, diolah

Terdapatnya perubahan struktural demografi ketenagakerjaan pada sektor pertanian mengarah pada fenomena *Aging farmer*. *Aging farmer* didefinisikan sebagai penuaan petani, dimana tenaga kerja sektor pertanian di dominasi oleh masyarakat berusia 40-60 tahun (UGM, 2022). *Aging farmer* sebenarnya tidak akan menjadi urgensi yang serius ketika peningkatan usia petani juga diiringi dengan

peningkatan jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Sayangnya, fenomena peningkatan *aging farmer* dan regenerasi petani berbanding terbalik. Situasi ini akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja petani, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi pertanian. Oleh karena itu, tantangan yang sesungguhnya dibalik *aging farmer* adalah tingkat regenerasi petani yang masih rendah.

Salah satu fokus utama pengembangan SDM pertanian adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kementerian Pertanian akan memperluas akses pelatihan teknis bagi petani dan generasi muda, termasuk penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), smart farming, dan pengelolaan agribisnis. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi akan diperkuat untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, tercipta tenaga kerja pertanian yang terampil, adaptif, dan siap bersaing di era digital.

Selain aspek teknis, penguatan kapasitas SDM juga mencakup pembangunan mental kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Program pendampingan dan inkubasi bisnis akan digalakkan untuk mendorong terciptanya usaha pertanian yang bernilai tambah tinggi. Petani tidak hanya diposisikan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pengusaha yang mampu mengelola rantai pasok, pemasaran, dan inovasi produk. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem penyuluhan pertanian, Kementerian Pertanian akan merevitalisasi peran penyuluh sebagai agen perubahan di lapangan. Penyuluh pertanian akan dibekali dengan metode penyuluhan modern, termasuk pemanfaatan

platform digital untuk memperluas jangkauan edukasi. Sinergi antara penyuluh, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lokal akan ditingkatkan guna mempercepat diseminasi inovasi pertanian. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan teknologi dapat berjalan lebih efektif, mendorong produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Melalui pengembangan SDM pertanian yang holistik, Kementerian Pertanian berupaya menciptakan generasi petani yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi global. Pada akhirnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen kuat dan strategi yang terukur, periode 2025–2029 diharapkan menjadi titik lompatan bagi kemandirian dan kemajuan pertanian Indonesia.

1.1.5.2. Penerapan Teknologi

Pertanian modern menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Indonesia. Transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern telah diakselerasi melalui tiga pilar utama: mekanisasi, digitalisasi, dan smart farming. Saat ini pertanian Indonesia berada pada level teknologi *agriculture* 2.0 menuju teknologi *agriculture* 3.0. *Agriculture* 3.0 yang dikenal juga sebagai pertanian presisi, merupakan era pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan praktik pertanian. Teknologi pertanian pada tahun 2029 diharapkan sudah menjadi teknologi pertanian 4.0.

Smart farming telah diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan input pertanian seperti air, pupuk, dan pestisida. Teknologi *precision farming* telah diterapkan untuk memastikan

dosis pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan tanaman, sehingga mengurangi limbah dan biaya produksi. Selain itu, sistem irigasi cerdas berbasis IoT telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, terutama di daerah rawan kekeringan.

1.1.5.3. Infrastruktur Pendukung Pertanian

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; dan (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian, pengairan lahan pertanian meliputi:

- a. Rehabilitasi jaringan irigasi.
- b. Pengembangan sumber air yang terdiri irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.
- c. Bangunan Konservasi Air

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau sesuai untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan pertanian dilakukan melalui kegiatan Optimasi Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Produktif. Kegiatan optimasi lahan dilakukan pada lahan rawa dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa yang

potensial mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian.

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tani padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak.

1.1.5.4. Sarana Produksi Pertanian

Sarana yang dimaksud meliputi benih/bibit, pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Benih/bibit unggul dan bermutu yang ditandai dengan sertifikasi harus mempunyai keunggulan dari sisi varietas, ketahanan terhadap hama, serta mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.

Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud termasuk pupuk organik dan pupuk an organik.

Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen dan pasca panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

1.1.5.5. Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian

Selama periode 2020-2024 Kementerian Pertanian telah melakukan beragam strategi agar Pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat khususnya Perempuan. Kementan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG) mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan/audit. Kegiatan di Kementerian Pertanian yang berbasis gender diantaranya kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, serta Program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS). YESS terus memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di dunia pertanian. Melalui konsep Gender Equality and Social Inclusion (GESI), program ini memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu capaiannya adalah dari target penerima manfaat YESS tahun 2023 sebanyak 66.990 orang, penerima manfaat kategori GESI untuk Perempuan mencapai 26.274 orang. Atas dasar hal tersebut Kementerian Pertanian selama periode 2020-2024 telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebanyak 2 (dua) kali.

Anugerah Penghargaan level tertinggi yaitu level Mentor untuk APE 2020 dan anugerah penghargaan level Utama untuk APE 2023. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kementan dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan kementerian, yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan pertanian.

1.1.5.6. Praktik Pertanian Berkelanjutan

Praktik pertanian berkelanjutan memprioritaskan keseimbangan antara produksi pangan, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi petani, agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan). Praktik pertanian berkelanjutan di Kementerian Pertanian di antaranya Desa Organik, Pengendalian Hama Terpadu, Irigasi Hemat air, Rotasi Tanaman, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan *Climate Smart Agriculture* (CSA).

Pertanian berkelanjutan di Indonesia menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. Sebagai negara agraris dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan seperti degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan mencakup pendekatan agroekologi, penggunaan pupuk organik, integrasi tanaman-ternak, serta diversifikasi tanaman yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.

Implementasi praktik pertanian berkelanjutan memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, kearifan lokal dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani. Peranan pemerintah dan swasta sangat penting untuk mendukung dan menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, seperti dukungan dalam pendanaan, penyiapan teknologi, proses hilirisasi produk pertanian ramah lingkungan, pendekatan teknologi *Internet of Things* (IoT) dapat mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi input sarana produksi budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Berdasarkan uraian pada sub bab 1.2 hingga 1.4 sebelumnya, maka terdapat beberapa potensi yang meliputi kekuatan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta peluang yang dapat dimanfaatkan Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. **Kekuatan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:**

1. Program swasembada pangan di RPJMN 2025–2029. Komitmen Presiden dalam RPJMN 2025–2029 untuk mempercepat swasembada pangan menjadi motor utama penggerak Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi, mengurangi impor, menjaga stabilitas harga, serta membuka lapangan kerja. Swasembada pangan menjadi kunci memperkuat kedaulatan pangan. Program ini mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi, pemanfaatan benih unggul, smart farming, dan peningkatan indeks panen. Sinergi lintas kementerian, optimalisasi KUR, serta dampak sosial bagi sekitar 40 juta pekerja sektor pertanian akan memperkuat ekonomi desa dan regenerasi petani. Di tengah krisis pangan global, upaya

mewujudkan ini jadi tonggak transformasi pertanian menuju kemandirian, modernitas, dan daya saing nasional.

2. Keragaman Sumber Daya di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia didukung dengan keragaman sumber daya, meliputi luas lahan pertanian sekitar 45 juta hektar, lahan sawah sekitar 7,38 juta hektar, beragam komoditas unggulan, serta plasma nutfah lokal yang strategis. Didukung jaringan kelembagaan yang luas (sekitar 5.700 BPP, 38.000 penyuluh) dan 40,6 juta tenaga kerja, Kementerian Pertanian berharap mampu mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas petani, dan mengoptimalkan potensi lokal melalui pendekatan pembangunan berbasis wilayah. Selain itu, peluang ekspor senilai USD 7,44 miliar dari sawit, karet, kopi, kakao, dan komoditas unggulan lain memperkuat daya saing global. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pertanian berperan penting dalam transformasi pertanian menuju kemandirian, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat.
3. Akses kelembagaan organisasi Kementerian Pertanian memiliki jaringan yang tersebar di seluruh provinsi.
4. Perempuan memainkan peran penting dalam berbagai tahap produksi pertanian, mulai dari penyiapan benih hingga pemanenan dan pengolahan. Perempuan berpotensi dalam mengembangkan inovasi pertanian seperti pertanian organik dan diversifikasi produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sedangkan **peluang yang dimiliki Kementerian Pertanian** dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa peluang bagi Kementerian Pertanian, meliputi:

- a. Potensi pasar ekspor Indonesia semakin terbuka seiring dengan proyeksi FAO bahwa permintaan pangan global akan meningkat 60% pada 2050. Banyak negara berkembang akan semakin bergantung pada impor pangan, sementara negara maju mengalami penurunan kapasitas produksi akibat urbanisasi dan perubahan lahan. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati dan tren global terhadap produk sehat dan organik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan rantai nilai dari produk pangan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah.
- b. Proyeksi penurunan luas lahan pertanian subur di negara maju menyebabkan penurunan produksi pertanian pada negara tersebut. Sedangkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga hal ini menjadi peluang pasar ekspor baru bagi komoditas pangan dan pertanian untuk beberapa komoditas utama dan strategis.
- c. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang semakin berkurang di wilayah pedesaan pada beberapa negara berkembang menjadi peluang tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga ahli pertanian, untuk bekerja di luar negeri. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten melalui pendidikan vokasi, sertifikasi keterampilan modern, dan peningkatan kualitas penyuluhan.
- d. Proyeksi peningkatan populasi akan meningkatkan *demand* terhadap produk pangan dan pertanian, sedangkan ketersediaan akan semakin menurun seiring berkurangnya lahan pertanian di dunia. Hal ini selain menimbulkan potensi ekspor juga berpeluang meningkatkan nilai tambah, daya

saing dan harga produk ekspor pertanian Indonesia di luar negeri.

2. Tren Pertumbuhan usaha pertanian global berpotensi meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan peluang bagi SDM Petani di Indonesia, yaitu:
 - a. Peluang Penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam mengembangkan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
 - b. Peluang Peningkatan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM Pertanian nasional.
3. Kemajuan teknologi digital juga menimbulkan peluang bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pertanian Indonesia, yaitu:
 - a. Penerapan teknologi digital sebagai salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan SDM Pertanian.
 - b. Kementerian Pertanian dapat memenuhi kebutuhan sertifikasi SDM Pertanian nasional melalui berbagai kerjasama berbasis pemanfaatan teknologi digital.
4. Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta

komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

5. Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden pada Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 memberikan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu peluang:
 - a. Swasembada pangan menjadi salah satu fokus strategis nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, seluruh K/L terkait akan terlibat bahu membahu dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Kementerian Pertanian otomatis akan terbantu dan mendapat banyak dukungan dari seluruh K/L terkait.
 - b. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)
 - c. Modernisasi pertanian melalui penerapan *Agriculture 3.0* akan membuat pertanian nasional semakin produktif dan mandiri.
 - d. Penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam meningkatkan produksi pangan asal pertanian untuk komoditas pangan prioritas (padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu dan sukun) serta komoditas pangan bergizi (misal Beras, sayur dan buah, susu, karkas, dan lain-lain).
 - e. Sentralisasi penyuluh pertanian dibawah Kementerian Pertanian
 - f. Penyuluhan pemanfaatan varietas tanaman dan benih hasil penelitian
 - g. Penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih melalui pelaksanaan penelitian pada perguruan tinggi Pertanian.
 - h. Diklat di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
 - i. Penyuluhan mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha tani
 - j. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM pengembangan usaha tani (pengembangan akses pasar dan akses informasi).

- k. Penyuluhan mengenai rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
 - l. Pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam memangkas rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
 - m. Penyuluhan dan pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam pemanfaatan teknologi digital and *smart farming* berbasis kearifan lokal dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian.
6. Peningkatan akses Perempuan terhadap Pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal tersebut memungkinkan mereka mengadopsi teknologi baru dan mengelola usaha pertanian dengan lebih efektif. Memberikan akses yang lebih adil kepada Perempuan dan pihak yang termarginalkan terhadap sumber daya seperti lahan, modal dan teknologi akan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pertanian.
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Alih status penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke pusat adalah langkah strategis yang memperkuat peran Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional. Perubahan ini memungkinkan koordinasi dan standarisasi penyuluhan, memperluas akses penyuluh ke pelatihan, sertifikasi, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pendampingan petani dalam menghadapi tantangan iklim, pasar, dan produksi. Didukung Inpres No. 3/2025, penyuluh kini berperan vital dalam percepatan swasembada pangan, adopsi inovasi, dan modernisasi pertanian. Harmonisasi kelembagaan dan pembiayaan juga membuka peluang peningkatan kapasitas, sarana kerja, dan kesejahteraan penyuluh. Dalam jangka panjang, alih status ini memperkuat sistem penyuluhan profesional.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang meliputi kelemahan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. **Kelemahan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:**

1. Kurangnya jenis Jabatan Fungsional Teknis (JFT) Kementerian Pertanian dalam mengakomodir struktur organisasi baru.
2. Beberapa area abu-abu (*grey area*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti pelestarian varietas tanaman berkelanjutan dan perlindungan tanaman menggunakan pestisida, masih menjadi kegiatan lintas unit eselon I di eselon I yang berbeda, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaannya.
3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian. Meskipun sudah ada banyak tenaga kerja yang terlibat, jumlah dan kualitas SDM pertanian yang ada saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan baru dalam sektor pertanian yang semakin kompleks, seperti pengembangan teknologi pertanian modern, perubahan iklim, dan kebutuhan global terhadap pangan organik. Kementerian memerlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih besar dan serius, terutama dalam bidang teknologi pertanian dan analisis data.
4. Koordinasi yang Terkadang Kurang Efektif antar Unit Kerja. Kementerian Pertanian terdiri dari banyak unit yang masing-masing memiliki fungsi yang sangat spesifik. Kadang kala, koordinasi antar unit kerja yang berbeda masih kurang berjalan efektif, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas atau pengambilan keputusan yang kurang sinkron. Ini bisa

menghambat implementasi kebijakan atau program yang bersifat lintas sektor.

5. Keberagaman Program yang Belum Terintegrasi dengan Baik. Kementerian Pertanian memiliki beragam program yang diimplementasikan di lapangan, namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program-program ini terintegrasi dengan baik dan tidak berjalan secara silo. Program-program yang tidak saling terhubung bisa mengurangi dampaknya, padahal sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang lebih holistik untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim.
6. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi yang Terstruktur pada Program-Program Pembangunan Pertanian. Meskipun banyak program pembangunan pertanian yang diluncurkan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program tersebut dievaluasi secara rutin dan hasilnya bisa diukur. Tanpa evaluasi yang efektif, sulit bagi Kementerian untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi sektor pertanian.
7. Tantangan dalam Mengelola Anggaran yang Terbatas dengan Prioritas yang Beragam. Mengingat anggaran yang terbatas dan banyaknya program yang perlu didanai, Kementerian Pertanian sering kali menghadapi tantangan dalam memprioritaskan program-program yang akan memberikan dampak maksimal. Ini bisa mengarah pada ketidakseimbangan dalam alokasi dana dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Penyempurnaan dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya menjadi penting untuk menghindari ini.
8. Stereotip gender membatasi perempuan dan pihak termarginalkan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dan menghambat akses mereka ke sumber daya (modal, lahan dan teknologi) dan peluang.

Sedangkan tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa tantangan bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
 - a. Peningkatan *demand* pangan nasional membutuhkan peningkatan produksi komoditas pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan import terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan utama dan prioritas dalam negeri seperti Padi, Jagung, Kedelai, Daging, Susu, Telur, Bawang, Cabai, Tebu, dan lain-lain.
 - b. Peningkatan kebutuhan produksi pertanian akan meningkatkan kebutuhan lahan pertanian. Alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan masih menjadi masalah nasional yang diharapkan dapat diselesaikan melalui reformasi agraria berkelanjutan.
 - c. Peningkatan kebutuhan produksi pertanian juga akan meningkatkan kebutuhan pengairan lahan pertanian. Ketersediaan sumber daya air pertanian yang semakin berkurang membutuhkan upaya khusus agar lahan pertanian mendapatkan air yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai produksi yang ditargetkan.
- Data Kementerian PUPR menunjukkan sekitar 52% jaringan irigasi teknis di Indonesia dalam kondisi rusak ringan sampai berat, sehingga mengurangi efisiensi pengairan. Dengan perubahan iklim, ketersediaan air semakin tidak menentu, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi

penggunaan air dan pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik.

- d. Perubahan iklim ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi target luas panen dalam mencapai produksi pertanian yang diharapkan. Peramalan iklim yang akurat serta upaya lain diperlukan dalam menciptakan tanaman yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ekstrem tersebut.

Badan Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa suhu global terus meningkat, dan Indonesia diprediksi mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,8–1,4°C pada 2050. Dampaknya mencakup perubahan pola hujan, peningkatan kejadian kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit tanaman yang makin sulit diprediksi. Ini menuntut pengembangan varietas tahan iklim ekstrem dan sistem peringatan dini yang lebih canggih.

- e. Potensi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di wilayah perdesaan.

2. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan berpotensi menghambat pembangunan pertanian pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

- a. IKSS 6 “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis” tidak tercapai sesuai target yang ditentukan pada tahun 2022 dan tahun 2023, walaupun masih dalam batas toleransi 5%. Pada tahun 2022 capaian kinerja IKSS 6 sebesar 99,42% dimana target yang ditetapkan sebesar 80,5% sedangkan realisasi kinerja sebesar 80,03%. Target tahun 2022 ini sama dengan target tahun 2021, dimana kinerja tahun 2021 tercapai sesuai target. Sedangkan tahun 2023 pada tahun 2023 capaian

kinerja sebesar 99,47%, dimana target yang ditetapkan sebesar 81% dan hanya tercapai 80,57%.

Berdasarkan realisasi kinerja terhadap target tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja IKSS 6 tahun 2022 dan tahun 2023 cenderung stagnan, sehingga perlu ada peningkatan kinerja pada Renstra periode berikutnya.

- b. IKSS 17 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”, tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Target tahun 2021 sebesar 79,76% dan tercapai sebesar 79,05%. Target tahun 2021 sebesar 80,71% dan tercapai sebesar 79,4%. Target tahun 2022 sebesar 81,46% dan tercapai sebesar 79,4%. Sedangkan target tahun 2023 sebesar 82,21% hanya tercapai sebesar 79,64%.

Realisasi kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak mencapai 80%, cenderung stagnan antara 79,05% hingga 79,64%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dan Kementerian Pertanian perlu merumuskan terobosan kreatif agar target RB dapat tercapai melebihi 80%.

- c. Penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab Pemda, namun belum semua Pemda memiliki perhatian bahkan menganggap pertanian bukan prioritas. Hal ini menyebabkan produksi pertanian di beberapa wilayah tidak optimal dikarenakan pengembangan SDM pertanian, khususnya pengembangan penyuluh di daerah tidak merata. Ketimpangan kesejahteraan penyuluh antar daerah juga berpotensi terjadi di masa yang akan datang, dimana tidak semua daerah memiliki perhatian yang sama terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya.

- d. Ketersediaan peralatan dan infrastruktur penyuluhan di Balai Penyuluhan belum optimal, sehingga proses pengembangan dan adopsi teknologi pertanian menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.
- e. Adanya keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan lain dalam pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Selain itu, KEP belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lain karena keterbatasan akses sumber informasi, teknologi dan pasar. Hal ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional menjadi terhambat dan cenderung stagnan.

3. Sumber Daya Alam Terbatas

Luas baku sawah Indonesia berkurang dari sekitar 8,1 juta ha (2013) menjadi 7,4 juta ha (2021). Konversi lahan sawah irigasi juga menjadi masalah karena luas lahan sawah terus berkurang, meskipun ada pencetakan sawah baru. Penurunan kualitas tanah akibat erosi, degradasi, dan penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang juga menurunkan produktivitas jangka panjang. Perlu upaya intensifikasi berkelanjutan dan penggunaan teknologi konservasi tanah.

4. Rantai Distribusi Panjang

Distribusi produk pertanian di Indonesia melibatkan hingga 5–7 rantai perantara dari petani ke konsumen akhir, yang sering kali menyebabkan harga melambung 2–3 kali lipat di tingkat konsumen. Hal ini merugikan petani, rantai pasok panjang dan tidak efisien menyebabkan hilang nilai tambah hasil panen dan mengurangi daya saing produk lokal.

5. Kehilangan Hasil Panen

FAO memperkirakan kehilangan hasil panen di Indonesia mencapai 20–30% untuk komoditas hortikultura seperti

sayuran dan buah-buahan, serta sekitar 10–20% untuk beras. Penyebabnya antara lain infrastruktur pascapanen yang minim, kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, dan lemahnya akses pasar.

6. Penetrasi Produk Impor

Volume impor pangan Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD 22 miliar, dengan kontribusi besar dari komoditas seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging. Produk-produk impor yang sering kali lebih murah dan stabil pasokan dapat menurunkan daya saing produk lokal dan membuat petani sulit bersaing.

7. Kerusakan Lingkungan

Deforestasi di Indonesia, menurut *Global Forest Watch*, mencapai 1,1 juta hektar pada 2021, sebagian besar untuk ekspansi perkebunan. Praktik pertanian intensif juga menyebabkan degradasi lahan, penurunan biodiversitas, dan polusi air, dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas, yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian.

8. Masalah Manajemen

Sebagian besar petani kecil kurang memiliki kemampuan manajerial, baik dalam pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, maupun pemasaran. Survei Kementan (2022) menunjukkan hanya sekitar 20% kelompok tani aktif memiliki rencana usaha yang jelas. Kondisi ini bisa mengurangi efisiensi dan produksi.

9. Produktivitas Rendah

Produktivitas padi di Indonesia rata-rata 5,2 ton/ha, lebih rendah dibandingkan Vietnam (5,9 ton/ha) dan Tiongkok (6,9 ton/ha). Produktivitas kedelai nasional sekitar 1,5 ton/ha, jauh di bawah potensi hasil optimal yang bisa mencapai 2,5–3 ton/ha. Rendahnya produktivitas ini menjadi hambatan besar dalam meningkatkan daya saing.

10. Usaha Tani Skala Kecil

Sekitar 93% petani Indonesia menggarap lahan kurang dari 0,5 ha (BPS, 2021), yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses teknologi modern, permodalan, pengetahuan dan pemasaran yang lebih luas. Usaha tani skala kecil rentan terhadap guncangan pasar dan perubahan iklim, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas dan daya saing produk yang dihasilkan.

11. Adopsi teknologi dan informasi

Tingkat adopsi teknologi modern oleh petani masih rendah, baik dari sisi pemahaman maupun penguasaan, sehingga mayoritas petani masih mengandalkan cara-cara tradisional dan berskala rumah tangga. Teknologi seperti irigasi presisi, *drone* pemantau lahan, aplikasi cuaca, dan alat pengolahan pasca panen terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 20–30%. Rendahnya literasi digital, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital di pedesaan menjadi hambatan utama dalam mempercepat transformasi menuju pertanian modern dan korporasi petani.

Kecepatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan perubahan dinamika pasar global, terutama terkait dengan keberlanjutan dan ketahanan pangan sangat diperlukan. Lambatnya adopsi teknologi baru atau kesulitan dalam melakukan perubahan kebijakan yang sesuai dengan perubahan pasar dapat menghambat daya saing produk pertanian Indonesia.

12. Kelembagaan petani

Sebagian besar petani di Indonesia masih bekerja secara individual tanpa tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi, gapoktan, atau badan usaha milik petani yang kuat. Padahal, kelembagaan berperan penting dalam konsolidasi usaha, penguatan posisi tawar, akses modal, serta efisiensi distribusi input dan hasil

panen. Saat ini, kelembagaan petani yang efektif masih terbatas, sehingga banyak potensi kolektif yang tidak tergarap maksimal dan petani sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

13. Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian

Jumlah petani di Indonesia terus menurun, terutama di kalangan generasi muda. Data Sakernas BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, proporsi tenaga kerja muda di sektor pertanian turun lebih dari 30%. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi atau mindset terhadap pekerjaan tani yang dianggap kurang menjanjikan, penuh risiko, dan tidak bergengsi. Urbanisasi juga memperparah kondisi ini, dengan banyak pemuda desa memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor lain yang dinilai lebih stabil dan berpendapatan lebih baik. Hal ini menimbulkan ancaman regenerasi petani dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi pertanian nasional.

14. Keterbatasan peralatan dan infrastruktur penyuluhan

Ketersediaan peralatan dan infrastruktur di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) masih jauh dari optimal. Banyak BPP yang kekurangan sarana seperti alat peraga, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga proses penyampaian materi penyuluhan dan adopsi teknologi pertanian tidak berjalan maksimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman dan penerapan teknologi oleh petani di lapangan.

15. Keterbatasan kapasitas kelembagaan ekonomi petani (KEP)

Masih terdapat keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan dalam membentuk serta mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP juga sering kali belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena minimnya akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, dan jejaring usaha. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha

tani nasional berjalan lambat, kurang terkoordinasi, dan sulit tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.

DRAFT

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

2.1. Visi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

**"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat
Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045"**

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pertanian**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

- **Pertanian Maju**

Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

- **Pertanian Berkelanjutan**

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Bab I, Pasal 1, angka 1 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

- **Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
2. Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
4. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2.2. Misi Kementerian Pertanian

Presiden periode 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan istilah "Asta Cita" dalam mewujudkan Visi Indonesia tahun 2025-2029. **Asta Cita Presiden periode 2025-2029 adalah:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. **Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:**

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya

pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia

Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah *Monkeypox*

(Mpox), Rabies, Antraks, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

2.3. Tujuan Kementerian Pertanian

Visi dan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 akan menjadi arah strategis (*strategic direction*) pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan strategis atau *destination statement* merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Pertanian. Sehingga, Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Pertanian. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun

2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya Volume Usaha Pertanian dan Kapasitas SDM Pertanian

Tujuan ini merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan volume usaha pertanian dan SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1: Pertumbuhan volume usaha pertanian
- IT.2: Pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas

2. Tujuan 2: Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas

Tujuan 2 ini adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkular dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.3: Indeks swasembada pangan prioritas

- IT.4: Indeks penerapan sistem budi daya pertanian berkelanjutan
- IT.5: Indeks cadangan pangan asal pertanian nasional

3. Tujuan 3: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.6 : Persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bioenergi
- IT.7 : Pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian
- IT.8 : Persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian

4. Tujuan 4: Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan kepada Manusia

Tujuan 4 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan kepada manusia, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti Rabies, *Monkeypox*, Antraks, Flu Burung, dan lain sebagainya, mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan,

mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) 9. Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia.

5. Tujuan 5: Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) 10. Nilai RB Kementerian Pertanian.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian merupakan standar kinerja Kementerian Pertanian di tingkat Kementerian dalam mewujudkan pembangunan nasional. SS Kementerian Pertanian dibentuk berdasarkan Tujuan Kementerian Pertanian serta outcome akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian. SS Kementerian Pertanian sejatinya merupakan *Critical Success Factor* (CSF) atas outcome akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional terkait dengan pertanian.

Outcome akhir (*final outcome*) beserta CSF nya dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 1

Outcome akhir (*final outcome*) 1 (FO.1) adalah meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator kinerja IK.1 Indeks Kesejahteraan Petani. CSF dalam mewujudkan FO.1 ini adalah *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1, yaitu Meningkatkan pendapatan petani, dengan 2 (dua) indikator kinerja, meliputi:

- IK 1.1.a Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).
- IK 1.1.b Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian

Kesejahteraan petani merupakan salah satu hasil akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian, dimana langkah kritis keberhasilan yang perlu diwujudkan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatnya pendapatan petani. Hal ini karena salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan.

Selanjutnya outcome akhir (*final outcome*) 2 (FO.2) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 2 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2

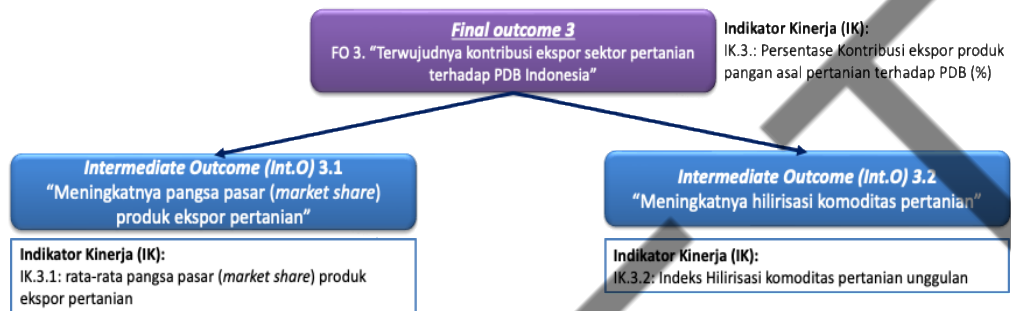
Outcome akhir kedua (FO.2) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 2 adalah Indeks kemandirian pangan asal pertanian. CSF dari FO.2 ini terdiri dari 2 (dua) CSF, yaitu:

- Intermediate Outcome (Int.O) 2.1 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja (IK) 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas.
- Intermediate Outcome (Int.O) 2.2, Meningkatnya cadangan pangan nasional, dengan Indikator Kinerja (IK) 2.2 Persentase peningkatan cadangan pangan.

Kemandirian pangan merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) hal kritis dalam mewujudkan kemandirian pangan, yaitu terwujudnya swasembada pangan serta meningkatnya cadangan pangan nasional. Swasembada pangan mengukur sebagian besar kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi pangan dalam negeri, sedangkan cadangan pangan nasional, yang meliputi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan daerah, menggambarkan ketersediaan pangan baik untuk menutupi kekurangan produksi

maupun dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri di masa yang akan datang.

Selanjutnya outcome akhir (*final outcome*) 3 (FO.3) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 3 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 3

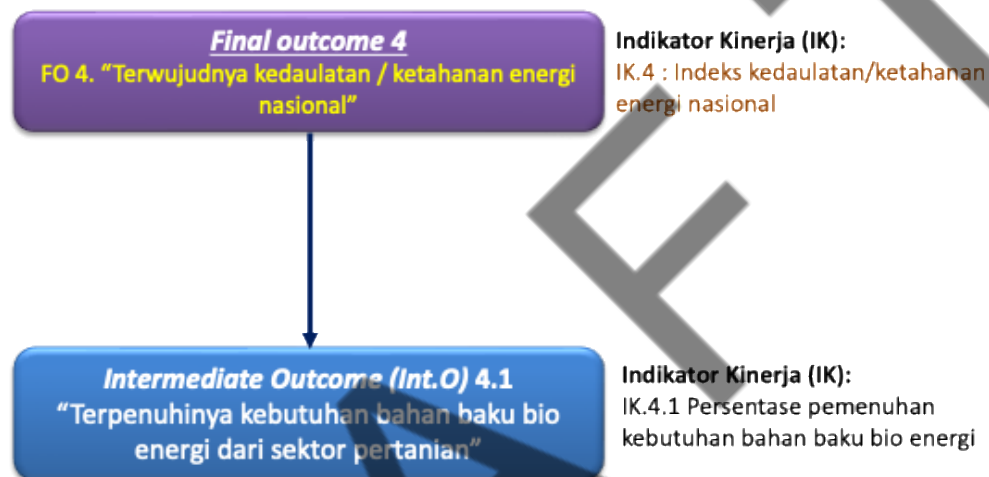
Outcome akhir ketiga (FO.3) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 3 Persentase kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian terhadap PDB. Kinerja dan indikator kinerja ini mengukur seberapa besar kontribusi ekspor produk pangan dan pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). CSF dari FO.3 ini terdiri dari 2 (dua) CSF, yaitu:

- Intermediate Outcome (Int.O) 3.1 Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.1 Rata-rata pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian.
- Intermediate Outcome (Int.O) 3.2 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.2 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan.

Kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian dapat meningkat melalui 2 (dua) langkah kritis keberhasilan, yaitu peningkatan pangsa pasar dan hilirisasi (termasuk kualitas) produk pangan asal pertanian. Ketersediaan produk pertanian unggulan berkualitas hasil hilirisasi akan dapat meningkatkan nilai tambah dan

berpotensi meningkatkan daya saing. Sehingga, dengan ketersediaan akses pasar yang potensial, maka volume ekspor akan dapat meningkat sehingga meningkatkan kontribusi ekspor sektor pertanian.

Selanjutnya outcome akhir (*final outcome*) 4 (FO.4) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 4 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 4

Outcome akhir keempat (FO.4) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya ketahanan energi nasional, dengan Indikator Kinerja (IK) 4 adalah Indeks ketahanan energi nasional. FO.4 sebenarnya merupakan outcome akhir dari sektor energi, khususnya terkait dengan ketersediaan energi non fosil dalam menjawab tantangan krisis energi kedepan. Namun, bahan baku yang dibutuhkan dalam mewujudkan kedaulatan energi tersebut berasal dari komoditas pertanian, yaitu kelapa sawit untuk bahan baku Bio Diesel dan Bio Avtur, serta beberapa komoditas pertanian lainnya, sebagai bahan baku Bio-Ethanol. Sehingga, CSF dari FO.4 ini adalah Intermediate Outcome (Int.O) 4.1 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi.

Selanjutnya outcome akhir (*final outcome*) 5 (FO.5) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 5 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 5

Outcome akhir kelima (FO.5) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner yang melekat pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) akan terus berupaya dalam meningkatkan kesehatan hewan dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit hewan yang berdampak terhadap manusia. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dari dampak penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat untuk semua (*one health*). Intermediate Outcome (Int.O) yang merupakan CSF dari FO.5 ini adalah Int.O 5.1 Meningkatkan kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Selanjutnya outcome akhir (*final outcome*) 6 (FO.6) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 6 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 6

Outcome akhir keenam (FO.6) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) 6 Rata-rata nilai RB K/L/D. Seperti telah diuraikan sebelumnya, RB merupakan upaya seluruh Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilakukan serempak setiap tahun. Untuk itu, maka langkah kritis dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) adalah terwujudnya RB Kementerian Pertanian sesuai target yang dicanangkan. CSF untuk FO.6 ini adalah Int.O.6.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi dengan Indikator Kinerja (IK) 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Berdasarkan CSF pada masing-masing FO.1, FO.2, FO.3, FO.4, FO.5 dan FO.6 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diterjemahkan Intermediate Outcome (Int.O) beserta indikator kinerjanya menjadi SS dan IKSS yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Penerjemahan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS.1 Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian
SS.2 Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas
SS.3 Meningkatnya cadangan pangan nasional	IKSS 3.1 Persentase Peningkatan cadangan pangan
SS.4 Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	IKSS 4.1 Market Share produk ekspor pertanian
SS.5 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKSS 5.1 Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan
SS.6 Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian	IKSS 6.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi
SS.7 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Penularan Penyakit Akibat Hewan dan Produk Hewan	IKSS 7.1 Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner
SS 8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 8.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini kemudian diturunkan (*cascading*) menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan

(SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). *Cascading* kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Detail pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan untuk SP, IKP, SK, IKK dan Output disajikan dalam Lampiran 3.

2.4.1.1. Manajemen Risiko Pembangunan Pertanian

Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Kementerian Pertanian menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pada periode 2025-2029, penerapan manajemen risiko difokuskan pada program-program prioritas Kementerian Pertanian yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN, seperti: Program Swasembada Pangan, Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi, Pengembangan Lumbung Pangan, dan

Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu. Selain pemetaan risiko pada Proyek Strategis Nasional (PSN), dilakukan pula identifikasi risiko secara menyeluruh berdasarkan sasaran strategis kementerian yang telah ditetapkan. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target PSN maupun sasaran strategis kementerian.

Identifikasi risiko dilakukan sejak tahap perencanaan sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi terhadap berbagai tantangan pada setiap aspek risiko, antara lain:

- **Risiko kebijakan**, seperti tumpang tindih regulasi, perubahan arah kebijakan nasional, atau ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah yang dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan program;
- **Risiko bencana**, seperti dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu produktivitas dan keberlanjutan usaha tani;
- **Risiko kecurangan**, seperti penyimpangan dalam distribusi bantuan;
- **Risiko kepatuhan**, misalnya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat pelaksanaan program; dan
- **Risiko operasional**, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan, serta kendala koordinasi antar unit kerja dan pelaksana di lapangan.

Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target PSN dan sasaran strategis kementerian dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional merupakan gambaran besar mengenai arah pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan memuat prioritas pembangunan pertanian yang disusun untuk memecahkan permasalahan prioritas dan mendesak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian masalah diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap capaian sasaran pembangunan sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029

dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.

Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru); PN 3 (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi); PN 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas); PN 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri); PN 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan); PN 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan); PN 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur). Dari PN

tersebut, Kementerian Pertanian berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5.

Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Prioritas Nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*) sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian berkontribusi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima). Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu) melalui produksi pangan asal pertanian. Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 3 (tiga) melalui peningkatan produktivitas. Kontribusi terhadap jaminan kesejahteraan sosial melalui kredit usaha untuk mendukung dalam menghilangkan kemiskinan absolut. Detail masing-masing kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	1. Produksi pangan asal pertanian bergizi 2. Produksi Susu
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	3. Swasembada Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, dan Tebu 4. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, Tebu, dan Sagu
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	5. Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian untuk Program Hasil Terbaik Cepat. Berikutnya yaitu program prioritas dengan orientasi jangka menengah. Terdapat sebanyak 17 Program Prioritas Presiden, sebanyak 3 (tiga) diantaranya terkait dengan pertanian sebagai berikut.



Mencapai swasembada pangan, energi, dan air



Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani



Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN

Gambar 3. 2

Program Prioritas Presiden terkait Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, Kementerian Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan air; menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; serta pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya. Pemetaan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap ketiga program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1. Swasembada Pangan 2. KSPP: Padi, Jagung, Hortikultura 3. Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029
Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	4. Menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada Petani → Meningkatkan produksi dan produktivitas
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya	5. Program Kredit Usaha Tani: Peternakan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat.

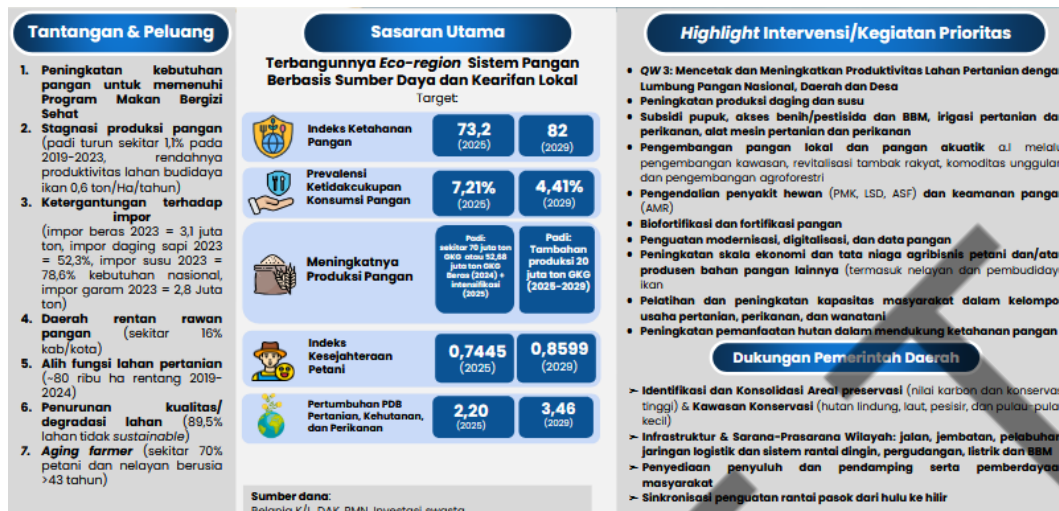
Berdasarkan tabel di atas, berhasil dipetakan sebanyak 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian terhadap program prioritas nasional. Masing-masing program prioritas tersebut dijabarkan menjadi program kerja. Berdasarkan hasil analisis, berikut program kerja terkait swasembada pangan.

- Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung

peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

- Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru
- Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen
- Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian
- Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Berdasarkan Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran dan intervensi program swasembada pangan dalam Kerangka Prioritas Nasional 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bappenas

Gambar 3. 3 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional swasembada pangan dilakukan dalam mewujudkan beberapa sasaran, yaitu:

- **Meningkatkan ketahanan pangan**

Kontribusi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan swasembada pangan dapat terwujud. Ketersediaan komoditas pangan strategis diprioritaskan berdasarkan konsumsi masyarakat, sehingga dapat memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dari produksi dalam negeri.

- **Memastikan kecukupan konsumsi pangan nasional**

Ketersediaan pangan yang diupayakan sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan memastikan kecukupan pangan nasional, sehingga akan menurunkan angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Selain itu, kandungan gizi yang tersedia dalam setiap komoditas pangan juga menjadi perhatian sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan bergizi yang beraneka ragam.

- **Meningkatkan produksi pangan**

Kementerian Pertanian akan berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya komoditas pangan strategis nasional. Peningkatan produksi dilakukan baik dengan meningkatkan produktivitas dan potensi produksi, luas panen, memastikan tanaman yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, khususnya iklim ekstrim, ternak yang tahan terhadap penyakit hewan hingga memastikan optimalnya indeks pertanaman serta ketersediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan, air maupun Prasarana dan Sarana Pertanian lainnya.

- **Mengurangi impor pangan**

Upaya Kementerian Pertanian dalam memastikan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri terpenuhi melalui produksi dalam negeri secara otomatis akan dapat mengurangi impor. Kualitas pangan yang dihasilkan menjadi tantangan untuk memastikan komoditas pertanian yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

- **Meningkatkan kesejahteraan petani**

Kesejahteraan petani menjadi salah satu *highlight* nasional dan salah satu fokus Presiden di bidang Pertanian. Seluruh upaya yang dilakukan dan telah dijelaskan sebelumnya tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan petani, terutama peningkatan nilai tukar petani.

Sedangkan kerangka program prioritas swasembada energi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bappenas

Gambar 3. 4 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi

Kementerian Pertanian hanya berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi berupa bahan baku Bio-Avtur, Bio-Diesel maupun Bio-Ethanol dalam mewujudkan swasembada energi. Kerangka ini secara detail akan dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedangkan sasaran dan intervensi Hilirisasi dan Industrialisasi dalam Kerangka Prioritas Nasional 5 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bappenas

Gambar 3. 5

Kerangka Prioritas Nasional terkait Hilirisasi dan Industrialisasi

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional Hilirisasi dan Industrialisasi dilakukan dalam mewujudkan sasaran utama Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam bentuk intervensi pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan pengembangan hilirisasi kelapa.

Dalam rangka mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Pertanian menempatkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan. Hilirisasi di sektor pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global.

Kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar sektor (*on farm–off farm*), serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Menyikapi arah kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian akan mendorong hilirisasi secara lebih terstruktur dan terfokus pada komoditas strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Komoditas prioritas dalam kebijakan hilirisasi Kementerian Pertanian 2025–2029 meliputi: ayam, kelapa dalam, jambu mete, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, ubi kayu, bawang putih, kapas, kacang tanah dan kacang hijau. Penyediaan *cold chain* juga dirancang sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang dilakukan oleh Kementerian

Pertanian untuk menjaga kualitas produk pertanian selama proses transportasi, penyimpanan dan distribusi.

Selain itu, RPJMN juga mencantumkan Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional yang merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



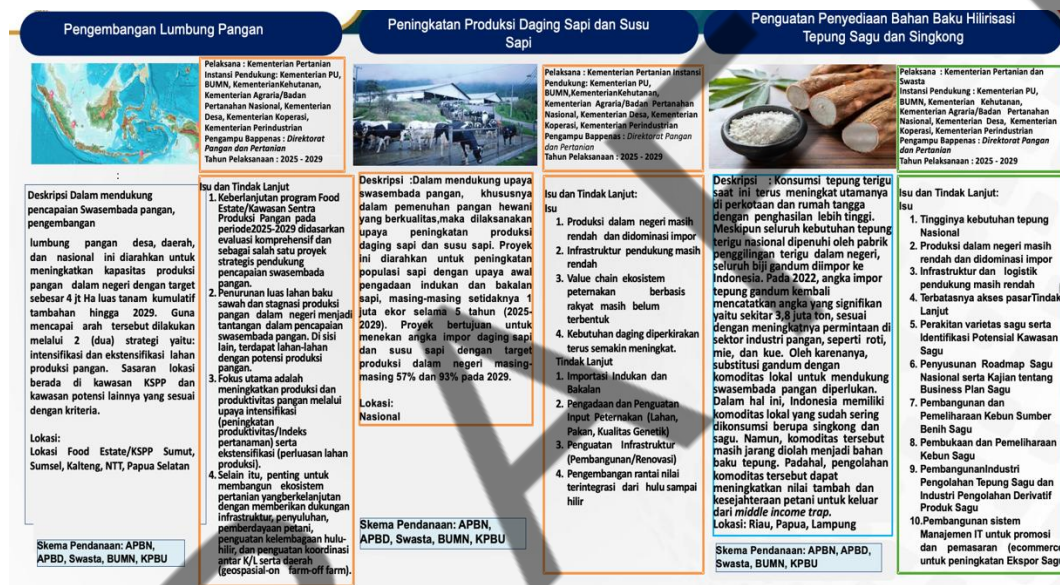
Sumber: Bappenas

Gambar 3. 6 Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional

Baik sasaran, indikator maupun indikasi *highlight* intervensi sesuai kewenangan Kementerian Pertanian telah dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam pohon kinerja pada bab II maupun kerangka kinerja dan pendanaan pada Bab IV. Selain itu, indikasi lokasi

prioritas juga telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan Kementerian Pertanian berdasarkan prioritas. Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan beberapa indikasi *highlight* intervensi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

RPJMN tahun 2025-2029 juga memuat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Bappenas

Gambar 3. 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian

Berdasarkan gambar tersebut, PSN dalam RPJMN 2025-2029 lingkup pangan dan pertanian adalah:

- Pengembangan lumbung pangan
- Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi
- Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong dalam PSN Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi

Jalur Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu

RPJMN Tahun 2025-2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan

mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

(i) Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Strategi PUG dan Inklusi sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh dari semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses: (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang

relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; (b) analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan (c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi Gender dan Inklusi Sosial yaitu: (a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); (b) Indeks Perlindungan Anak (IPA); (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); (d) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); (e) Indeks Pembangunan Gender; (f) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia; (g) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

(ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa, pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD; (c) penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan penguatan kolaborasi Multi-pihak; (d) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam pencapaian banyak tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, arah kebijakan pertanian difokuskan pada pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan bertujuan menciptakan pertanian yang produktif, inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, peran masyarakat, teknologi, dan

keberpihakan terhadap petani kecil. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang mendukung SDGs antara lain:

- (a) Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan; diversifikasi pangan lokal dan pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan; serta penguatan cadangan pangan dan distribusi yang merata.
- (b) Pengentasan Kemiskinan Petani melalui peningkatan akses petani terhadap modal, pasar, teknologi, dan informasi; mendorong pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri; serta perlindungan harga dan jaminan usaha tani.
- (c) Pertanian Ramah Lingkungan dan Tanggap Iklim melalui penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan (ramah lingkungan, hemat air, minim pestisida); restorasi lahan pertanian kritis dan konservasi sumber daya genetik lokal; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui praktik pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*).
- (d) Penguatan Kelembagaan Petani dan Kemitraan melalui pembentukan dan penguatan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani; kolaborasi antara petani, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi; serta digitalisasi pertanian melalui sistem informasi pertanian modern.
- (e) Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Produksi melalui perbaikan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen; serta akses sarana produksi yang berkualitas dan terjangkau (benih, pupuk, alat mesin pertanian).
- (f) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian melalui pelatihan, penyuluhan, dan transfer teknologi kepada petani; regenerasi

petani melalui pelibatan generasi muda dalam sektor pertanian (petani milenial); dan inovasi berbasis riset dan teknologi lokal.

(iii) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dalam RPJMN 2025-2029 dilakukan melalui (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (b) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (d) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*); serta literasi digital secara luas; (e) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (f) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (g) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan skosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Transformasi digital di sektor pertanian adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pengurangan resiko gagal panen, kemudahan akses informasi dan pasar, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan keterlibatan generasi muda dan keberlanjutan dalam kegiatan pertanian. Teknologi dalam transformasi digital pertanian antara lain penggunaan teknologi digital; Internet of Things (IoT); drone dan citra satelit; Artificial Intelligence (AI); aplikasi mobile dan platform digital; big data dan sistem pertanian presisi dalam budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini merupakan bagian penting dari strategi modernisasi pertanian untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama dalam hal

ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(iv) Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim

Perubahan iklim sudah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Hal ini ditandai oleh suhu udara yang semakin panas, kejadian iklim ekstrem yang semakin sering, musim hujan dengan durasi semakin pendek dan musim kemarau yang semakin panjang di berbagai daerah. Awal musim hujan dan kemarau juga makin sulit diprediksi. Kenaikan muka air laut mempengaruhi produktivitas lahan dekat akibat kenaikan salinitas tanah. Semua gejala perubahan iklim tersebut mempengaruhi berbagai sektor, khususnya pertanian yang paling rentan dan mudah terpengaruh oleh cuaca ekstrem, yang berdampak pula terhadap ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan sangat fundamental bagi kemajuan pembangunan nasional karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup warga negara. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro (nasional dan global) ke depan akan semakin sulit karena permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan dinamika lingkungan strategis. Sementara pertumbuhan produksi atau pasokan pangan akan semakin sulit pula karena menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan pangan semakin penting mengingat krisis pangan dapat terjadi kapan saja di tengah kondisi perubahan iklim global yang berpotensi mengancam kehidupan.

Solusi inovatif untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan nasional dan upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan panjang. Untuk itu, pembangunan pertanian berketahanan iklim dan rendah karbon menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak negatif perubahan iklim dan pada waktu bersamaan diharapkan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi manfaat tambahan (co-benefit) dari berbagai aksi adaptasi.

RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk menjadi koordinator terhadap Program Prioritas (PP) dan mengampu serta berkontribusi terhadap Kegiatan Prioritas (KP) seperti diuraikan pada Lampiran III Perpres nomor 12 tahun 2025. Kontribusi tersebut diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap PP dan KP sesuai Lampiran III RPJMN

PN/INDIKATOR PP/INDIKATOR KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Prioritas Nasional (PN) 02: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
Program Prioritas (PP) 10: Swasembada Pangan	
PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	SS.1, IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian
PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani	SS1, IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)
Kegiatan Prioritas (KP) 01: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	
KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton)	SP 2. Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian IKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional RO Kawasan Padi KSPP

KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (ton)	IKK 5.1 Luas panen komoditas serealialia pada kawasan sentra produksi pangan RO Peraturan/Norma/Pedoman Padi IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan
Kegiatan Prioritas (KP) 02: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Utara	
KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton)	IKP 4.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton)
KP 02.10.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton)	IKK 4.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha) (Ditjen Hortikultura) IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan
Kegiatan Prioritas (KP) 03: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Selatan	
KP 02.10.3 Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	IKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional RO Kawasan Padi KSPP
KP 02.10.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	IKK 5.1 Luas panen komoditas serealialia pada kawasan sentra produksi pangan RO Peraturan/Norma/Pedoman Padi IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan

	IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan
Kegiatan Prioritas (KP) 04: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur	
KP 02.10.4 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	IKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional RO Kawasan Padi KSPP
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	IKK 5.1 Luas panen komoditas serealialia pada kawasan sentra produksi pangan RO Peraturan/Norma/Pedoman Padi IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan
KP 02.10.4 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional RO Kawasan Jagung KSPP
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKK 5.1 Luas panen komoditas serealialia pada kawasan sentra produksi pangan Peraturan/Norma/Pedoman Jagung IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan

Kegiatan Prioritas (KP) 05: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua	
KP 02.10.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	IKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional RO Kawasan Jagung KSPP
KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	IKK 5.1 Luas panen komoditas serealisa pada kawasan sentra produksi pangan Peraturan/Norma/Pedoman Jagung IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan
Kegiatan Prioritas (KP) 06: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua Selatan	
KP 02.10.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	IKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional RO Kawasan Padi KSPP
KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	IKK 5.1 Luas panen komoditas serealisa pada kawasan sentra produksi pangan RO Peraturan/Norma/Pedoman Padi IKK 1.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan IKK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan
Kegiatan Prioritas (KP) 07: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan lainnya	
KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak	IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak
KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman

Kegiatan Prioritas (KP) 10: Pengembangan Pangan Hewani	
KP 02.10.10 Produksi Daging (Sapi dan kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik)	IKP 2.1 Persentase produksi peternakan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal peternakan dalam negeri: -Daging Sapi dan Kerbau -Daging Ayam Ras -Daging Kambing/Domba -Telur Ayam Ras -Susu Sapi
KP 02.10.10 Produksi Telur	
KP 02.10.10 Produksi Susu	
Kegiatan Prioritas (KP) 11: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
KP 02.10.11 Produksi Padi	IKP 2.1 Persentase produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri RO Kawasan Padi, RO Kawasan Jagung RO Kawasan Kedelai RO Kawasan Ubi Kayu RO Kawasan Ubi jalar RO Kawasan Kacang tanah RO Kawasan Kacang hijau RO Kawasan Sorghum
KP 02.10.11 Produksi Jagung	
KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang	
KP 02.10.11 Produksi Sorghum	
KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar	
KP 02.10.11 Produksi Kedelai	
Kegiatan Prioritas (KP) 13: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan keamanan Pangan	
KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	IKK 5.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan
KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	IKP 6.1 Persentase jumlah wilayah dan kawasan yang berstatus bebas dan terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah dan kawasan keseluruhan
Kegiatan Prioritas (KP) 14: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	
KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	IKK 2.1 Jumlah komoditas sereal yang terfortifikasi

Kegiatan Prioritas (KP) 16: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif	
KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	IKK Persentase Penyuluh yang Meningkatkan Kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) IO.1 Jumlah kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang mendapatkan pembinaan RO Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan IO.1 Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan pembinaan RO Fasilitas dan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian
KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani	IKK 2.2 Persentase petani muda terhadap total petani* (data dari: Simlutan)
Kegiatan Prioritas (KP) 17: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	
KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur KP 02.10.17 Produksi Tanaman obat; KP 02.10.17 Produksi Florikultura	IKP 3.1 Persentase Produksi Hortikultura terhadap Kebutuhan Pangan Prioritas Asal Pertanian Hortikultura dalam Negeri IKK Rata-rata Luas Panen Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat Prioritas: RO Kawasan Bawang Merah, RO Kawasan Aneka Cabai, RO Kawasan Bawang Putih, RO Kawasan Tanaman Obat, RO Kawasan Sayuran Ubi, RO Kawasan Sayuran Buah, RO Pekarangan Hortikultura IKK Rata-rata Luas Panen Komoditas Buah Prioritas: RO Kawasan Durian, RO Kawasan Mangga, RO Kawasan Kelengkeng, RO Kawasan Alpukat, RO Kawasan Manggis, RO Kawasan Buah Terna, RO Kawasan Buah Merambat, RO Kawasan Buah Perdu
KP 02.10.17 Produksi Vanili; KP 02.10.17 Produksi Lada; KP 02.10.17 Produksi Pala; KP 02.10.17 Produksi Cengkeh;	IKP Presentase Produksi Perkebunan terhadap Kebutuhan Pangan Prioritas Asal Perkebunan dalam Negeri IKK Rata-rata Produktivitas Tanaman Semusim dan Tahunan Prioritas RO Kawasan (vanili, lada, pala, cengkeh, kopi, Tebu, karet, kakao, teh, jambu mete)

KP 02.10.17 Produksi Kopi; KP 02.10.17 Produksi Tebu; KP 02.10.17 Produksi Karet; KP 02.10.17 Produksi Kakao, KP 02.10.17 Produksi teh	
KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan	Kontribusi tidak langsung: IKP 6.1 Volume ekspor komoditas Perkebunan
KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura	Kontribusi tidak langsung: IKP 7.1 Volume ekspor komoditas Hortikultura
KP 18: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	
KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan
	SP 3, IKP 6.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura
	SP 3, IKP 11.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan
	SP 3, IKP 7.2 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas Peternakan
KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	IKK 5.1 Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan
KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	IKK 5.2. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	RO Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Perkebunan
	IO Sertifikat produk Tanaman Pangan
	RO Sertifikat produk Hortikultura
	RO Sertifikasi produk peternakan organik
KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IO..... Varietas/galur tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas RO Sertifikat Tanda Daftar Varietas Hortikultura

KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	- -
PP 15: Ekosistem Ekonomi Sirkular	
KP 02: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
KP 02.15.02 Persentase penurunan susut pangan	IKP 2.1 Indeks penurunan susut pertanian pasca panen IKK 1.1 Persentase Penurunan Susut Pangan Pasca Panen terhadap Total Produksi Tanaman Pangan
PN 05: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PP 01: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	
KP 05: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	
KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	IKP Presentase Produksi Perkebunan terhadap Kebutuhan Pangan Prioritas Asal Perkebunan dalam Negeri IKK 1.1 Rata-rata Produktivitas Komoditas Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma menuju Swasembada IKP 8.1 Persentase produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi terhadap total produksi
KP 06: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
KP 05.01.06 Produktivitas kelapa	IKP 2.1 Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri (salah satunya Kelapa)
KP 05.01.06 Produksi kelapa	IKK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas menuju swasembada (salah satunya Kelapa)
KP 08: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	
KP 05.01.08 Produksi Sagu	IKP 2.1 Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri (salah satunya Sagu)
KP 05.01.08 Produktivitas Sagu	IKK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas menuju swasembada (salah satunya Sagu)

KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu	IKP 2.1 Persentase produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri (salah satunya Ubi Kayu) IKK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman aneka kacang dan umbi prioritas menuju swasembada (salah satunya Ubi Kayu)
KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu	RO Kawasan Ubi Kayu
PN 04: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	
KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana	
KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	SK 2 Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan IKK 2.2 Persentase kab/kota yang mampu menekan kasus rabies pada hewan
PN 08: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	
PP 03: Pembangunan Berketahanan Iklim	
KP 03: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim	
KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	Indikator ini tetap tidak diturunkan menjadi IKSS, karena: -Potensi kerugian ekonomi melibatkan berbagai sektor pembangunan, tidak hanya pertanian à Idealnya menjadi indikator Kemenko Pangan -Indikator ini jauh berada diluar Tusi dan Kewenangan Kementerian Pertanian sesuai Perpres 192/2024 Namun Kementerian Pertanian tetap berkontribusi secara tidak langsung melalui: -SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI -SK.1, IKK. 1.1 Persentase informasi hasil peramalan yang dimanfaatkan OPT -SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah hortikultura yang terkendali terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terserang OPT -SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah hortikultura yang yang mendapat penanganan

	DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI -SK.1, IKK 1.1 Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI -SK.1, IKK 1.1 Persentase area/wilayah perkebunan (di wilayah kerja masing-masing UPT) yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI -SK.2, IKK 2.1 Indeks Kesiapsiagaan terhadap wabah penyakit hewan

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	SS.1, IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian
PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani	SS1, IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)
KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPK Kalimantan Tengah (ton)	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi beras KSPK Kalimantan Tengah (ton)
KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPK Kalimantan Tengah (ton)	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPK Kalimantan Tengah (Ha)
KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPK Sumatera Utara (ton)	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPK Sumatera Utara (ton)
KP 02.10.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPK Sumatera Utara (ton)	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPK Sumatera Utara (Ha)
KP 02.10.3 Peningkatan Produksi beras KSPK Sumatera Selatan	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi beras KSPK Sumatera Selatan (Ton)

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
KP 02.10.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha)
KP 02.10.4 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton)
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha)
KP 02.10.4 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton)
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha)
KP 02.10.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua (Ton)
KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua (Ha)
KP 02.10.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	IKSP 5.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan (Ton)
KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	IKSK 4.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha)
KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak	IKK Lahan baku sawah yang dicetak
KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	IKK Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman
KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah	Kontribusi tidak langsung:

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
KP 02.10.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara	• IKK 2.1 Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan nasional • IKK 2.1 Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan nasional • IKSK 2.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan nasional • IKSK 2.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan nasional
KP 02.10.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	
KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	
KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	
KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	IO.1 Jumlah kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang mendapatkan pembinaan
KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani	IKSK 2.2 % petani muda terhadap total petani
KP 02.10.10 Produksi: Daging (Sapi dan kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik) Telur Susu	IKSP 2.1 % produksi peternakan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal peternakan dalam negeri: - Daging Sapi dan Kerbau - Daging Ayam Ras - Daging Kambing/Domba - Telur Ayam Ras - Susu Sapi
KP 02.10.11 Produksi: Padi Jagung Aneka Kacang Sorghum	IKSP 2.1 % produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri: - Padi - Jagung

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Ubi jalar Kedelai	- Kedelai - Ubi Kayu - Ubi jalar - Kacang tanah - Kacang hijau - Sorghum
KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	IKK Persentase komoditas sereal yang wajib terfortifikasi
KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	IKSK 3.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan
KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	IKP 6.1 Persentase jumlah wilayah dan kawasan yang berstatus bebas dan terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah dan kawasan keseluruhan
KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	IO.1 Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan pembinaan → BDB.001 Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian
KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani	IKSK 2.2 % petani muda terhadap total petani* (data dari: Simlutan)
KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur KP 02.10.17 Produksi: - Buah dan sayur - Tanaman obat - Florikultura	- IKSP 2.2... Produksi buah dan sayur - IKSP 2.2... Produksi tanaman obat - IKSP 2.2... Produksi florikultura

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
KP 02.10.17 Produksi: Vanili Lada Pala Cengkeh Kopi Tebu Karet Kakao Teh	- Tebu - Cengkeh - Pinang - Kopi - Teh - Kayu manis - Kelapa - Vanili - Sagu - Kelapa sawit - Lada - Karet - Pala - Tembakau - Kakao - Kapas - Aren - Sereh Wangi - Jambu mete - Nilam
KP 05.01.05 Produksi: - Kelapa sawit - Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	IKSP 8.1 Persentase produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi terhadap total produksi
KP 05.01.06 Produktivitas kelapa	IKSK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas menuju swasembada (salah satunya Kelapa)
KP 05.01.06 Produksi kelapa	IKSP 2.1 % produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri (salah satunya Kelapa)
KP 05.01.08 Produksi Sagu	IKSP 2.1 % produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri (salah satunya Sagu)
KP 05.01.08 Produktivitas Sagu	IKSK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas menuju swasembada (salah satunya Sagu)
KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu	IKSP 2.1 % produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri (salah satunya Ubi Kayu)

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu	IKSK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman aneka kacang dan umbi prioritas menuju swasembada (salah satunya Ubi Kayu)
KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan	Kontribusi tidak langsung: IKSP 6.1 Rata-rata volume ekspor komoditas Perkebunan
KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura	IKSP 6.1 Rata-rata volume ekspor komoditas Hortikultura
KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan
	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura
	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan
	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas Peternakan
KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	IKK Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan
KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	IKK Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	IO.4 Luas area pengendalian OPT dan DPI pada tanaman perkebunan
	IO Sertifikat produk TP organik
	IO Sertifikat produk Hortikultura organik
	IO Sertifikat produk Peternakan organik

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	SK.3 Tersedianya adopsi teknologi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian TP, Horti, Bun, PKH IKK 3.1 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian TP, Horti, Bun, PKH IO..... Varietas/galur tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	- IKSK 1.1 Persentase ketersediaan SDG hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya - IKSK 3.1 Persentase ketersediaan SDG tanaman pertanian tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya
KP 02.15.02 Persentase penurunan susut pangan	IKSP 2.1 Indeks susut pertanian pasca panen
KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	SK 2 Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan IKK 2.2 Persentase kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan
KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	Indikator ini tetap tidak diturunkan menjadi IKSS, karena: - Potensi kerugian ekonomi melibatkan berbagai sektor pembangunan, tidak hanya pertanian → Idealnya menjadi indikator Kemenko Pangan

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
	- Indikator ini jauh berada diluar Tusi dan Kewenangan Kementerian Pertanian sesuai Perpres 192/2024 Namun Kementerian Pertanian tetap berkontribusi secara tidak langsung melalui: - SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI - SK.1, IKK. 1.1 Persentase informasi hasil peramalan yang dimanfaatkan OPT - SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah hortikulura yang terkendali terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terserang OPT - SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah hortikulura yang yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI - SK.1, IKK 1.1 Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI - SK.1, IKK 1.1 Persentase area/wilayah perkebunan di (wilayah kerja masing-masing UPT) yang terkendali terhadap luas

INDIKATOR PP / KP	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
	area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI - SK.1, IKK 1.1 Persentase wilayah yang terkendali dari PHMS (PMK, LSD, Brucellosis, Jembrana)

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Dalam periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 menjadi dokumen pengarah yang konkret dalam mendukung pencapaian target swasembada, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas utama melalui pendekatan sistematis yang mencakup intervensi hulu dan hilir. Kementerian Pertanian akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui cetak sawah/perluasan areal tanam, peningkatan IP/optimasi lahan, penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan modernisasi alat mesin pertanian. Proyek strategis nasional seperti pencetakan sawah dan revitalisasi bendungan akan menjadi bagian integral

dari upaya ini, yang juga sekaligus mendukung target nasional dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan pokok.

Dalam mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana dicanangkan pemerintah, peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi sasaran penting. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan pendapatan petani dan kontribusi ekspor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam arti luas. Produk-produk strategis seperti kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, dan ubi kayu akan didorong untuk memasuki rantai pasok industri melalui penguatan kapasitas pascapanen, fasilitasi investasi, serta integrasi dengan pelaku usaha dan UMKM. Hal ini sejalan dengan target RPJMN dalam pengembangan agroindustri berbasis wilayah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani dan pangan bergizi, strategi peningkatan produksi susu dan daging menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong didorong melalui program pembibitan dan investasi peternakan yang ramah iklim dengan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi pada subsektor peternakan. Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian juga menjalankan strategi ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, mendukung pengurangan angka stunting dan peningkatan ketahanan pangan keluarga sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN.

Selain itu, guna mendukung transisi energi nasional dan mengurangi tekanan pada ekspor bahan mentah, program mandiri energi berbasis biodiesel akan diakselerasi dengan target peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Upaya ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah

di dalam negeri dan menstabilkan harga komoditas sawit secara global, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia.

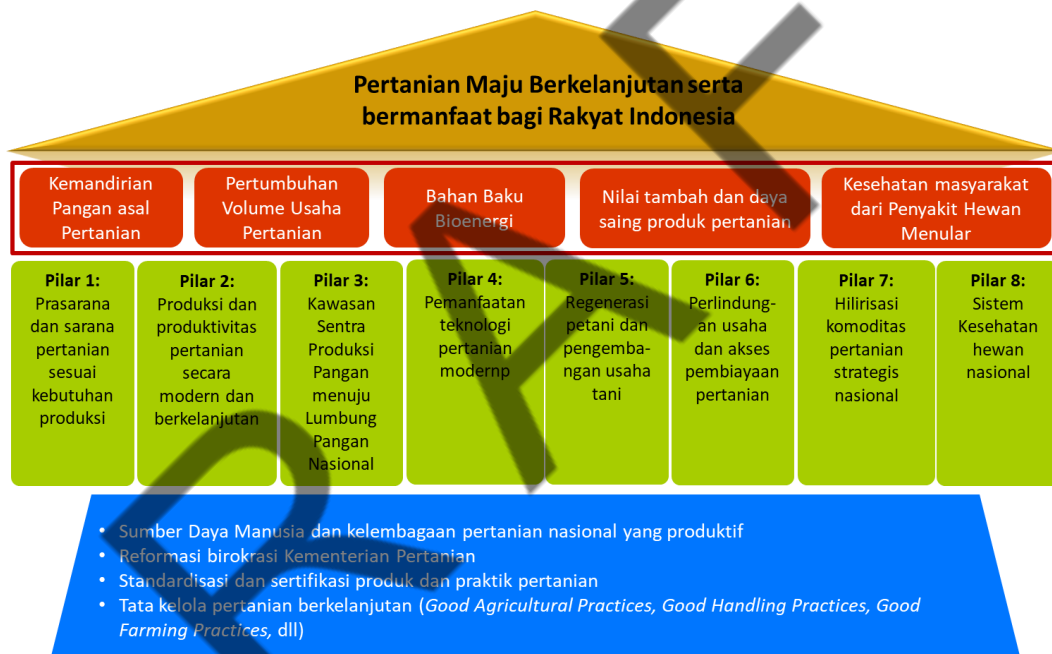
Dengan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 3. 8 Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 9 Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1. Kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian berarti 2 (dua) hal yaitu mengurangi ketergantungan impor dan kemampuan menyediakan kebutuhan pangan mandiri. Melepaskan ketergantungan impor dalam berbagai sektor merupakan isu strategis yang dibahas dan diupayakan, termasuk sektor pertanian. Kondisi geopolitik global yang memanas menyebabkan terganggunya rantai pasok dan perdagangan global serta berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga pangan. Tantangan yang perlu dijawab untuk menurunkan risiko tersebut adalah bagaimana Indonesia secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional agar kemandirian dapat terwujud.

2. Pertumbuhan volume usaha pertanian

Kesejahteraan petani bergantung pada 2 (dua) hal yaitu pendapatan dan pengeluaran petani. Pertumbuhan volume usaha petani berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan Petani dimana volume usaha pertanian yang meningkat berkorelasi positif dengan pendapatan petani.

3. Bahan baku bio energi

Isu terkait bahan baku bio energi adalah bagaimana sektor pertanian dapat berkontribusi dalam ketahanan energi melalui penyediaan sumber energi alternatif. Beberapa komoditas pertanian seperti komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura berkontribusi terhadap penyediaan bahan baku tersebut. Tersedianya bahan baku bio energi asal pertanian diharapkan dapat berkontribusi untuk membantu transisi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan di tingkat nasional.

4. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk

pertanian. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pengolahan yang tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (*close to market*), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari petani menuju ke pengguna akhir (*end customer*) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat.

Peningkatan daya saing produk pertanian menitikberatkan pada persaingan terhadap produk pertanian sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk pertanian nasional dibanding produk pertanian negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang diprasyarkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.

5. Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Agar dapat mewujudkannya, maka harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca-wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut.

1. Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi

Pilar 1 (satu) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Prasarana dan sarana pertanian meliputi lahan pertanian, air untuk pertanian, pupuk dan pestisida untuk pertanian, serta alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan pra panen dan pasca panen. Peran Kementerian Pertanian dalam menyediakan, mendistribusikan serta menjamin kualitas prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi. Orientasi berbasis kebutuhan produksi berarti setiap proses penyediaan harus tepat dan akurat sesuai kebutuhan komoditas pertanian strategis nasional. Pendistribusian berarti ketepatan waktu dan ketepatan penyaluran prasarana dan sarana pertanian berdasarkan jenis komoditas dan sebaran wilayah tanam maupun panen nasional. Penjaminan kualitas yaitu memastikan bahwa prasarana dan sarana pertanian telah

memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan

Pilar 2 (dua) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Modern dalam produksi dan produktivitas adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pertanian dalam menggunakan sumber daya sebagai input (baik hayati dan non hayati) yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam metode pertanian saat ini, sering disebut dengan pertanian presisi, yaitu metode pertanian yang menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut mustahil terwujud tanpa pemanfaatan teknologi pertanian termutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan yang terjadi adalah bagaimana Kementerian Pertanian dapat mengidentifikasi teknologi yang tepat sesuai karakteristik petani nasional, meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya teknologi pertanian tersebut, dan memastikan petani dapat beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi tersebut.

3. Pilar 3: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional

Pilar 3 (tiga) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Untuk mewujudkan kemandirian pangan maka kebutuhan masyarakat wajib terpenuhi melalui produksi dalam negeri. Orientasi produksi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun jugaantisipasi kebutuhan pangan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program KSPP yaitu sentra produksi terintegrasi pangan untuk mendorong terciptanya lumbung pangan nasional. Ketersediaan

lumbung pangan nasional diharapkan dapat menghindari masyarakat dari kerawanan pangan yang disebabkan baik faktor dalam negeri maupun faktor global.

4. Pilar 4: Pemanfaatan teknologi pertanian modern

Pilar 4 (empat) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Perkembangan penyelenggaraan pertanian global yang telah memasuki era *agriculture* 4.0 didorong oleh perkembangan teknologi. Peran kecerdasan buatan, berbagai sensor yang dapat membantu pengambilan keputusan. Teknologi pertanian tersebut perlu didorong pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pertanian berkelanjutan nasional. Kementerian Pertanian tidak hanya mengambil peran dalam penyediaan teknologi pertanian dalam bentuk prasarana dan sarana pertanian, namun juga mendorong penggunaan teknologi tersebut oleh para petani.

Pemanfaatan teknologi pertanian modern tentunya akan berdampak terhadap budi daya pertanian dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri.

5. Pilar 5: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani

Pilar 5 (lima) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Faktor berikutnya yaitu kualitas usaha tani

yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian memainkan peran strategis untuk meningkatkan keduanya dengan memberikan informasi, edukasi dan mendorong meningkatnya peningkatan serta adopsi teknologi dan metode pertanian mutakhir.

6. Pilar 6: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Pilar 6 (enam) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Perlindungan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan usaha tani. Perlindungan dilakukan dengan memberikan asuransi tani yang dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan OPT. Akses pembiayaan sendiri merupakan stimulus yang diberikan kepada petani untuk pengembangan usaha pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menyediakan akses perlindungan dan pembiayaan serta mendorong pemanfaatan keduanya oleh petani atau usaha tani.

7. Pilar 7: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional

Pilar 7 (tujuh) berkontribusi terhadap nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hilirisasi komoditas meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian strategis melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk tidak lagi menjual bahan baku maupun produk setengah jadi, namun menjual produk yang siap konsumsi. Dengan menghasilkan produk yang siap konsumsi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani maupun usaha tani

8. Pilar 8: Sistem kesehatan hewan nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner

dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner.

Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 4 (empat) fondasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang produktif

Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku pertanian berkelanjutan merupakan aset berharga yang perlu dimiliki. Kelembagaan pertanian dapat berkembang jika SDM pertanian tersedia dan kompeten. Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM Pertanian serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan pertanian.

2. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian

Implementasi RB Kementerian Pertanian adalah untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas yang dapat mendorong tercapainya pembangunan sektor pertanian. Implementasi RB nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB

Tematik. Kementerian Pertanian tidak hanya berkontribusi melaksanakan RB General namun juga RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret dari pembangunan sektor pertanian.

3. Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian

Standardisasi produk dan praktik pertanian merupakan penyeragaman spesifikasi berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan melalui regulasi. Standar baku tersebut memuat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi produk pertanian serta panduan untuk melaksanakan setiap tahapan dalam praktik pertanian nasional. Penyeragaman dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas produk pertanian maupun menjaga konsistensi implementasi praktik pertanian. Sertifikasi merepresentasikan jaminan tertulis terkait produk maupun praktik pertanian yang menyatakan keduanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menjamin ketersediaan standar produk dan standar praktik pertanian berkelanjutan serta melakukan sertifikasi terhadap produk dan praktik pertanian berkelanjutan.

4. Tata kelola pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll*)

Tata kelola pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pertanian modern yang berupaya menjamin akses generasi mendatang terhadap komoditas pertanian serta peningkatan kualitas, mutu dan keamanan komoditas pertanian. Dengan persaingan global yang semakin ketat, ketiganya merupakan trilogi yang harus dimiliki secara bersamaan untuk menciptakan daya saing produk pertanian. Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menciptakan instrumen, memberikan

edukasi kepada petani maupun kelompok tani mengenai sistem pertanian berkelanjutan, hingga mendorong implementasi pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi **“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”** di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 1:** Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
- **Strategi 2:** Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (human capital) pertanian berbasis kompetensi.
- **Strategi 3:** Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
- **Strategi 4:** Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif

2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 5:** Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan

- **Strategi 6:** Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
 - **Strategi 7:** Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
 - **Strategi 8:** Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
 - **Strategi 9:** Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
- 3. Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 10** “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”
- 4. Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 11** “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
- 5. Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 12** “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
- 6. Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*.”

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan alat strategis untuk mengarahkan dan mengatur pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bernegara dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Penyusunannya dilakukan secara strategis dan terukur dengan mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada. Fungsi penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- b. Memberikan gambaran umum tentang regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- c. Menjelaskan peran Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
- d. Menjadi dasar penyusunan matriks kerangka regulasi yang memuat arah dan kebutuhan regulasi secara terperinci.

Adapun tujuan dari penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
- b. Memenuhi kebutuhan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri/Lembaga
- c. Mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN
- d. Menyelesaikan permasalahan penting, mendesak, dan berdampak besar pada pencapaian pembangunan nasional

Penyusunan kerangka regulasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Sejalan dengan Kebijakan Nasional:** selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
- b. **Berlandaskan Konstitusi:** berbasis pada UUD Tahun 1945, RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.
- c. **Memfasilitasi dan Mengatur Masyarakat dan Penyelenggara Negara:** mendukung peran masyarakat dan penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.
- d. **Berdasarkan Analisis dan Evaluasi Regulasi:** mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada, dengan:
 1. Tidak perlu regulasi baru jika regulasi lama sudah efektif.
 2. Membentuk/mengubah regulasi jika regulasi lama belum efektif/optimal.
- e. **Analisis Biaya dan Manfaat:** melibatkan analisis dampak, biaya, dan manfaat regulasi (CBA) bagi semua pemangku kepentingan.
 - I. Regulasi dibuat jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, atau
 - II. Jika regulasi tersebut adalah satu-satunya solusi untuk mencapai tujuan.
- f. **Asas Pembentukan dan Materi Peraturan Perundang-undangan:** memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. **Format Narasi dan Matriks:** disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Sub-urusan Penyuluhan).
3. Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).
5. Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.
6. Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
7. RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.
9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/ /2012 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Penjelasan lebih rinci terkait kerangka regulasi dituangkan dalam matriks kerangka regulasi yang disajikan dalam Lampiran 2.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan landasan fundamental bagi organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Dengan merancang dan menerapkan kerangka kelembagaan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk didalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, sasaran strategis, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Terdapat beberapa elemen kunci dari kerangka kelembagaan, seperti:

- a. **Fungsi dan Struktur Organisasi:** menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar unit organisasi untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan.
- b. **Tata Laksana Antar Unit Organisasi:** merumuskan proses dan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit.
- c. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Menentukan kebutuhan SDM, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Adapun penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:

- a. **Sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan visi Presiden:** mempertimbangkan visi dan agenda pembangunan jangka panjang RPJPN, prioritas pembangunan RPJMN, dan visi - misi Presiden.
- b. **Berlandaskan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan:** memperhatikan kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. **Berbasis Prinsip Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Transparan:** membangun organisasi yang mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja dengan mempertimbangkan:
 - I. Pencapaian visi dan misi Kementerian/Lembaga.
 - II. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya.
 - III. Ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.
- d. **Melalui Proses Evaluasi:** melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.

Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029 dilakukan melalui proses evaluasi terhadap SOTK Kementerian Pertanian saat ini. Proses evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung capaian visi-misi Kementerian untuk periode berikutnya. Permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian disusun desain kriteria organisasi yang dibutuhkan untuk pencapaian visi-misi Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029. Berikut adalah kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029:

Tabel 3. 4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029

No	Permasalahan SOTK	Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan
1	Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan
2	Belum ada unit kerja khusus yang menangani pemuliaan benih tanaman (benih berkelanjutan)	
3	Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Direktorat PPH Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat PPH Ditjen Hortikultura, dan Direktorat PPH Ditjen Perkebunan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi)
4	2 Direktorat pada Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan didesain berdasarkan kelompok komoditas pertanian, sehingga berpotensi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika komoditas yang menjadi kewenangan Direktorat tersebut tidak menjadi prioritas Kementerian Pertanian di tahun berjalan	Unit kerja setingkat eselon II di keempat Ditjen Komoditas sebaiknya didesain berdasarkan proses: (1) Perbenihan/ pembibitan (2) Penanaman, (3) penerapan praktik budidaya pertanian modern dan berkelanjutan, (4) perlindungan tanaman dan hewan, (5) panen komoditas pertanian
5	Tugas dan Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas dan fungsi di BPPSDMP, sedangkan kewenangan penyuluhan di daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah	Dibutuhkan unit kerja yang setingkat UKE 1 yang menangani penyuluhan dan pembinaan penyuluh nasional (<i>corporate university</i>)
6	Belum ada unit kerja yang khusus yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara umum	Butuh unit kerja setingkat eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi
7	Adanya tumpang tindih dalam pengembangan SDM pertanian	Biro OK akan menangani pengembangan SDM ASN Pertanian (internal dan eksternal Kementerian Pertanian) BPPSDMP akan

No	Permasalahan SOTK	Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan
		menangani pengembangan SDM pertanian eksternal
8	Ada UPT di satu UKE 1 yang memiliki tisi lintas UKE 1 (BP MPT, BB PPMB TPH, BB POPT)	Revitalisasi UPT berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki
9	Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern
10	Belum ada unit kerja yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: <i>green house</i>	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: <i>green house</i>
11	Penyediaan pupuk dan pestisida dilakukan juga oleh unit teknis	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida secara terpusat
13	Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak → belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I yang menangani budi daya peternakan

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Pertanian menyusun 7 (tujuh) sasaran program teknis yaitu: Meningkatnya pendapatan petani, terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, meningkatnya cadangan pangan nasional, meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan, dan 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil *intermediate outcome* level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari telah tercapainya suatu sasaran strategis (SS). Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran program (IKSP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome* level 2 dari suatu program. IKSP kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel 4.1 memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran

Strategis serta Target tahun 2025 – 2029 terkait 7 (tujuh) sasaran program teknis maupun 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen.

Tabel 4. 1 Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS 1. Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27
	IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian (%)	3,5	3,8	4	3,6	3,3
SS 2. Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan	IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (%)	66,00	68,00	68,00	70,00	72,00
SS 3. Meningkatnya Cadangan Pangan Nasional	IKSS 3.1 Persentase Peningkatan Cadangan Pangan (%)	25	40	58	75	100
SS 4. Meningkatnya Pangsa Pasar (<i>Market Share</i>) Produk Ekspor Pertanian	IKSS 4.1 Market Share Produk Ekspor Pertanian (%)	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
SS 5. Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan	IKSS 5.1 Indeks Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan	0,23	0,41	0,66	0,84	1,00
SS 6. Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian	IKSS 6.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bio energi (%)	13,04	16,79	17,29	17,81	18,35
SS 7. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Penularan Penyakit Akibat Hewan dan Produk Hewan	IKSS 7.1 Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner	60,5	60,9	61,3	61,7	62,1
SS 8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 8.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	87,14	88,37	89,77	90,03	91,08

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Kementerian Pertanian saat ini dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan

kegiatan Kementerian Pertanian dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam Kementerian Pertanian. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan pada lampiran 1.

BAB 5 PENUTUP

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 yang mengandung Visi dan Misi Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kementerian Pertanian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang pertanian. Renstra Kementerian Pertanian menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKSP, dan IKSK, untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kementerian Pertanian ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang pertanian yang hendak dicapai pada Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; dan (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral. Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak yang terkait. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pembangunan pertanian dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Pertanian										55.055.717,0 7	64.405.241,90	63.522.724,2 6	61.855.880,6 5	62.402.231,3 1	
SS 1	Meningkatnya pendapatan petani														Menteri Pertanian
IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)				123, 64	125, 02	126, 42	127, 84	129, 27						
IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian		%		3,5	3,8	4	3,6	3,3						
SS 2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan														
IKSS 2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas		%		66	68	68	70	72						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SS 3	Meningkatnya cadangan pangan nasional														
IKSS 3.1	Persentase Peningkatan cadangan pangan		%		25	40	58	75	100						
SS 4	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian														
IKSS 4.1	Market share produk ekspor pertanian		%		2,65	2,7	2,75	2,8	2,85						
SS 5	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan														
IKSS 5.1	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan				0,23	0,41	0,66	0,84	1						
SS 6	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian														
IKSS 6.1	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi		%		13,04	16,79	17,29	17,81	18,35						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
SS 7	Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan														
IKSS 7.1	Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner				60,5	60,9	61,3	61,7	62,1						
SS 8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi														
IKSS 8.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian				87,1 4	88,3 7	89,7 7	90,0 3	91,0 8						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										3.751.635,4 4	9.412.065,7 7	9.587.507,2 6	9.767.287,1 9	9.948.172,1 9	
SP.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi General									1.419.540,7 5	1.446.259,6 6	1.456.743,3 7	1.467.283,0 0	1.477.443,7 3	Sekretariat Jenderal

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kementerian Pertanian														
IKP 1.1	Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Pertanian				80,28	81,21	82,31	82,67	83,02						
SP.2	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian									128.236,81	129.070,36	133.562,17	138.163,29	140.489,29	Inspektorat Jenderal
IKP 2.1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian		Nilai	2,85	3	3,05	3,1	3,15	3,2	128.236,00	129.071,00	133.563,00	138.164,00	140.489,00	
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel									2.203.857,88	7.836.735,76	7.997.201,72	8.161.840,90	8.330.239,17	Eselon I Teknis
IKP 3.1	Indeks tata kelola pemerintahan Ditjen. Tanaman Pangan		Nilai	0,96	0,86	0,867	0,872	0,877	0,884						
IKP 3.2	Indeks tata kelola pemerintahan		Nilai		0,86	0,87	0,87	0,88	0,88						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Ditjen. Hortikultura														
IKP 3.3	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan		Nilai		0,83	0,83	0,84	0,84	0,85						
IKP 3.4	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH		Indeks (0 100)	88,495	88,501	88,756	89,161	89,566	89,961						
IKP 3.5	Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal PSP		Indeks (0 100)		87	87,3	87,5	87,8	88						
IKP 3.6	Indeks tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal LIP		Indeks		0,83	0,83	0,84	0,84	0,85						
IKP 3.7	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Indeks		80	80,05	80,1	80,15	80,2						
IKP 3.8	Indeks tata kelola birokrasi Badan PPSDMP		%		77,98	78	78,02	78,04	78,06						
1746 Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian										7.398,03	8.109,87	8.353,17	8.603,76	8.861,88	
SK 1	Meningkatnya kualitas legislasi,	Pusat													Biro Hukum

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sa saran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	kebijakan dan advokasi hukum yang optimal														
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum			99,4	80	81,5	83	84,5	86						
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan			66,08	68	68	70	70	72						
IKK 1.3	Indeks Kualitas Advokasi Hukum				85	85,5	86	86,5	87						
SK 2	Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan hukum	Pusat													Biro Hukum
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan hukum		Skala Likert	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	957 Layanan Hukum		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	BCB Perkara Hukum Lembaga														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	957 Penanganan Perkara Litigasi		Perkara		4	4	4	4	4						
1747 Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian										9.637,59	9.637,59	9.637,59	9.637,59	9.637,59	
SK 1	Terwujudnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian yang Prima	Pusat													Biro Kerja Sama Luar Negeri
IKK 1.1	Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri bidang pertanian		%	85	86	86	90	90	90						
IKK 1.2	Persentase Pelaksanaan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Biro Kerja Sama Luar Negeri		%		100	100	100	100	100						
KRO	AEC Kerja sama														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	102 Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian		Kesepak atan		12	12	12	12	12						
1749 Pengelolaan Organisasi dan SDM										13.110,00	13.282,00	13.349,00	13.416,57	13.486,00	
SK 1	Terwujudnya Struktur Organisasi yang agile dan tepat ukuran serta terwujudnya sistem kerja baru di Lingkungan Kementerian Pertanian	Pusat													OSDMA
IKK 1.1	Persentase penyederhanaa n struktur organisasi		%		100	100	100	100	100						
IKK 1.2	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaa n birokrasi		Nilai		5	5	5	5	5						
SK 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pertanian dan	Pusat													OSDMA

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	penerapan sistem nilai BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pertanian														
IKK 2.1	Indeks BerAKHLAK Kementerian Pertanian		%	68,91	80	80,5	81	81,5	82						
IKK 2.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pertanian		Nilai	4,69	4,7	4,72	4,73	4,74	4,75						
IKK 2.3	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Nilai	90,5	91	91,5	92	92,5	93						2.486
SK 3	Meningkatnya implementasi sistem merit di lingkungan Kementerian Pertanian	Pusat													OSDMA
IKK 3.1	Indeks sistem merit		Nilai	273,5	287	292	297	302	308						
KRO	EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
RO	954 Layanan Manajemen SDM		Orang		101 45	101 45	101 45	101 45	101 45						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
RO	954 Layanan Manajemen SDM		Orang		67	97	103	108	114						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	961 Layanan Reformasi Kinerja		Dokume n		6	6	6	6	6						
1753 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian										29.664,13	33.371,20	35.394,61	37.150,06	38.310,26	
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Pusat													PPVTPP
IKK 1.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap		Skala Likert (1- 4)	3,5	3,55	3,58	3,61	3,64	3,67						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian														
IKK 1.2	Tingkat Kepuasan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,5	3,55	3,58	3,61	3,64	3,67						
KRO	ADC Sertifikasi Produk														
RO	002 Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian		produk		300	300	300	350	350						
KRO	ADC Sertifikasi Produk														
RO	001 Sertifikat Hak Pelindungan Varietas		produk		100	100	100	100	120						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tanaman Pertanian														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		kegiatan		4	4	4	4	4						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		kegiatan		4	4	4	4	4						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	951 Layanan Sarana Internal		Unit		28	30	30	30	30						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	971 Layanan Prasarana Internal		Unit		1	1	1	1	1						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	994 Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	FAB Sistem Informasi Pemerintahan														
RO	001 Sistem Informasi Pertanian		Sistem Informasi		12	5	5	5	5						
4576 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum							5	5	5	1.241.703,0 0	1.251.893,0 0	1.254.995,0 0	1.258.278,9 0	1.261.629,0 0	
SK 1	Terwujudnya Tata kelola Perencanaan yang baik	Pusat													Biro Perencanaan
IKK 1.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan		%	79,02	79,2 2	79,4 2	79,6 2	79,8 2	80,0 2						
IKK 1.2	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Biro Perencanaan		Skala Likert	3,28	3,3	3,33	3,36	3,38	3,41						
SK 2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Kementerian Pertanian yang	Pusat													Biro Keuangan dan BMN

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	efektif, efisien, dan akuntabel														
IKK 2.1	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian		Opini	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)						
IKK 2.2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai	89,82	89,84	89,86	89,88	89,9	89,92						
IKK 2.3	Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Keuangan dan BMN		Skala Likert (1-4)	3,41	3,42	3,44	3,46	3,48	3,5						
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN Kementerian Pertanian	Pusat													Biro Keuangan dan BMN
IKK 3.1	Indeks Pengelolaan Aset		Indeks	3,38	3,4	3,42	3,45	3,47	3,5						
SK 4	Terwujudnya digitalisasi arsip Kementerian Pertanian	Pusat													Biro Umum dan Pengadaan
IKK 4.1	Tingkat digitalisasi Arsip		Nilai	96,97	97	97,25	97,5	97,75	98						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian	Pusat													Biro Umum dan Pengadaan
IKK 5.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan		Skor		69,5	70	71	72	73						
SK 6	Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Umum dan Pengadaan	Pusat													Biro Umum dan Pengadaan
IKK 6.1	Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Umum dan Pengadaan		Skala Likert	3,25	3,11	3,13	3,15	3,17	3,19						
SK 7	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Bogor													PSEKP
IKK 7.1	Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi		%	95	95	95	95	95	95						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan														
IKK 7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian		indeks		3	3,05	3,1	3,15	3,2						
KRO	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	001 Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian		Rekomendasi Kebijakan		20	16	18	19	20						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	994 Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	994 Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	962 Layanan Umum		Layanan		3	3	3	3	3						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	962 Layanan Umum		Layanan		3	2	2	2	2						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	956 Layanan BMN		Layanan		3	3	3	3	3						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	956 Layanan BMN		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen		27	27	27	27	27						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen		4	4	4	4	4						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		10	10	10	10	10						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		2	2	2	2	2						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	955 Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		55	55	55	55	55						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	955 Layanan Manajemen Keuangan		Dokume n		1	1	1	1	1						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	974 Layanan Penyelenggaraa n Kearsipan		Dokume n		3	3	3	3	3						
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	974 Layanan Penyelenggaraa n Kearsipan		Dokume n		1	1	1	1	1						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	951 Layanan Sarana Internal		Unit		138 2	138 2	138 2	138 2	138 2						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	951 Layanan Sarana Internal		Unit		155	155	155	155	155						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	971 Layanan Prasarana Internal		m2		290	290	290	290	290						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	971 Layanan Prasarana Internal		m2		170	170	170	170	170						
KRO	FAB Sistem Informasi Pemerintahan														
RO	001 Sistem Informasi Pertanian		Sistem Informasi		4	4	4	4	4						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	111 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		kegiatan		7	7	7	7	7						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	111 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		kegiatan		3	7	7	7	7						
KRO	AEF Sosialisasi dan Diseminasi														
RO	111 layanan sosialisasi		orang		840	840	840	840	13840						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	AEF Sosialisasi dan Diseminasi														
RO	111 layanan sosialisasi		orang		0	287 5	300 0	320 0	335 0						
4577 Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian										118.028,00	129.966,00	135.014,00	140.196,12	145.519,00	
SK 1	Terwujudnya SPBE Kementerian Pertanian dalam mendukung tranformasi pemerintahan digital	Pusat													Pusdatin
IKK 1.1	Indeks SPBE Kementerian Pertanian		indeks	4	4,26										
IKK 1.2	Indeks pemerintah digital		indeks			1,8	1,9	2	2,1						
IKK 1.3	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (%)		%		3	4	5	5	5						
IKK 1.4	Tingkat kematangan penyelenggaraa n statistik sektoral		indeks		3,28	3,36	3,43	3,51	3,59						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.5	Indeks kepuasan pengguna layanan pusat data dan sistem informasi pertanian		indeks	3,33	3,54	3,56	3,57	3,59	3,61						
SK 2	Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian	Pusat													Biro Humas dan Informasi Publik
IKK 2.1	Indeks citra positif Kementerian Pertanian		indeks	3,627	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67						
SK 3	Meningkatnya kepuasan Sakeholder terhadap Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Pusat													Biro Humas dan Informasi Publik
IKK 3.1	Indeks kepuasan Stakeholder terhadap layanan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi		Skala Likert	3,02	3,1	3,12	3,14	3,16	3,18						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	951 Layanan Sarana Internal		Unit		8	8	10	12	14						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	971 Layanan Prasarana Internal		m2		124	150	200	250	300						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	994 Layanan Perkantoran		Layanan		2	2	2	2	2						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	994 Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBA Layanan Dukungan														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Manajemen Internal														
RO	959 Layanan Protokoler		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	963 Layanan Data dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		kegiatan		1	1	1	1	1						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		kegiatan		2	2	2	2	2						
KRO	FAB Sistem Informasi Pemerintahan														
RO	001 Sistem Informasi Pertanian		Sistem Informasi		13	13	13	13	13						
4578 Pengawasan	Pelaksanaan pada Satker									83.764,00	81.930,61	84.388,52	86.920,18	89.527,79	

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
Lingkup Pertanian	Kementerian														
SK 1	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV														Inspektorat I/II/III/IV
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV		%	79,5	80	80,5	81	81,5	82						
SK 2	Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian														Inspektorat Investigasi
IKK 2.1	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian		%	85,19	1	1	1	2	2						
SK 3	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra														Inspektorat I/II/III/IV

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	Inspektorat I/II/III/IV														
IKK 3.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV		%	93,28	90	90,5	91	91,5	92						
SK 4	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu														Inspektorat Investigasi
IKK 4.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu		%	78,23	78	79	80	81	82						
1760 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal										44.472,81	47.139,75	49.173,65	51.243,11	50.961,51	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 1	Ditindaklanjuti a hasil temuan BPK														Sekretariat Inspektorat Jenderal
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal		%	100	85	86	87	88	89						Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK 2	Ditindaklanjuti a hasil temuan pengawas intern														Sekretariat Inspektorat Jenderal
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal		%	99,05	90	90,5	91	91,5	92						Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian														Sekretariat Inspektorat Jenderal

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal		Nilai	99,83	95,07	95,12	95,17	95,22	95,27						Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen/Setba/Setlitjen														Sekretariat Inspektorat Jenderal
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan										142.747,50	149.884,90	157.379,30	165.248,20	173.510,50	Setdirjen TP
SK 1	Ditindaklanjuti a hasil temuan pengawas intern														
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP		%	90	90	91	92	93	94						
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	54	44	11	11	11	2						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya layanan Pemantauan dan Evaluasi														
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP		%	85	85	86	87	88	89						
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	68	84	70	70	70	2						
	Terlaksananya layanan manajemen keuangan														
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian														
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TP		Nilai	89,5	85	85,5	86	86,5	87						
	EBD.952 Layanan Perencanaan		Dokumen	67	35	19	19	19	19						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Penganggaran														
	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian														
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen TP		Likert	3,6	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7						
	EBA.962 Layanan Umum		Layanan	2	3	3	3	3	3						
	Terlaksananya Layanan Umum														
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	manajemen SetDitjen/Setba/Setlitjen														
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen TP		Likert	3,28	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29						
	Perizinan Lembaga Bidang Tanaman Pangan		Badan Usaha	0	3	4	4	5	5						
KRO	Terlaksananya layanan perizinan lembaga bidang tanaman pangan														
RO	Pengelolaan Layanan Kerja Sama		Kesepakatan	0	2	4	5	6	7						
KRO	Terlaksananya layanan kerja sama														
RO	Layanan BMN		Layanan	4	1	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan BMN lingkup Ditjen TP														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan Hukum														
RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan Hubungan masyarakat dan informasi														
RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan Organisasi dan tatakelola internal														
RO	Layanan Data dan Informasi		Layanan	0	34	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan Data dan Informasi														
RO	Layanan Perkantoran		Layanan	3	3	3	3	3	3						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Terlaksananya layanan perkantoran lingkup Ditjen TP														
RO	Layanan Sarana Internal		Unit	329	64	3	3	3	3						
KRO	Terlaksananya layanan sarana internal														
RO	Layanan Prasarana Internal		Unit	14	15	3	3	3	3						
KRO	Terlaksananya layanan prasarana internal														
RO	Layanan Manajemen SDM		Orang	0	562	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan manajemen SDM lingkup Ditjen TP														
RO	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	0	1	1	1	1	1						
KRO	Terlaksananya layanan kearsipan														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029		
1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura										55.831,00	77.820,00	87.486,00	90.486,00	93.086,00	Setditjen Hortikultura	
SK.1	Ditindaklanjuty a hasil temuan pengawas intern dan eksternal														SetDitjen/ Setltjen dibawah Setjen	SetBadan/ Biro/Pusat koordinasi
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura		%		90	90,5	91	91,5	92,5						Setditjen Hortikultura	
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokume n		15	38	38	38	38							
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura		%		86,5	87	87,5	88	89						Setditjen Hortikultura	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Layanan BMN		Layanan		1	1	1	1	1						
SK.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian														SetDitjen/SetBadan/Setltjen/Biro/Pusat dibawah koordinasi Setjen
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura		Nilai		84,75	86	87	88	89						Setditjen Hortikultura
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen		20	20	20	20	20						
RO	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		20	20	20	20	20						
SK.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat														SetDitjen/ SetBadan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura														
IKK 3.1	indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura		skala likert		3,57	3,58	3,59	3,6	3,61						SetDitjen Hortikultura
KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	Layanan Rekomendasi Hortikultura		Rekomendasi Kebijakan		10	10	10	10	10						
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Layanan Hukum		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	Layanan Data dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura														SetDitjen/ SetBadan/ Setltjen
IKK 4.1	Indeks Kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen Hortikultura		skala likert		3,21	3,22	3,23	3,24	3,25						Setditjen Hortikultura
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Layanan Umum		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	Layanan Sarana dan														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Prasarana Internal														
RO	Layanan Sarana Internal		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	Layanan Prasarana Internal		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan		Kegiatan		15	15	20	20	20						
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan										209.243,00	211.298,00	213.394,00	215.532,00	217.713,00	Ditjen Perkebunan
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi		%		85	85	88	88	90						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	Ditjen. Perkebunan														
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan		%		90	90	90	90	90						
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokume n		204	204	204	204	204						
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Layanan BMN		Layanan		5	5	5	5	5						
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai		88	88,5	89	89,5	90						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(IKPA) Ditjen. Perkebunan														
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen		13	13	13	13	13						
RO	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		25	25	25	25	25						
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan		Skala Likert (1-4)		3	3	3	3	3						
IKK 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan		Skala Likert (1-4)		3	3	3	3	3						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya														
IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon		Skala Likert (1-4)		3	3	3	3	3						
IKK 3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan		Skala Likert (1-4)		3	3	3	3	3						
IKK 3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Pelindungan		Skala Likert (1-4)		3	3	3	3	3						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak														
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Layanan Hukum		Layanan		2	2	2	2	2						
RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	Layanan Data dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1						
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen Perkebunan														Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat		Skala Likert (1- 4)		3	3	3	3	3						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Ditjen. Perkebunan														
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	Layanan perkantoran		Layanan		5	5	5	5	5						
RO	Layanan Umum		Layanan		5	5	5	5	5						
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	Layanan Penyelenggaraa n Kearsipan		Dokumen		1	1	1	1	1						
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal														
RO	Layanan Manajemen SDM		Orang		1034	1034	1034	1034	1034						
KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Layanan Sarana Internal		Unit		1	1	1	1	1							
RO	Layanan Prasarana Internal		Unit		1	1	1	1	1							
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan										480.712,00	579.875,04	620.619,83	665.115,70	713.729,67		
SK 1	Ditindaklanjuti a hasil temuan pengawas internal dan eksternal														SetDitjen/ Setltjen dibawah Setjen	SetBadan/ Biro/Pusat koordinasi
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH		%	94,15	94,15	94,25	94,35	94,45	94,5							PKH
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal															
RO	EBD 953 Layanan Pemantauan dan evaluasi		Dokumen		72	72	72	72	72							
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan		%	85	85	85,5	86	86,5	87							pkh

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH														
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	EBD 953 Layanan Pemantauan dan evaluasi		Dokume n		72	72	72	72	72						
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian														SetDitjen/SetBadan/Setltjen/Biro/ Pusat dibawah koordinasi Setjen
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH		Nilai	90,67	90,7	90,7 5	90,8	90,8 5	90,9						Ditjen PKH
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan		Dokume n		133	133	133	133	133						
RO	EBD 952 Layanan Perencanaan		Dokume n		13	8	8	8	8						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Penganggaran														
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	EBA 956 Layanan BMN		Layanan		62	62	62	62	62	593,89	593,89	593,89	593,89	593,89	
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian														SetDitjen/ SetBadan
IKK 3.24	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH		Skala likert	3,626	3,62 6	3,63 1	3,63 6	3,64 1	3,64 6						SetDitjen PKH
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	EBA 957 Layanan Hukum		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	EBA 958 Layanan Hubungan		Layanan		1	1	1	1	1						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Masyarakat dan Informasi														
RO	EBA 963 Layanan Data dan Informasi		Layanan		39	39	39	39	39						
RO	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	EBA 969 Layanan Bantuan Hukum		Layanan		1	1	1	1	1						
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH														
IKK 4.1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH		Skala likert	3,28	3,28	3,3	3,35	3,4	3,45						
KRO	EBA Layanan Dukungan														

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	Manajemen Internal														
RO	EBA 962 Layanan Umum		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	EBA 994 Layanan Perkantoran		Layanan		24	24	24	24	24						
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	EBB 951 Layanan Sarana Internal		Unit		1	2	2	2	2						
KRO	EBC Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal														
RO	EBC 954 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia		Orang		284 0	294 0	304 0	313 3	323 6						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian										136.692,00	70.736,00	74.273,00	77.988,00	81.884,00	Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
SK 1	Ditindaklanjuti a hasil temuan pengawas internal dan eksternal														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		%	95,5	92	92	93	94	95						
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		%	91,6	86	87	88	89	90						
KRO	EBD Layanan manajemen kinerja internal														
RO	EBD.953 Layanan pemantauan dan evaluasi		Dokume n		6	6	6	6	6						
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kementerian Pertanian														
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Nilai	86,55	86	87	88	89	90						
KRO	EBA Layanan dukungan manajemen internal														
RO	EBA.994 Layanan perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1						
KRO	EBD Layanan manajemen kinerja internal														
RO	EBD.955 Layanan manajemen keuangan		Dokumen		30	30	30	30	30						
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal PSP di lingkungan Kementerian Pertanian														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Skala Likert (1- 4)		3	3,2	3,3	3,4	3,5						
KRO	FAB Sistem informasi pemerintahan														
RO	FAB.001 Sistem informasi prasarana dan sarana pertanian		Layanan		1	1	1	1	1						
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PSP														Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
IKK 4.1	Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Prasarana dan		Skala Likert (1- 4)	3,29	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sarana Pertanian														
KRO	EBA Layanan dukungan manajemen internal														
RO	EBA.957 Layanan hukum		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	EBA.958 Layanan hubungan masyarakat dan informasi		Layanan		6	6	6	6	6						
RO	EBA.960 Layanan organisasi dan tata kelola internal		Layanan		1	1	1	1	1						
RO	EBA.962 Layanan umum		Layanan		2	2	2	2	2						
RO	EBA.963 Layanan data dan informasi		Layanan		2	2	2	2	2						
KRO	EBB Layanan sarana dan prasarana internal														
RO	EBB.951 Layanan sarana internal		Layanan		7	7	7	7	7						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	EBD Layanan manajemen kinerja internal														
RO	EBD.952 Layanan perencanaan dan penganggaran		Dokumen		13	13	13	13	13						
7924 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LIP			Layanan		1					26.591,50	19.189,49	20.000,00	25.000,00	27.000,00	
SK 1	Ditindaklanjuti a hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal														SetDitjen/ SetBadan/ SetItjen Biro/Pusat dibawah koordinasi Setjen
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP		%		85	85,5	86	86,5	87						LIP
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP		%		85	85,5	86	86,5	87						

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen LIP														SetDitjen/ SetBadan/ Setltjen/Biro/ Pusat dibawah koordinasi Setjen
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen LIP		Nilai		85	85	85,5	85,5	86						SetDitjen/SetBadan/Setltjen/Biro/ Pusat dibawah koordinasi Setjen
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP														SetDitjen/ SetBadan
IKK 3.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP		Skala Likert		3	3,2	3,3	3,4	3,5						Sekretariat Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP														SetDitjen/ SetBadan/ Setltjen
IKK 4.1	Tingkat kepuasan unit eselon II		Skala Likert	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5						Sekretariat Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP															
6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian										878.412,88	922.333,33	968.450,59	1.016.872,00	1.067.717,00		
SK 1	Ditindaklanjuti a hasil temuan pengawas intern														SetDitjen/ SetItjen dibawah Setjen	SetBadan/ Biro/Pusat koordinasi
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		%		95	95,5	96	96,5	97						BRMP	
SK 2	Ditindaklanjuti a hasil temuan BPK														SetDitjen/ SetItjen/Biro/ dibawah Setjen	SetBadan/ Pusat koordinasi
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait		%		95	95,5	96	96,5	97						BRMP	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian														
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian														SetDitjen/SetBadan/Setltjen/Biro/Pusat dibawah koordinasi Setjen
IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Nilai		91	91,5	92	92,5	93						BRMP
SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian														SetDitjen/ SetBadan
IKK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan		Nilai		3,6	3,65	3,69	3,74	3,78						BRMP

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian														
SK 5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen/Setba/Setlitjen														SetDitjen/ Setlitjen SetBadan/
IKK 5.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP		Nilai		3,26	3,28	3,3	3,32	3,34						BRMP
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian										273.628,00	5.805.599,00	5.855.599,00	5.905.599,00	5.955.599,00	
SK 1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern	Pusat dan UPT													Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait		%		90	90,4	90,6	90,8	91						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP														
SK 2	Ditindaklanjuti a hasil temuan BPK														Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP		%		87	87,4	87,6	87,8	88						
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementan														Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP		%		90	90,25	90,5	90,75	91						
SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP di														Sekretariat Badan PPSDMP

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/Sas aran Kegiatan (Output)/Indika tor	LOK ASI	Satuan	Basel ine	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	2025	2026	2027	2028	2029	
	lingkungan Kementerian Pertanian														
IKK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan PPSDMP		Skala Likert		3,6	3,61	3,62	3,63	3,64						
SK 5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Badan PPSDMP														Sekretariat Badan PPSDMP
IKK 5.1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Badan PPSDMP		Skala Likert		3,25	3,3	3,35	3,4	3,45						
SK 6	Terlaksananya Renaksi RB oleh ES I														Bagian Umum
IKK 6.1	Persentase pelaksanaan renaksi RB terhadap total		%		100	100	100	100	100						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	rencana aksi RB sesuai kewenangan masing-masing ES I														
SK 7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian									21,06	25,49	28,03	30,84	33,92	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
IKK 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian		Skala Likert		3,56	3,58	3,6	3,62	3,64						
SK 8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian									5.904,64	8.542,47	9.396,71	10.336,38	11.370,02	Museum Tanah dan Pertanian
IKK 8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian		Skala Likert		3,56	3,58	3,6	3,62	3,66						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 8.2	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan meseum tanah yang dikelola		orang		20.000	23.000	25.000	27.000	30.000						
IKK 8.3	Jumlah koleksi museum yang dikelola		Unit		1	2	2	2	3						
IKK 8.4	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		Unit		3	5	5	5	5						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Pertanian															
SS 1	Meningkatnya pendapatan petani									55.055.717,07	64.405.241,90	63.522.724,26	61.855.880,65	62.402.231,31	Menteri Pertanian
IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)				123,64	125,02	126,42	127,84	129,27						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian		%		3,5	3,8	4	3,6	3,3						
SS 2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan														
IKSS 2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas		%		66	68	68	70	72						
SS 3	Meningkatnya cadangan pangan nasional														
IKSS 3.1	Persentase Peningkatan cadangan pangan		%		25	40	58	75	100						
SS 4	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian														
IKSS 4.1	Market share produk ekspor pertanian		%		2,65	2,7	2,75	2,8	2,85						
SS 5	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan														
IKSS 5.1	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan				0,23	0,41	0,66	0,84	1						
SS 6	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS										38.88 5.310 ,79	36.956.8 80,22	38.222.1 99,21	38.180.601 ,78	38.7 68.5 43,2 6	
SP.1	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal tanaman pangan dari produksi dalam negeri									2.244.625,86	2.257.521,10	2.402.731,96	2.558.292,18	2.723.528,14	Ditjen TP (Akabi dan Serealia)
IKP 1.1	Persentase produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri		Perse n	67,77	68,39%	68,68%	68,98%	69,27%	69,57%						
	beras			99,06%	101,33%	101,82%	102,32%	102,82%	103,32%						
	Jagung			105,21%	106,09%	106,97%	107,87%	108,77%	109,67%						
	Kedelai			8,42%	8,46%	8,50%	8,54%	8,58%	8,62%						
	Ubi Kayu			102,43%	103,81%	103,89%	103,96%	104,03%	104,11%						
	Ubi Jalar			106,33%	106,26%	106,27%	106,28%	106,30%	106,31%						
	Kacang Tanah			47,48%	52,61%	53,14%	53,67%	54,21%	54,76%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kacang Hijau			73,22%	68,56%	68,86%	69,17%	69,48%	69,78%						
	Sorghum			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
SP. 2	Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian														Ditjen TP (Serealia)
IKP 2.1	Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional		Person	55,19	55,44	55,59	55,94	56,19	56,45						
SP.3	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri														Ditjen Hortikultura
IKP 3.1	Persentase produksi hortikultura terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian hortikultura dalam negeri		%		91	91,12	91,28	91,45	91,58						
SP.4	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian														Ditjen Hortikultura
IKP 4.1	Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara		ton		25.840	33,44	41,04	48,64	56,24						
SP.5	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri														Ditjen PKH

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1	persentase produksi peternakan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal ternak dalam negeri		%	0	77,42	78,32	79,18	80,19	81,33						
SP.6	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan														Ditjen PKH
IKP 6.1	Indeks Keamanan komoditas peternakan		indeks	48,8	61,3	63,4	65,6	67,8	69,5						
SP 7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan														Ditjen PKH
IKP7.1	Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus bebas atau terkontrol dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan keseluruhan		%	80	80	80,3	80,6	80,9	81,2						
SP 8	Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia														Ditjen PKH
IKP 8.1	Persentase wilayah yang terkontrol dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia		%	40,5	41	41,5	42	42,5	43						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP 9	Terkendalinya risiko usaha pertanian														Direktorat Jenderal PSP
IKP 9.1	Persentase pengendalian risiko usaha pertanian		%		5,31	7,1	8,05	9,01	9,97						
SP 10	Menurunnya susut pangan pertanian pasca panen														Direktorat Jenderal PSP
IKP 10.1	Indeks penurunan susut pertanian pasca panen		indeks (0-10)		0,02	0,04	0,06	0,08	0,1						
SP 11	Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan kebutuhan produksi														Direktorat Jenderal PSP
IKP 11.1	Indeks pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian terhadap kebutuhan produksi		indeks (0-10)		9,1	9,14	9,2	9,24	9,3						
SP 12	Meningkatnya pemanfaatan PSP dalam mendukung lumbung pangan														Direktorat Jenderal PSP
IKP 12.1	Indeks pemanfaatan PSP yang mendukung lumbung pangan		indeks (0-10)		9,1	9,14	9,2	9,24	9,3						
SP 13	Meningkatnya indeks pertanaman untuk komoditas pertanian prioritas dalam mendukung														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	tercapainya swasembada pangan														
IKP 13.1	Ratarata indeks pertanaman komoditas untuk prioritas pertanian		Nilai		1,36	1,44	1,52	1,6	1,68						Ditjen LIP
SP. 14	Meningkatnya pemenuhan lahan dan air berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														Ditjen LIP
IKP 14.1	Persentase pemenuhan lahan dan air terhadap kebutuhan produksi		%		50	55	60	65	70						Ditjen LIP
SP. 15	Meningkatnya ketersediaan lumbung pangan														Ditjen LIP
IKP 15.1	Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan nasional terhadap cadangan pangan nasional		%		30	45	58	70	100						
SP 16	Terwujudnya pelestarian sumber daya genetik tanaman pertanian														BRMP
IKP 16.1	Indeks pelestarian sumber daya genetik tanaman pertanian		Nilai		4	4	4		4						
SP 17	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming, dan														BRMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian														
IKP 17.1	Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)		%		8,77	15,62	17,81	27,95	30						
1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan										281.524,86	768.107,10	825.674,96	889.118,18	958.424,14	
SK 1	Terpenuhinya produktivitas komoditas aneka kacang dan umbi prioritas														Dit Akabi
IKK 1.1	RataRata produktivitas komoditas tanaman aneka kacang dan umbi prioritas menuju swasembada (salah satunya Ubi Kayu)		Ku/ha	154,83	152,3	153,07	153,8	154,48	155,14						
RO	Kawasan Kedelai		Hektar	0	115	50000	50000	50000	50000						
RO	Kawasan Ubi Kayu		Hektar	0	0	1428	1428	1428	1428						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Kawasan Ubi Jalar		Hektar	0	1500	2778	2778	2778	2778						
RO	Kawasan Kacang Tanah		Hektar	0	0	1302	1302	1302	1302						
RO	Kawasan Kacang Hijau		Hektar	0	0	6349	6349	6349	6349						
SK 2	Terpenuhinya luas panen komoditas aneka kacang dan umbi prioritas														Dit Akabi
IKK 2.1	luas panen komoditas tanaman aneka kacang dan umbi prioritas		Hektar	1.11 2.55 5	1.221.9 65	1.233.0 03	1.244 .170	1.255.46 7	1.266 .895						
RO	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Aneka Kacang dan Umbi		Kegiatan		11	38	38	38	38						
RO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Aneka Kacang dan Umbi		NSPK		1	3	3	3	3						
RO	Pekarangan Ubi Jalar		Klp. Masyarakat		1.500	1.736	1.736	1.736	1.736						
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan										1.963 .101, 00	1.489.41 4,00	1.577.05 7,00	1.669.174, 00	1.76 5.10 4,00	
SK 1	Terpenuhinya produktivitas komoditas tanaman sereal prioritas														Dit Sereal

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	RataRata produktivitas komoditas tanaman serealitas prioritas		Ku/ha	58,45	58,79	59,15	59,47	59,81	60,17						
RO	Kawasan Padi		Hekta r	862.290	1.550.000	2.434.710	2.646.710	2.880.610	3.137.900						
RO	Kawasan Jagung		Hekta r	255.600	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
RO	Kawasan Sorgum		Hekta r	0	500	5000	5000	5000	5000						
SK 2	terwujudnya komoditas serealitas yang terfortifikasi														Dit Serealitas
IKK 2.1	Jumlah komoditas serealitas yang terfortifikasi		Komo ditas	1	1	1	1	1	1						
RO	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)		Hekta r	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
RO	Peraturan/Norma/Pedoman Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)		NSPK		0	1	1	1	1						
SK 3	Terpenuhinya luas panen komoditas serealitas prioritas														Dit Serealitas
IKK 3.1	Jumlah luas panen komoditas tanaman serealitas prioritas		Hekta r	12.594.789	12.914.345	13.032.453	13.223.964	13.427.610	13.619.423						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan		Kegiatan		96	38	38	38	38						
RO	Peraturan/Norma/Pedoman Sereal Lain		NSPK		0	1	1	1	1						
SK 4	Tercapainya produksi komoditas sereal prioritas pada kawasan sentra produksi pangan														
IKK 4.1	Ratarata produksi komoditas sereal pada kawasan sentra produksi pangan														
HA.1762.R AI.XXX	Kawasan Padi KSPP		Hektar		296.332	2.613.950	4.931.567	7.249.185	9.566.802						
HA.1762.R AI.XXX	Kawasan Jagung KSPP		Hektar		347.376	383.131	418.886	454.641	490.397						
SK 5	Tercapainya luas panen komoditas sereal prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian														Dit Sereal / KSPP per provinsi
IKK 5.1	luas panen komoditas sereal pada kawasan sentra produksi pangan		hektar												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1762.AFA.627	Peraturan/Norma/Pedoman Padi		NSPK		1	1	1	1	1						
1762.AFA.628	Peraturan/Norma/Pedoman Jagung		NSPK		1	1	1	1	1						
4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan										126.173,43	80.702,44	140.538,48	144.155,46	147.777,35	
SK 1	Tersedianya benih TP berdasarkan kebutuhan produksi TP														Dit Perbenihan TP
IKK 1.1	Persentase ketersediaan benih TP terhadap kebutuhan produksi TP		Person	80,81	84,59	85,71	86,82	87,94	89,05						
PDC.001	Sertifikasi benih padi		Produk	31658	30000	15000	15000	15000	15000						
PDC.002	Sertifikasi benih Jagung		Produk	10187	0	1000	1000	1000	1000						
PDC.003	Sertifikasi benih kedelai		Produk	0	0	5000	5000	5000	5000						
PDC.004	Sertifikasi benih aneka umbi		Produk	0	0	500	500	500	500						
PDC.005	Sertifikasi benih aneka kacang		Produk	0	0	1000	1000	1000	1000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PDC.006	Sertifikasi benih serealia lainnya		Produk	0	0	200	200	200	200						
IKK 1.2	Persentase Wilayah mandiri benih insitu terhadap total Wilayah tanaman pangan		Persen	10,53	13,16	15,79	18,42	21,05	23,68						
RAI.011	Pengembangan Produsen Benih Tanaman Pangan		unit	0	95	100	110	150	170						
IKK 1.3	Persentase benih yang lulus persyaratan mutu terhadap total benih yang diuji (beredar)		Persen	95	3780	96	96	96	96						
QKB.001	Peredaran Benih Tanaman Pangan yang diawasi		Laporan	32		5000									
4579.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		kegiatan		11	10	10	10	10						
4579.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		NSPK		4	4	4	4	4						
SK 2	Terwujudnya metode Pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura														BB PPMB TPH
IKK 2.1	Persentase metode pengujian mutu benih TP dan hortikultura yang diterapkan		Persen	50	50	55	60	65	70						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SBD.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih		Purwarupa	6	5	5	5	5	5						
HA.4579.Q DB.XXX	Fasilitasi laboratorium pengujian mutu benih		Unit												
4580 Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan										15.437,84	17.022,29	18.321,47	19.722,41	21.142,93	
SK 1	Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan dampak perubahan iklim														Dit Perlindungan TP
IKK 1.1	Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI		Perse	87,95	88,19	88,44	88,68	88,93	89,18						
RAI.001	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan		Hekta	50000	7787	14500	15000	15500	16000						
RAI.002	Areal Penanganan DPI		Hekta	25000	2000	1500	1500	1500	1500						
4580.AEA.001	Koordinasi Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan		kegiatan		18	38	38	38	38						
4580.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan		NSPK		2	4	4	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2	Terwujudnya Layanan pengujian mutu produk tanaman														BPMPT
IKK 2.1	Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman		Layanan	3	3	3	3	3	3						
QJA.001	Layanan Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida		Produk	2200	2200	1900	1900	1900	1900						
SK 3	Meningkatnya pemanfaatan informasi hasil peramalan OPT														BB Peramalan OPT (TP)
IKK 3.1	Persentase informasi hasil peramalan OPT yang dimanfaatkan		Persen	32	32	56	74	88	100						
4580.BMA.001	Informasi Peramalan OPT		Layanan	10	8	5	5	5	5						
4580.SDB.001	Model Pertanian Modern		Purwarupa		1	1	1	1	1	500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura										39.400,00	89.650,00	89.650,00	101.650,00	101.650,00	
SK 1	Terpenuhinya produktivitas komoditas buah prioritas														Dit Buah dan Flori

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Ratarata produktivitas komoditas buah prioritas		Ton/Ha		65,4	66,71	70,4	71,71	75,4						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Buah dan Florikultura		Kegiatan		38	38	38	38	38						
SK 2	Terpenuhinya luas panen komoditas buah prioritas														Dit Buah dan Flori
IKK 2.1	Ratarata luas panen komoditas buah prioritas		Ha		93,143	93,787	93,998	94,666	94,933						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Kawasan Durian		Ha		0	300	300	300	300						
RO	Kawasan Mangga		Ha		0	300	300	300	300						
RO	Kawasan Kelengkeng		Ha		0	300	300	300	300						
RO	Kawasan Alpukat		Ha		0	300	300	300	300						
RO	Kawasan Manggis		Ha		0	300	300	300	300						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Kawasan Buah Terna		Ha			100	100	100	100						
RO	Kawasan Buah Merambat		Ha			100	100	100	100						
RO	Kawasan Buah Perdu		Ha			100	100	100	100						
SK 3	Meningkatnya produksi komoditas florikultura siap ekspor														Dit. Buah dan Florikultura
IKK 3.1	Persentase produksi komoditas florikultura siap ekspor terhadap kebutuhan produksi untuk ekspor		%		100	100	100	100	100						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Kawasan Florikultura		m2		0	72400	72400	72400	72400						
1773 Pelindungan Hortikultura										27.110,00	40.702,00	45.132,00	50.110,00	68.110,00	
SK 1	Terlindunginya komoditas pertanian hortikultura dari OPT dan dampak perubahan iklim														Dit Pelindungan Horti
IKK 1.1	Persentase area/ wilayah hortikultura yang terkendali terhadap luas area/wilayah		%		95	95,5	96	96,5	97						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	hortikultura yang terserang OPT														
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Area pengendalian OPT Hortikultura		Ha		4417	4417	4417	4417	4417						
RO	Sarana Perlindungan Hortikultura		unit		0	100	100	100	100						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Kelompok Tani terlatih PHT		Kelompok masyarakat		0	80	80	80	80						
IKK 1.2	Persentase area/ wilayah hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI		%		90	90,5	91	91,5	92						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Area penanganan DPI Hortikultura		Ha		0	140	140	140	140						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pelindungan Hortikultura		kegiatan		38	38	38	38	38						
4581 Perbenihan Hortikultura										35.998,00	174.500,00	256.050,00	343.600,00	419.100,00	
SK 1	Tersedianya benih hortikultura berdasarkan kebutuhan produksi hortikultura														Dit Perbenihan Horti
IKK 1.1	Persentase ketersediaan benih hortikultura terhadap kebutuhan produksi hortikultura		%		39,8	40,1	40,42	40,76	41,1						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura		Ha		460	1300	2000	2700	2700						
RO	Benih Sebar Batang Hortikultura		batang		0	1100000	1100000	1100000	1100000						
KRO	Sertifikasi Produk														
RO	Sertifikat Tanda Daftar Varietas Hortikultura		produk			33	35	35	35						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Pemantauan produk														
RO	Peredaran benih hortikultura yang diawasi		laporan		0	100	100	100	100						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Hortikultura		Kegiatan		38	38	38	38	38						
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat										329.800,00	370.800,00	427.800,00	464.800,00	508.800,00	
SK 1	Terpenuhinya produktivitas komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas														Dit Sayur. & Tan Obat
IKK 1.1	Ratarata produktivitas komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas		Ton/Ha		26,93	27,06	27,2	27,34	27,48						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sayuran dan Tanaman Obat		Kegiatan		38	38	38	38	38						
KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Prasarana Budidaya Sayuran		Unit			2	10	10	10						
SK 2	Terpenuhinya luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas														Dit Sayur. & Tan Obat
IKK 2.1	Ratarata luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas		Ha		71,792	72,37	72,948	73,502	74,074						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Kawasan Bawang Merah		Ha		0	6800	6800	6800	6800						
RO	Kawasan Aneka Cabai		Ha		4200	4200	4200	4200	4200						
RO	Kawasan Bawang Putih		Ha		20	300	500	1000	2000						
RO	Kawasan Tanaman Obat		Ha		0	100	100	100	100						
RO	Kawasan Sayuran Umbi		Ha		0	100	100	100	100						
RO	Kawasan Sayuran Buah		Ha		0	100	100	100	100						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Pekarangan Hortikultura		Kelompok Masyarakat		13500	13500	13500	13500	13500						
SK 3	Tercapainya luas panen komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian														Dit. Sayur. & Tan. Obat
IKK 3.1	Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara		Ha		1700	2200	2700	3200	3700						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Kawasan Hortikultura KSPP		Ha		0	200	2.000	2.000	2.000						
1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak										106.095,64	217.612,40	242.876,00	266.934,00	292.484,00	
SK.1	Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman berdasarkan kebutuhan populasi ternak														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK1.1	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak		%	97,74	97,76	97,77	97,79	97,8	97,81						
KRO	QEG Bantuan Peralatan/Sarana														
RO	QEG 001 Bantuan Hijauan Pakan Ternak		Ha		180	360	540	720	900						
RO	QEG 002 Bantuan pakan olahan/bahan pakan		ton		21.268	1.711.413	2.055.325	2.389.968	5.143.215						
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	RAG 003 Sarana pakan hijauan di UPT		Ha		1.339	1.339	1.339	1.339	1.339						
RO	RAG 004 Sarana pakan olahan dan bahan pakan		unit		0	35	35	35	35						
KRO	AEA Koordinasi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	AEA 001 Supervisi. monitoring. dan evaluasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Kegiatan		1	1	1	1	1						
KRO	AFA. Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria														
RO	AFA 001 NSPK bidang pakan/bahan pakan		NSPK		2	2	2	2	2						
KRO	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat														
RO	QDC 001 Fasilitas dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan		orang		0	150	210	300	360						
IKK1.2	Persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak yang diproduksi untuk diedarkan		%	86,21	100	100	100	100	100						
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	RAG 005 Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan		Unit		5	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	ABR 002 Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Reko mend asi kebija kan			1	1	1	1						
KRO	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	AFA 002 NSPK penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		NSPK		2	2	2	2	2						
KRO	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat														
RO	QDC 002 Fasilitas dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan		orang		10	15	15	20	20						
SK.2	Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri untuk produksi pakan														
IKK.2.1	Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap kebutuhan produksi pakan		%	72	73	75	76	78	79						
KRO	AEA Koordinasi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	AEA 002 Supervisi, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri		Kegia tan		10	10	10	10	10						
KRO	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	ABR 001 Kebijakan bidang pakan/bahan pakan		reko mend asi kebija kan			2	2	2	2						
KRO	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
RO	FBA 001 Fasilitasi dan pembinaan Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri		Provi nsi		11	11	11	11	11						
SK.3	Terpenuhinya mutu dan Keamanan Pakan Ternak														UPT
IKK.3.1	Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak yang dapat diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSP Bekasi		%	78	80	82	84	86	88						
KRO	QJA Penyidikan dan Pengujian Produk														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	QJA 001 Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Prod uk		3.400	5.000	6.000	7.000	8.000						
SK.4	Tersedianya hijauan pakan ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak														UPT
IKK 4.1	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri		%		75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 4.2	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas		%		75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 4.3	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT SiborongBorong		%		75%	80%	83%	85%	90%						
IKK 4.4	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa		%		75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 4.5	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden		%		75%	80%	85%	90%	95%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.6	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar		%		75%	80%	83%	86%	90%						
IKK 4.7	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari		%		75%	80%	85%	90%	95%						
SK.5	Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan														UPT
IKK 5.1	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.2	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mangatas		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.3	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.4	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa		%		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.5	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBPTU HPT Baturraden		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.6	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.7	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.8	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.9	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari		%		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 5.10	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang		%		100%	100%	100%	100%	100%						
1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan										211.346,63	2.849.608,21	2.856.619,00	2.862.949,00	2.875.159,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS									138.050,63	2.580.007,08	2.584.262,23	2.588.177,28	2.595.782,33	
IKK 1.1	Tingkat kepatuhan peternakan terhadap standar biosekuriti		indeks	0,24	0,6	0,63	0,66	0,69	0,72						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi Kesehatan Hewan		Laporan		2	2	2	2	2						
RO	Koordinasi Kesehatan Ternak		Laporan		0	94	94	94	94						
RO	Koordinasi deteksi dan respon cepat		Laporan		0	1	1	1	1						
RO	Koordinasi pengawasan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar		Laporan		0	1	1	1	1						
KRO	Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria														
RO	Norma. Standar. Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan		NSPK		4	4	4	4	4						
RO	NSPK pengendalian dan penanggulangan penyakit		NSPK			2	2	2	2						
RO	NSPK deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan		NSPK			2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	NSPK layanan kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan		NSPK			2	2	2	2						
RO	NSPK perlindungan hewan ternak dari PHMS		NSPK			2	2	2	2						
RO	NSPK obat hewan dan alat kesehatan hewan		NSPK			2	2	2	2						
KRO	Pelayanan Publik Lainnya														
RO	Layanan Kesehatan Hewan		Layan an		20.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000						
RO	Layanan pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak		Layan an			19.275.000	19.275.000	19.275.000	19.275.000						
RO	Layanan pengawasan obat hewan		Layan an			2	2	2	2						
KRO	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Sarana Bidang Kesehatan Hewan		Unit			1	1	1	1						
RO	SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia		Unit			4.232.675	5.610.250	6.817.775	9.120.300						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah		Unit			6	7	8	10						
KRO	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Prasarana Bidang Kesehatan Hewan		Unit			3	3	3	3						
RO	SBSN Prasarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia		Unit		1										
RO	SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah		Unit		1										
SK. 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan									1.625,29	1.427.295,67	1.433.270,67	1.401.345,67	1.401.720,67	
IKK 2.1	Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan		indeks	0,48	0,6	0,64	0,67	0,71	0,74						
KRO	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	NSPK pelaporan dan deteksi dini potensi wabah penyakit hewan		NSPK		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	NSPK respon potensi wabah penyakit hewan		NSPK		1	1	1	1	1						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi deteksi dini potensi wabah penyakit hewan		Laporan		2	2	2	2	2						
RO	Koordinasi respon potensi wabah penyakit hewan		Laporan		1	1	1	1	1						
KRO	Pelayanan publik lainnya														
RO	Layanan untuk deteksi dini potensi wabah penyakit hewan		Layanan			11	11	11	11						
RO	Layanan untuk respon potensi wabah penyakit hewan		Layanan			9	9	9	9						
IKK2.2	Persentase Jumlah Kab/Kota yang dapat menekan kasus Rabies pada hewan		%	50	53	56	59	62	65						
KRO	Pelayanan publik lainnya														
RO	Layanan Pemberantasan penyakit hewan		Layanan			6.425.000	6.425.000	6.425.000	6.425.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Layanan surveilans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan		Layan an			11	11	11	11						
KRO	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	NSPK Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		NSPK		1	1	1	1	1						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		Kegia tan		1	1	1	1	1						
KRO	Pelayanan publik lainnya														
RO	layanan unit pelayanan kesehatan hewan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		Layan an			30	38	20	20						
RO	Layanan Penyidikan Penyakit dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan		Layan an			1.500	1.500	1.500	1.500						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3	Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan oleh BBVet Farna Pusvetma									15.46 3,85	8.465,35	11.220,5 0	13.635,55	18.2 40,6 0	UPT
IKK 3.1	Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan		%	100	95	95	95	95	95						
KRO	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Obat Hewan dan Bahan Biologik		unit			4.232.6 75	5.610 .250	6.817.77 5	9.120 .300						
SK.4	Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar oleh BBPMSOH Gunung Sindur									8.385 ,78	8.385,78	8.385,78	8.385,78	8.38 5,78	UPT
IKK 3.1	Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar		%	90	90	91	92	93	94						
IKK 4.1	Penyidikan dan Pengujian Produk														
RO	Layanan Pengujian Obat Hewan		Produ k		0	2600	2700	2800	2.900						
RO	Layanan Mutu Obat Hewan dan Pengujian Obat Hewan		Produ k		1	0	0	0	0						
SK.5	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner									49.44 6,38	252.750, 00	252.750, 00	252.750,00	252.	UPT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
														750,00	
IKK 5.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.2	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Denpasar		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.3	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.4	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.5	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bukit Tinggi		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.6	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bandar Lampung		%		98%	98%	98%	98%	98%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.7	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.8	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Banjarbaru		%		98%	98%	98%	98%	98%						
IKK 5.9	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Jayapura		%		98%	98%	98%	98%	98%						
1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak										2.649.610,39	481.817,78	1.162.452,30	601.683,73	649.556,84	
SK.1	Meningkatnya potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas														
IKK 1.1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas		%		79,53	80,55	81,51	82,65	83,94						
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya														
RO	QAH 001 Layanan Optimalisasi Reproduksi		Layanan			2.500.000	2.750.000	2.750.000	3.000.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	QAH 002 Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak		Layan an			1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.900.000						
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	RAG 006 Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak		Unit			100.000	100.000	100.000	100.000						
KRO	AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria														
RO	AFA 001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak		NSPK		7	10	10	10	10						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA 001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak		Kegia tan		7	7	7	7	7						
RO	AEA 002 Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah		Kegia tan			38	38	38	38						
KRO	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	QDD 001 Fasilitasi dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak		Kelo mpok Masy			25	25	25	25						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			araka t												
RO	QDD 002 Fasilitas dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak		Kelompok Masyarakat			13	13	13	13						
KRO	QEO Bantuan Produk dan Peralatan														
RO	QEO 002 Ternak Ruminansia Perah		Ekor		36.830	910	1.000	1.500	1.500						
RO	QEO 003 Ternak Ruminansia Potong		Ekor		1.000	9.200	9.200	9.200	9.200						
RO	QEO 004 Ternak Unggas		Ekor		493.500	9.000	10.000	12.000	12.000						
RO	QEO 005 Ternak Lainnya		Ekor		100	3.250	3.400	3.550	3.700						
SK.2	Tersedianya bibit dan benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi peternakan														
IKK 2.1	Persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi peternakan		%	67,3	67,81	68,33	68,92	69,56	70,21						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	PDC Sertifikasi produk														
RO	PDC 001 Sertifikasi benih/bibit ternak		Sertifikat			30	30	30	30						
RO	PDC 002 Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices		Sertifikat			15	15	15	15						
KRO	QEA Pengawasan dan Pengendalian Produk														
RO	QEA 001 Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak		Laporan			2	2	2	2						
KRO	REB Konservasi Jenis / Spesies														
RO	REB 002 Rumpun/Galur yang dilepas		Jenis		2	2	2	2	2						
SK.3	Terlindungnya Sumber Daya Genetik (SDG) hewan														
IKK 3.1	Persentase ketersediaan SDG hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya		%	95,5	95,5	96	97	98	99						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	REB Konservasi Jenis / Spesies														
RO	REB 001 Pengelolaan SDGH		Jenis		3	3	3	3	3						
SK.4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak														UPT
IKK 4.1	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri		%		77	80	82	84	85						
IKK 4.2	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Siborongborong		%		70	75	78	82	85						
IKK 4.3	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas		%		60	65	70	75	80						
IKK 4.4	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa		%		95	96	97	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.5	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden		%		64	66	68	70	72						
IKK 4.6	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar		%		90	91	92	93	95						
IKK 4.7	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari		%		70	73	75	78	80						
IKK 4.8	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BIB Lembang		%		95	96	97	98	98						
IKK 4.9	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBIB Singosari		%		95	96	97	98	98						
IKK 4.10	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang		%		70	71	73	74	95						
IKK 4.11	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang		%		75	80	82	85	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.5	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak									176.804,93	179.071,13	202.438,30	212.142,73	221.943,95	UPT
IKK 5.1	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTUHPT Indrapuri		%		77	80	82	84	85						
IKK 5.2	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTUHPT Siborongborong		%		81	84	85	86	87						
IKK 5.3	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTUHPT Padang Mangatas		%		85	86	87	88	90						
IKK 5.4	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTUHPT Sembawa		%		95	96	97	98	98						
IKK 5.5	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BBPTUHPT Baturaden		%		80	82	83	84	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.6	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BBPTUHPT Denpasar		%		90	91	92	93	95						
IKK 5.7	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BBPTUHPT Pelaihari		%		75	80	85	88	88						
IKK 5.8	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BIB Lembang		%		95	96	97	98	98						
IKK 5.9	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BBIB Singosari		%		95	96	97	98	98						
IKK 5.10	Persentase ketersediaan benih ternak unggul bermutu terhadap total benih yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang		%		90	92	93	94	95						
IKK 5.11	Persentase ketersediaan bibit ternak unggul bermutu terhadap total ternak yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang		%		80	80	80	85	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner									28.128,00	43.181,00	49.088,00	55.698,00	63.399,00	
SK.1	Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku									12.600,00	15.120,00	18.144,00	21.772,80	26.127,36	
IKK 1.1	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar		%	90	90,5	91	91,5	92	92,5						
KRO	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga														
RO	QIC 001 Pengawasan unit usaha produk hewan dan unit penanganan hewan		Lembaga		39	39	39	39	39						
SK 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan									60.944,00	65.433,00	69.916,00	74.322,00	78.341,00	
IKK 2.1	Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan		Indeks	51,4	54,1	56,2	58,2	60,7	63,2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	AFA 001 NSPK Penjaminan Keamanan Produk Hewan		NSPK		6	6	6	6	6						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA 001 Koordinasi Penjaminan Keamanan Produk Hewan		Kegia tan		7	7	7	7	7						
KRO	UAC Peningkatan Kapasitas aparatur negara														
RO	UAC 001 Bimbingan Teknis SDM Penjaminan Keamanan Produk Hewan		Oran g		1.145	1.165	1.165	1.165	1.165						
KRO	PDF Sertifikasi Lembaga														
RO	PDF 001 Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan		Lemb aga		150	250	350	450	500						
KRO	QAH Pelayanan publik lainnya														
RO	QAH 001 Pelayanan publik penjaminan keamanan produk hewan		Layan an		3.480	3.484	3.500	3.516	3.533						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	PCA Perijinan Produk														
RO	PCA 001 Registrasi Produk hewan		Produ k		100	105	110	115	120						
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	RAG 001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner		Unit		10	10	10	10	10						
IKK 2.2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan		%	65	70	75	80	85	90						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA 002 Koordinasi Zoonosis		Kegia tan		2	2	2	2	2						
KRO	AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	AFA 002 NSPK Zoonosis		NSPK		2	2	2	2	2						
KRO	QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	QKA 001 Pemantauan dugaan kejadian penyakit pada manusia yang berasal dari hewan dan/atau produk hewan		Kelo mpok Masy araka t		10	16	24	32	40						
KRO	UAC Peningkatan Kapasitas aparatur negara														
RO	UAC 002 Bimbingan Teknis SDM Zoonosis		orang		100	100	100	100	100						
KRO	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	QDC 001 Masyarakat yang teredukasi keamanan produk hewan dan zoonosis		Oran g		500	500	500	500	500						
IKK 2.3	Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional		%	58	60	62	65	67	70						
KRO	AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	AFA 003 NSPK Kesejahteraan Hewan		NSPK		2	2	2	2	2						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA 003 Koordinasi Kesejahteraan Hewan		Kegia tan		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	UAC Peningkatan Kapasitas aparatur negara														
RO	UAC 003 Bimbingan Teknis SDM Kesmavet		Oran g		100	100	100	100	100						
KRO	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	QDC 003 Masyarakat yang teredukasi keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan		Oran g		500	500	500	500	500						
KRO	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga														
RO	QIC 003 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lemb aga		39	39	39	39	39	6.300 ,00	7.560,00	9.072,00	10.886,00	13.0 64,0 0	
SK.3	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan									15.52 7,64	28.061,4 0	30.943,9 0	33.925,20	37.2 71,3 0	UPT
IKK 3.1	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSPH		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.2	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates		%		98	98	98	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.3	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Maros		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.4	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Medan		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.5	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bukittinggi		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.6	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bandar Lampung		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.7	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Subang		%		98	98	98	98	98						
IKK 3.8	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Banjarbaru		%		98	98	98	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.9	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Jayapura		%		98	98	98	98	98						
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian										109.150,00	191.440,00	233.170,00	274.900,00	316.630,00	
SK 1	Terlindunginya usaha pertanian nasional														Direktorat Pembiayaan Pertanian
IKK 1.1	Persentase lahan usaha pertanian yang terlindungi asuransi		%		3,6	7	8,73	10,45	12,18						
	O.1 Perlindungan usaha pertanian														
KRO	RBK Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
RO	RBK.001 Asuransi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan		Unit		500.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000						
RO	RBK.001 Asuransi peternakan		Unit		50.000	60.000	70.000	80.000	90.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.001 Rekomendasi kebijakan perlindungan usaha pertanian		Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1						
KRO	BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat														
RO	BDD.001 Bimbingan teknis perlindungan usaha pertanian		Kelompok Masyarakat		100	100	100	100	100						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi fasilitasi perlindungan dan pembiayaan usaha pertanian		Kegiatan		1	1	1	1	1						
SK 2	Meningkatnya akses pembiayaan usaha pertanian nasional														Direktorat Pembiayaan Pertanian
IKK 2.1	Persentase pelaku usahatani yang mendapat akses pembiayaan		%		7,03	7,2	7,38	7,57	7,75						
	O.2 Akses pembiayaan usaha pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.001 Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha pertanian		Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1						
KRO	BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga														
RO	BDB.001 Fasilitasi akses pembiayaan LKMA		Lembaga		120	120	120	120	120						
RO	BDB.002 Fasilitasi akses pembiayaan koperasi pertanian		Lembaga		12	12	12	12	12						
KRO	BDC Fasilitasi dan pembinaan masyarakat														
RO	BDC.001 Fasilitasi akses pembiayaan petani		Orang		1.682.588	1.682.588	1.682.588	1.682.588	1.682.588						
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
SK 3	Terkendalinya susut pangan asal pertanian														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.1	Persentase penurunan susut pangan pasca panen terhadap total produksi tanaman pangan		%		0,2	0,4	0,6	0,8	1						
	O.1 Susut pangan pasca panen asal pertanian														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian		Kegia tan		1	1	1	1	1						
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.001 Kajian penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian		Reko mend asi Kebij akan		1	1	1	1	1						
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida										618.8 36,00	631.994, 00	632.169, 00	632.294,00	632. 394, 00	
SK 4	Tersedianya pupuk berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														Direktorat Pupuk
IKK 4.1	Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan produksi pertanian		%		90	90,5	91	91,5	92						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	O.1 Pupuk untuk produksi pertanian														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pengawasan pupuk dan pembenah tanah		Kegiatan		3	3	3	3	3						
KRO	AFA Norma, standar, prosedur, dan kriteria														
RO	AFA.001 NSPK prosedur pembayaran pupuk bersubsidi		NSPK		1	1	1	1	1						
KRO	QAA Pelayanan publik kepada masyarakat														
RO	QAA.001 Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi		Orang		11.246.956	11.246.956	11.809.303	11.809.303	12.399.769						
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.001 Pedoman teknis tata kelola pupuk bersubsidi		Rekomendasi Kebijakan		2	2	2	2	2						
KRO	ADA Standarisasi produk														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	ADA.001 Persyaratan teknis minimal pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah		Produ k		1	1	1	1	1						
RO	ADA.002 Persyaratan teknis minimal pupuk anorganik		Produ k		1	1	1	1	1						
KRO	BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga														
RO	BDB.001 Pembinaan lembaga uji mutu dan efektivitas pupuk		Lemb aga		12	12	12	12	12						
RO	BDB.002 Pembinaan penegakan aturan pendaftaran pupuk		Lemb aga		12	12	12	12	12						
KRO	BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat														
RO	BDD.001 Fasilitasi kelompok petani untuk pemanfaatan pupuk		Kelo mpok Masy araka t		100	100	100	100	100						
KRO	QIA Pengawasan dan pengendalian produk														
RO	QIA.001 Pengawasan pupuk dan pembenah tanah		Produ k		1.000	1.050	1.050	1.100	1.100						
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RAG.001 Rumah pengolahan pupuk organik (RPPO)		Unit		100	100	100	100	100						
RO	RAG.002 Pupuk dan pembenah tanah untuk mendukung peningkatan produksi pertanian		Unit		212.750.000	212.750.000	212.750.000	212.750.000	212.750.000						
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida										436.927,00	436.927,00	436.927,00	436.927,00	436.927,00	
SK 5	Tersedianya pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														Direktorat Pestisida
IKK 5.1	Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan produksi pertanian		%		93	93	94	94	95						
	O.2 Pestisida untuk produksi pertanian														
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.001 Kebijakan pendaftaran pestisida untuk produksi pertanian		Rekomendasi Kebijakan		4	4	4	4	4						
RO	ABR.002 Kebijakan pengawasan pestisida untuk produksi pertanian		Rekomendasi Kebijakan		6	6	6	6	6						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pengawasan pestisida		Kegiatan		2	2	2	2	2						
RO	AEA.002 Koordinasi pengelolaan pestisida untuk peningkatan produksi pertanian		Kegiatan		2	2	2	2	2						
KRO	BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga														
RO	BDB.001 Pembinaan lembaga uji mutu, efikasi, toksisitas, dan residu pestisida		Lembaga		36	36	36	36	36						
KRO	BDH Fasilitasi dan pembinaan badan usaha														
RO	BDH.001 Pembinaan penegakan aturan pendaftaran pestisida		Badan Usaha		500	500	500	500	500						
KRO	BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat														
RO	BDD.001 Fasilitasi kelompok tani untuk penggunaan pestisida		Kelompok Masyarakat		125.680	125.680	125.680	125.680	125.680						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
RO	RAG.001 Pesticida untuk mendukung peningkatan produksi pertanian		Unit		3.939.071	3.939.071	3.939.071	3.939.071	3.939.071						
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										5.403.069,00	908.747,00	978.855,00	1.027.763,00	1.079.115,00	
SK 6	Meningkatnya pemanfaatan alsintan pra panen berdasarkan alsintan pra panen yang disediakan														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
IKK 6.1	Persentase alsintan pra panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pra panen yang disediakan		%		90,5	91	91,5	92	92,5						
	O.3 Alsintan pra panen untuk produksi pertanian														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		Kegiatan		1	1	1	1	1						
KRO	AFA Norma, standar, prosedur, dan kriteria														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	AFA.001 NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		NSPK				2	2	2						
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.002 Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		Rekomendasi Kebijakan				2	2	2						
KRO	BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga														
RO	BDB.001 Bimbingan teknis kelembagaan alat dan mesin pertanian		Lembaga		10	20	20	20	20						
KRO	BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat														
RO	BDD.001 Bimbingan teknis kelompok tani pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen		Kelompok Masyarakat		15	30	30	30	30						
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
RO	RAG.001 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan		Unit		63.482	9.150	36.000	38.000	41.990						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RAG.002 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura		Unit				2.900	3.132	3.383						
RO	RAG.003 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan		Unit				2.000	2.250	2.250						
RO	RAG.004 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan		Unit				2.000	2.250	2.500						
RO	RAG.005 Perbengkelan alat dan mesin pertanian		Unit				10	10	10						
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										12.676.322,00	12.697.344,00	12.698.596,00	12.699.910,00	12.701.291,00	
SK 7	Meningkatnya pemanfaatan alsintan pasca panen untuk hilirisasi pertanian														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
IKK 7.1	Persentase alsintan pasca panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pasca panen yang disediakan untuk hilirisasi pertanian		%		90,5	91	91,5	92	92,5						
	O.4 Alsintan pasca panen untuk produksi pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen		Kegia tan		1	1	1	1	1						
KRO	ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR.002 Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen		Reko mend asi Kebij akan		1	1	1	1	1						
KRO	AFA Norma, standar, prosedur, dan kriteria														
RO	AFA.001 NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen		NSPK		1	1	1	1	1						
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
RO	RAG.001 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan		Unit		896.39 5	896.39 5	896.3 95	896.395	896.3 95						
RO	RAG.002 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura		Unit		99.161	99.161	99.16 1	99.161	99.16 1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RAG.003 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan		Unit		61	100	137	143	150						
RO	RAG.004 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan		Unit			11	12	12	13						
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										1.230.200,00	1.293.719,00	1.360.292,00	1.430.074,00	1.503.223,00	
SK 8	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan														Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
IKK 8.1	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan		%		90,5	91	91,5	92	92,5						
	O.1 Alsintan pra panen untuk lumbung pangan														
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
RO	RAG.001 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan untuk lumbung pangan		Unit		12.149	16.813	20.896	22.417	23.938						
RO	RAG.002 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan		Unit		665	860	1.055	1.251	1.446						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian											4.219.402,00	4.219.402,00	4.219.402,00	4.219.402,00	4.219.402,00	
SK 9	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan															Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
IKK 9.1	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan		%		90,5	91	91,5	92	92,5							
	O.2 Alsintan pasca panen untuk lumbung pangan															
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida											692.551,00	1.198.864,00	1.198.864,00	1.198.864,00	1.198.864,00	
SK 10	Meningkatnya ketersediaan pupuk untuk lumbung pangan															Direktorat Pupuk
IKK 10.1	Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan		%		90	90,5	91	91,5	92							
	O.3 Pupuk untuk lumbung pangan															
KRO	AEA Koordinasi															

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	AEA.001 Koordinasi pengelolaan pupuk dan pembenah tanah untuk lumbung pangan		Kegiatan		1	1	1	1	1						
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														
RO	RAG.001 Pupuk dan pembenah tanah untuk mendukung peningkatan lumbung pangan		Unit		281.25 0.000	150.00 0	150.0 00	150.000	150.0 00						
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida										18.90 8,00	18.908,0 0	18.908,0 0	18.908,00	18.9 08,0 0	
SK 11	Meningkatnya ketersediaan pestisida untuk lumbung pangan														Direktorat Pestisida
IKK 11.1	Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan		%		93	93	94	94	95						
	O.4 Pestisida untuk lumbung pangan														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pengelolaan pestisida untuk lumbung pangan		Kegiatan		1	1	1	1	1						
KRO	RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RAG.001 Pestisida untuk mendukung peningkatan lumbung pangan		Unit		169.080	169.080	169.080	169.080	169.080						
7922 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			Kegiatan		1	1	1	1	1	664.400,00	1.375.600,00	1.375.600,00	1.375.600,00	1.375.600,00	
SK.1	Tersedianya Kebutuhan Air Pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														
IKK 1.1	Presentase ketersediaan Jaringan Irigasi Pertanian Terhadap Kebutuhan		%		0	26	51	77	100						Dit. Irigasi Pertanian
SK.2	Tersedianya sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian non irigasi dan rawan kekeringan														
IKK 2.1	Persentase ketersediaan sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan		%	RPJMN 2025-2029	45,33	45,78	46,24	46,7	47,17						Dit. Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian
SK 2	Meningkatnya ketersediaan irigasi pertanian pada lumbung pangan nasional														Dit. Irigasi Pertanian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1	Presentase ketersediaan Jaringan Irigasi pada Lumbung Pangan Nasional		%		0	25	50	75	100						
IKK 2.2	Persentase ketersediaan irigasi pertanian terhadap total kebutuhan irigasi pertanian untuk lumbung pangan nasional		%		0	25	50	75	100						
SK 3	Meningkatnya ketersediaan air untuk lahan pertanian pada lumbung pangan nasional														Dit. Konservasi dan pengembangan sumber daya air
IKK 3.1	Persentase lahan pertanian yang mendapatkan air terhadap total kebutuhan lahan pertanian untuk lumbung pangan nasional		%	RPMN 2025 2029	36,67	37,04	37,41	37,78	38,16						
7923 Perlindungan dan Penyediaan Lahan			Kegiatan		1	1	1	1	1	6.657.518,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
SK.1	Terpenuhinya kebutuhan luas tanam komoditas pertanian prioritas														Dit. Pelindungan dan Optimasi Lahan
IKK 1.1	Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanamannya (Ha)		Ha		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.2	Lahan Baku sawah (LBS) yang di cetak (Ha)		Ha		50.000	75.000	100.000	150.000	225.000						
SK.2	Tersedianya lahan pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian														Dit. Penyediaan Lahan
IKK 2.1	Persentase ketersediaan tambahan lahan baku terhadap kebutuhan produksi (hanya untuk sawah)		%		2	2	2	2	2						
SK.3	Dimanfaatkannya informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian														Dit. Pemetaan lahan dan irigasi pertanian
IKK 3.1	Indeks pemanfaatan informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian		Indeks		100	100	100	100	100						
SK.4	Meningkatnya produktivitas dan perlindungan lahan pertanian														Dit. Pelindungan dan Optimasi Lahan
IKK 4.1	Proporsi Lahan Pertanian yang termasuk kriteria lahan produktif dan berkelanjutan		%		11	11,5	12	12,5	13						
IKK 4.2	Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		%		75	77	80	85	87						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 5	Meningkatnya ketersediaan lahan pertanian untuk lumbung pangan nasional														Dit. Penyediaan Lahan
IKK 5.1	Persentase ketersediaan lahan baku pertanian untuk lumbung pangan nasional		%		10	10	10	10	10	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian										330.302,00	346.818,00	364.157,00	382.365,00	401.482,00	
SK.1	Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian														BBPM Biogen
IKK 1.1	Persentase ketersediaan SDG tanaman pertanian tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya		%		99,21	100	100	100	100						
SK.2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan														PPMP Tanaman Pangan
IKK 2.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan		%			20	20	20	20						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan (%)														
SK.3	Tersedianya adopsi teknologi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian TP, Horti, Bun, PKH														PPMP Hortikultura
IKK 3.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura (%)		%			20	20	20	20						
IKK 3.2	Persentase peningkatan adopsi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian TP, Horti, Bun, PKH														
SK.4	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan														PPMP Perkebunan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan (%)		%			20	20	20	20						
SK.5	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan														PPMP Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKK 5.1	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan (%)		%			20	20	20	20						
SK.6	Meningkatnya pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian														BBPM Mekanisasi Pertanian
IKK 6.1	Indeks pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian		Nilai Indeks		51	55	60	65	70						
SK.7	Meningkatnya pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian														BBPM Sumber Daya Lahan Pertanian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 7.1	Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian		Nilai Indeks		50	51	55	60	70						
SK.8	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian														BBPM Pasca Panen
IKK 8.1	Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian		Nilai Indeks		50	55	60	65	70						
SK.9	Meningkatnya pemanfaatan teknologi padi														BBMP Padi
IKK 9.1	Indeks pemanfaatan teknologi padi		Nilai Indeks		51	55	60	65	76						
SK.10	Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian														BBPM Biogen
IKK 10.1	Indeks pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian (Indeks)		Nilai Indeks		45	51	51	55	60						
SK.11	Meningkatnya pemanfaatan teknologi veteriner														BBPM Veteriner
IKK 11.1	Indeks pemanfaatan teknologi veteriner		Nilai Indeks		51	55	60	65	70						
SK.12	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif														Balai Besar Pengembangan dan Penerapan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
															Modernisa si Pertanian
IKK 12.1	Persentase peningkatan ketersediaan teknologi pertanian yang adaptif		%			20	20	20	20						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri										11.74 0.773 ,00	15.270.1 41,63	12.518.1 79,93	10.322.7 21,27	9.662 .986, 30	
SP.1	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan														Ditjen Tanaman Pangan
IKP 1.1	Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan		%	133,83	135,19	136,57	137,96	139,36	140,78						
SP.2	Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan														Ditjen TP (HHTP)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 2.1	Ratarata volume ekspor komoditas tanaman pangan		Kg	262.954	264.509	266.073	267.647	269.229	270.822						
SP.3	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan														Ditjen TP (HHTP)
IKP 3.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan		Nilai	0,65	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71						
SP.4	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														Ditjen TP (HHTP)
IKP 4.1	Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan		Nilai	0	0,43	0,57	0,71	0,86	1						
SP.5	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura														Ditjen Hortikultura
IKP 5.1	indeks harga yang diterima petani Hortikultura		Nilai		133,3	135,97	138,69	141,46	144,29						
SP.6	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura														Ditjen Hortikultura
IKP 6.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian Hortikultura		Nilai		0,8	0,82	0,85	0,87	0,9						
SP.7	Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura														Ditjen Hortikultura

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 7.1	Volume ekspor komoditas hortikultura		Ribu Ton		464	465	466	467	468						
SP.8	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														Ditjen Hortikultura
IKP.8.1	Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan		%		0,067	0,27	0,67	0,87	1						
SP.9	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dari produksi dalam negeri														
IKP 9.1	Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri		%	88	88	88	88	89	91						
SP.10	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi														Ditjen. Perkebunan
IKP.10.1	Persentase produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi terhadap total produksi		Juta Ton	0	14,75	18,99	19,56	20,14	20,75						
SP 11	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun														Ditjen Perkebunan
IKP 11.1	Indeks harga yang diterima Pekebun		Nilai	150,3	154,8	160,1	165,7	171,4	177,3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP 12	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian Perkebunan tanaman														Ditjen Bun
IKP 12.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian Perkebunan tanaman		Nilai	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85						
SP 13	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan														Ditjen Bun
IKP 13.1	Ratarata volume ekspor komoditas perkebunan		ribu ton	2.113	2.124	2.134	2.145	2.156	2.166						
SP.14	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														Ditjen Perkebunan
IKP 14.1	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan		Nilai	1,1	1,3	1,5	1,8	2	2,2						
SP.15	Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak														
IKP 15.1	Indeks Harga yang diterima peternak		indeks	122,91	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41						
SP.16	Terjaminnya mutu komoditas peternakan														
IKP 16.1	Indeks Mutu komoditas peternakan		indeks	0	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP.17	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan														
IKP 17.1	Ratarata volume ekspor komoditas peternakan		Ton	135.195,46	141.759,37	148.641,37	155.858,71	163.425,84	171.360,37						
SP.18	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi														
IKP 18.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan		indeks	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1						
SP.19	Meningkatnya sertifikasi usaha tani nasional														BRMP
IKP 19.1	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%)		%		13,07	28,76	30,72	53,59	55						
5885 Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan										75.287,00	78.064,63	81.615,93	86.016,52	91.201,26	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan usaha tani														Dit HH TP
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani Tanaman Pangan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani tanaman pangan		Perse n	100	95	95	95	95	95						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5885.BMA. 001	Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan		data		260	260	260	260	260						
SK.2	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian TP siap ekspor														Dit HH TP
IKK 2.1	Persentase produk komoditas tanaman pangan siap ekspor terhadap total potensi ekspor tanaman pangan		Perse n	28,5 7	42,86	57,14	71,43	85,71	100						
5885.AEA. 001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan					38	38	38	38						
EC.5885.Q DD.XXX	Fasilitasi dan Pembinaan Ekspor Produk Berbasis Agro		Unit												
SK.3	Terwujudnya komoditas pertanian TP bermutu dan aman														Dit HH TP
IKK 3.1	Persentase komoditas pertanian TP yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian TP		Perse n	65	67	68	69	70	71						
SK.4	Meningkatnya komoditas tanaman pangan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing														Dit HH TP
IKK 4.1	Persentase komoditas tanaman pangan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap		Perse n	0	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	total komoditas tanaman pangan unggulan														
5885.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		NSPK		1	1	1	1	1						
EC.5885.QDD.XXX	Fasilitasi dan Pembinaan Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan		Unit												
IO	Sertifikat produk TP Organik														
5885.PDC.001	Sertifikat Produk Tanaman Pangan		Produ k			44	48	52	56						
5887 Hilirisasi Hasil Hortikultura										639.5 98,00	346.608, 00	447.268, 00	717.268, 00	178.2 43,00	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas hortikultura yang dapat dimanfaatkan usaha tani														Dlt Hilirisasi Hasil Hortikultur a
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani hortikultura terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani hortikultura		%		80	85	87,5	90	95						
KRO	Promosi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Promosi Produk Hortikultura		Promosi		5	5	5	5	5						
SK.2	Terwujudnya komoditas pertanian Hortikultura bermutu dan aman														Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura
IKK 2.1	Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura		%		80	82,5	85	87,5	90						
KRO	Standarisasi Produk														
RO	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura		produk		500	500	500	500	500						
KRO	Sertifikasi Produk														
RO	Sertifikat Produk Hortikultura		produk		15	15	15	15	15						
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian hortikultura siap ekspor														Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura
IKK 3.1	Persentase produk komoditas hortikultura siap		%		5	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	ekspor terhadap total potensi ekspor hortikultura														
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Kelompok Tani terlatih GAP		Kelo mpok masy araka t		30	30	30	30	30						
RO	Kelompok Tani Terlatih GHP		Kelo mpok masy araka t		10	10	10	10	10						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Horticulture Development of Dryland Areas Project		Unit		500	887	2000	2000	1500						
SK.4	Meningkatnya komoditas hortikultura unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing														Dit Hilirisasi Hasil Hortikultur a
IKK 4.1	Persentase komoditas hortikultura yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas hortikultura unggulan		%		66,67	73,33	80	86,67	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Hortikultura		Kegia tan		38	38	38	38	38						
KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Hasil Hortikultura		Reko mend asi Kebij akan		5	5	5	5	5						
1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit Dan Aneka Palma										7.426 .156, 00	8.162.32 8,00	8.039.28 0,00	7.746.95 0,00	7.828 .260, 00	
SK.1	Terpenuhinya produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas														Dit Tan. Sawit & Aneka Palma
IKK 1.1	Ratarata produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas		Ton/H a	5,23	5,26	5,26	5,27	5,28	5,3						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma				8	20	20	20	20						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	Peraturan/Norma/Pedoma n Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma				13	13	13	13	13						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Kawasan Kelapa				11.515	154.000	64.27 5	12.000	12.00 0						
RO	Kawasan Sagu				4.600	8.300	8.300	8.300	8.300						
RO	Kawasan Pinang				900	10.850	10.85 0	10.850	10.85 0						
RO	Kawasan Tanaman Palma Lainnya				150	500	500	500	500						
RO	Kawasan Kelapa Sawit				127.00 0	127.000	130.0 00	135.000	140.0 00						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanamah Kelapa Sawit dan Aneka Palma					30.000	30.00 0	30.000	30.00 0						
5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Tahunan										1.730 .653, 00	2.099.48 6,00	2.160.99 7,00	1.314.72 7,00	1.080 .141, 00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Terpenuhinya produktivitas tanaman semusim dan tahunan prioritas														Dit Tan Semusim dan Tahunan
IKK 1.1	Ratarata produktivitas komoditas tanaman semusim dan tahunan prioritas		Ton/Ha	5,15	5,6	5,85	6,03	6,58	6,87						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan		Kegiatan		34	34	34	34	34						
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan		NSPK		15	15	15	15	15						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Kawasan Lada		Ha		1.200	3.438	2.362	3.300	3.100						
RO	Kawasan Pala		Ha		8.000	14.800	22.200	9.000	9.000						
RO	Kawasan Cengkeh		Ha		9.000	14.000	12.200	12.200	12.200						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Kawasan Tebu		Ha		100.45 3	99.547	47.00 0	19.600	8.400						
RO	Kawasan Vanili		Ha		53	56	56	56	56						
RO	Kawasan Kopi		Ha		17.900	86.000	11.00 0	11.000	11.00 0						
RO	Kawasan Kakao		Ha		8.716	175.500	68.73 4	9.700	9.700						
RO	Kawasan Karet		Ha		5.000	15.000	15.00 0	15.000	15.00 0						
RO	Kawasan Jambu Mete		Ha		1.800	48.200	6.000	6.000	6.000						
RO	Kawasan Teh		Ha		1.800	5.050	4.950	4.950	4.950						
RO	Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya		Ha		1.115	2.400	2.600	2.800	3.000						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanam Semusim dan Tahunan		Oran g		13000	32.200	32.20 0	32.200	32.20 0						
1779 Pelindungan Perkebunan										76.83 5,00	90.387,0 0	90.755,0 0	105.063, 00	108.3 27,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Terlindunginya komoditas perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim														Dit Pelindunga n Bun
IKK 1.1	Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT		%	45	47	48	48	49	50						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan		Kegia tan		10	13	17	17	17						
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	Peraturan/Norma/Pedoma n Perlindungan Perkebunan		NSPK		7	7	7	7	7						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		Ha		5350	5350	5350	6275	6275						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		Kelo mpok Masy araka t		210	210	210	260	257						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Perangkat Perlindungan Perkebunan		Unit		61	62	62	62	62						
IKK 1.2	Persentase area/ wilayah perkebunan yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terkena DPI		%	40	40	41	41	42	42						
KRO	Sarana Pengembangan Kawasan														
RO	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun		Ha		300	400	400	400	400						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan		Kelo mpok Masy araka t		24	23	23	23	23						
SK.2	Terwujudnya layanan perlindungan perkebunan														UPT lingkup Ditjen. Perkebuna n

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1	persentase layanan perlindungan perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	100	100	100	100	100	100						
IKK 2.2	persentase layanan perlindungan perkebunan di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya		%	100	100	100	100	100	100						
IKK 2.3	persentase layanan perlindungan perkebunan di Wilayah Kerja BBPPTP Ambon		%	100	100	100	100	100	100						
IKK 2.4	persentase layanan perlindungan perkebunan di Wilayah Kerja BPTP Pontianak		%	100	100	100	100	100	100						
KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan		Unit		13	18	18	21	23						
KRO	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat														
RO	Layanan Proteksi Tanaman Perkebunan		Oran g		62	67	73	82	92						
5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan										1.031.377,00	3.691.572,00	967.658,00	60.702,00	61.504,00	
SK.1	Tersedianya benih perkebunan berdasarkan kebutuhan produksi perkebunan														Dit Perbenihan Bun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase ketersediaan benih perkebunan terhadap kebutuhan produksi perkebunan		%	80	80	80	85	85	90						
KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan		Reko mend asi		17	159	159	159	159						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan		Kegia tan		7	25	30	35	40						
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan		NSPK		7	9	10	10	10						
KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan		Unit(h a)		1580	6591	21	13	10						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Pembinaan wilayah mandiri benih untuk kelompok tani		Kelo mpok Masy araka t		5	5	7	6	4						
KRO	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan		Unit(h a)		635	802	782	743	683						
KRO	Pelayanan Publik Lainnya														
RO	Layanan perbenihan tanaman perkebunan		Layan an		13	13	14	14	15						
KRO	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Operasional Nursery		Unit		70	80	70	9	9						
SK.2	Terjaminnya mutu benih Perkebunan yang beredar														UPT lingkup Ditjen. Perkebuna n
IKK 2.1	Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman perkebunan yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon		%	80	80	85	90	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.2	Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman perkebunan yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Medan		%	80	80	85	85	90	95						
IKK 2.3	Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman perkebunan yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya		%	80	80	80	80	85	85						
KRO	Penyidikan dan Pengujian Produk														
RO	Pengujian Mutu Benih		Produ k (Bata ng)		12.589. 740	12.589. 740	12.58 9.740	12.589.7 40	12.58 9.740						
RO	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan		Produ k (Bata ng)		61.659. 600	61.659. 600	61.65 9.600	61.659.6 00	61.65 9.600						
KRO	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Operasional laboratorium pengujian perbenihan		Unit		4	4	4	4	5						
5889. Hilirisasi Hasil Perkebunan										16.07 8,00	16.116,0 0	17.576,0 0	18.836,0 0	19.89 6,00	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan														Direktorat Hilirisasi Hasil

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	yang dapat dimanfaatkan usaha tani														Perkebuna n
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani perkebunan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani perkebunan (%)		%	80	82	84	86	88	90						
KRO	Data dan Informasi Publik														
RO	Informasi Pasar Komoditas Perkebunan		Doku men		38	38	38	38	38						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perkebunan		Kelo mpok Masy araka t		16	16	16	16	16						
KRO	Koordinasi														
RO	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Perkebunan		Kegia tan		41	41	43	45	47						
SK.2	Terwujudnya komoditas perkebunan bermutu bermutu dan aman														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebuna n

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1	Persentase komoditas pertanian perkebunan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian perkebunan		%	70	70	70	75	80	80						
KRO	Pengawasan dan Pengendalian Produk														
RO	Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan		Lapor an		10	10	12	15	17						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat		Kelo mpok Masy araka t		5	5	7	7	7						
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas perkebunan siap ekspor														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebuna n
IKK 3.1	Persentase produk komoditas perkebunan siap ekspor terhadap total potensi ekspor perkebunan		%	67	70	73	76	80	83						
KRO	Promosi Produk Hasil Perkebunan														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Promosi Produk Hasil Perkebunan		Promosi		11	11	16	21	25						
SK.4	Meningkatnya komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
IKK 4.1	Persentase komoditas perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas perkebunan unggulan		%	70	72	74	76	78	80						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	Pembinaan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan		Kelompok Masyarakat		5	5	5	5	5						
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	Peraturan/Norma/Pedoman Hilirisasi Hasil Perkebunan		NSPK		14	14	14	14	14						
KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan (Hilirisasi Bidang Perkebunan)		Rekomendasi		10	10	10	10	10						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			kebija kan												
SK.5	Tersedianya produk hasil pengolahan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi														Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebuna n
IKK 5.1	Persentase ketersediaan produk hasil pengolahan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi		%		30	38	38	39	39						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha														
RO	Pembinaan pengolahan komoditas pertanian tanaman perkebunan untuk bahan baku bio energi		Kelo mpok Masy araka t		1	1	1	1	1						
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan										4.499 ,00	20.260,0 0	24.312,0 0	29.174,0 0	35.00 9,00	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan														
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan		%	100	100	100	100	100	100						
KRO	AEA Koordinasi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	AEA 001 Supervisi, Monitoring, Pemasaran Evaluasi				1	3	4	5	6						
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan										396,00	780,00	936,00	1.123,00	1.348,00	
SK.2	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu														
IKK 2.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar		%	0	80	85	90	95	100						
KRO	QIC Pengawasan dan pengendalian lembaga														
RO	QIC 001 Pengawasan penerapan jaminan mutu pada unit usaha produk hewan				0	1	2	2	2						
KRO	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
RO	QDB 001 Pembinaan penjaminan mutu produk hasil peternakan pada unit usaha produk hewan		Lemb aga		1	1	1	1	1						
IKK 2.2	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian di BPMSPH		%	0	98	98	98	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	QIC Pengawasan dan pengendalian lembaga														
RO	QIC 002 Pengujian penerapan jaminan mutu pada unit usaha produk hewan				1	1	1	1	1						
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan										200,00	250,00	300,00	360,00	432,00	
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor														
IKK 3.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan		%	40	45	50	55	60	65						
KRO	PEH Promosi														
RO	PEH 001Promosi produk dan usaha peternakan prioritas		Promosi		1	4	5	5	6						
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan										3.236,00	18.510,00	22.212,00	26.654,00	31.985,00	
SK.4	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing														
IKK 4.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan		%	0	20	40	60	80	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	ABR 001 Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan		Reko mend asi		2	2	2	2	2						
KRO	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
RO	QDB 001 Fasilitasi dan pembinaan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan		lemba ga			1	1	2	2						
KRO	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	AFA 001 NSPK bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan		NSPK		0	1	1	1	1						
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	RAG 001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		Unit			1	7	7	10						
KRO	RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	RBK 001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		Unit			1	7	7	10						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.5	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan														
IKK 5.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		%	15,76	16,26	16,76	17,26	17,76	18,26						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA 002 Supervisi, monitoring, dan evaluasi bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan		Kegia tan			1	1	1	1						
-	-														
7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian										736.458,00	745.780,00	665.270,00	215.847,75	226.640,04	
SK.1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman pangan														PPMP – Hortikultura
IKK 1.1	Persentase produk usahatani tanaman pangan yang tersertifikasi (%)		%		6,67	13,33	20	26,67	33,33						
SK.2	Meningkatnya kualitas produk usahatani hortikultura														PPMP – Hortikultura
IKK 2.1	Persentase produk usahatani hortikultura yang tersertifikasi (%)		%		9,09	18,18	18,18	27,27	27,27						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3	Meningkatnya kualitas usahatani perkebunan														PPMP Perkebunan
IKK 3.1	Persentase produk usahatani perkebunan yang tersertifikasi (%)		%		12,5	12,5	25	25	25						
SK.4	Meningkatnya kualitas usahatani peternakan dan kesehatan hewan														PPMP – Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKK 4.1	Persentase produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%)		%		10	10	20	20	40						
SK.5	Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian														BB Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
IKK 5.1	Persentase pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian (%)		%		4,67	15,89	15,89	31,78	31,78						
SK.6	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian tanaman padi														BB Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Padi (Indeks)		Nilai		3,2	3,25	3,3	3,4	3,45						
SK.7	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian veteriner														BB Perakitan dan Modernisasi Veteriner
IKK 7.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Veteriner (Indeks)		Nilai		3,1	3,15	3,2	3,25	3,3						
SK.8	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumber daya lahan pertanian														BB Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
IKK 8.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian (Indeks)		Nilai		3,2	3,2	3,3	3,3	3,4						
SK.9	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian														BB Perakitan dan Modernisasi Pascapane n Pertanian
IKK 9.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian (Indeks)		Nilai		3,2	3,23	3,25	3,26	3,28						
SK.10	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian mekanisasi pertanian														BB Perakitan dan Modernisa

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
															si Mekanisasi Pertanian
IKK 10.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Mekanisasi Pertanian (Indeks)		Nilai		3,2	3,22	3,24	3,26	3,28						
SK.11	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan SDG pertanian														BB Perakitan dan Modernisa si Bioteknol gi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
IKK 11.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan SDG Pertanian (Indeks)		Nilai		3,2	3,25	3,3	3,4	3,45						
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI										677.9 97,84	2.766.15 4,28	3.194.83 7,86	3.585.27 0,40	4.022 .529, 55	BPPSDMP
SP 1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani									677.9 97,84	2.766.15 4,28	3.194.83 7,86	3.585.27 0,40	4.022 .529, 55	BPPSDMP
IKP 1.1	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas		%		1	1	1	1	1						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN										161.0 96,00	569.375, 00	616.481, 00	675.384, 00	740.2 43,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Meningkatnya kompetensi petani	Pusat dan UPT													Pusat Pelatihan Pertanian
IKK 1.1	SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)		%		90,1	90,2	90,3	90,4	90,5						
Output	O.4 Peningkatan kompetensi petani														
IO	IO.4 Jumlah petani yang mendapatkan peningkatan kompetensi														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pelaksanaan peningkatan kompetensi petani														
RO	Jumlah kegiatan Koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi petani	Pusat	Kegiatan		1	1	1	1	1						
KRO	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	AFA.001 Peraturan /norma /pedoman pelatihan pertanian														
RO	Jumlah Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian yang dihasilkan	Pusat	NSPK		6	6	6	6	6						
KRO	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian														
RO	Jumlah Sarana Pelatihan Pertanian	Pusat	Unit		1	1	1	1	1						
KRO	BMA Data dan Informasi Publik														
RO	BMA.001 Data dan informasi pelatihan pertanian														
RO	Jumlah dokumen data dan informasi pelatihan pertanian	Pusat	Doku men		1	1	1	1	1						
Output	O.9 Penyelenggaraan peningkatan kompetensi melalui diklat														
IO	IO.9 Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya														
KRO	SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	SCC.001 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur														
RO	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan vokasi pertanian														
RO	SCC.002 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah peserta pelatihan pertanian NonAparatur														
RO	SCC.003 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (MP Food Estate)														
RO	Jumlah peserta pelatihan pertanian NonAparatur (MP Food Estate)														
KRO	ADI/PDI – Sertifikasi Profesi dan SDM														
RO	ADI/PDI.001 – Sertifikasi profesi bidang pertanian														
RO	Jumlah peserta sertifikasi profesi bidang pertanian														
KRO	AEA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	AEA.003 – NSPK Pelatihan Vokasi Pertanian														
RO	Jumlah NSPK Pelatihan Vokasi Pertanian														
SK.2	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan)	Pusat dan UPT													Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1	Ratarata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur)		%		20	18	16	14	12						
IKK 2.2	Ratarata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur)		%		25	23	21	19	17						
Output	O.10 Penyelenggaraan pelatihan manajemen dan kepemimpinan														
IO	IO.10 Jumlah peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan														
KRO	AEA – Koordinasi														
RO	AEA.001 – Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegia tan		1	1	1	1	1						
KRO	AEC – Kerja Sama														
RO	AEC.001 – Kerja sama pelatihan bidang pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah kerja sama pelatihan bidang pertanian				1	1	1	1	1						
KRO	CCG – OM Sarana Bidang Pertanian, dan Lingkungan Hidup														
RO	CCG.001 – OM Sarana pelatihan manajemen dan kepemimpinan														
RO	Jumlah OM sarana pelatihan manajemen dan kepemimpinan		Unit		1	1	1	1	1						
KRO	CAG – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup														
RO	CAG.001 – Sarana pelatihan manajemen dan kepemimpinan														
RO	Jumlah sarana pelatihan manajemen dan kepemimpinan		Unit		1	1	1	1	1						
KRO	CBK – Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	CBK.001 – Prasarana Pelatihan Pertanian														
RO	Jumlah prasarana pelatihan pertanian					1	1	1	1						
KRO	QDB – Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	QDB.001. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pelatihan manajemen dan kepemimpinan														
RO	Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang mendapat fasilitasi dan pembinaan manajemen dan kepemimpinan		Lemb aga		72	72	74	72	72						
KRO	DCC/SCC – Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	DCC/SCC.001 Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur														
RO	Jumlah peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan Aparatur		Oran g		3.621	3.551	726	726	726						
RO	DCC/SCC.002 Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi non aparatur														
RO	Jumlah peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan NonAparatur		Oran g		75	105	90	90	90						
KRO	ADI/PDI – Sertifikasi Profesi dan SDM														
RO	ADI/PDI.001 – Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah peserta sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian		Oran g		60	90	120	150	180						
SK.3	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Pusat dan UPT													Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Balai Pelatihan Pertanian (BPP)
IKK 3.1	Ratarata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)		%		20	18	16	14	12						
IKK 3.2	Ratarata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)		%		25	23	21	19	17						
Output	O.10 Penyelenggaraan pelatihan														
IO	IO.10 Jumlah peserta pelatihan														
KRO	AEA – Koordinasi														
RO	AEA.001 – Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegia tan		7	7	7	7	7						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	AEC – Kerja Sama														
RO	AEC.002 – Kerja sama pelatihan bidang pertanian														
RO	Jumlah kerja sama pelatihan bidang pertanian				7	7	7	7	7						
KRO	CCG – OM Sarana Bidang Pertanian, dan Lingkungan Hidup														
RO	CCG.002 – OM Sarana pelatihan pertanian														
RO	Jumlah OM sarana pelatihan pertanian		Unit		7	7	7	7	7						
KRO	CAG – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup														
RO	CAG.002 – Sarana pelatihan pertanian														
RO	Jumlah Sarana Pelatihan Pertanian		Unit		7	7	7	7	7						
KRO	CBK – Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	CBK.001 – Prasarana Pelatihan Pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah prasarana pelatihan pertanian		Unit		1	7	7	7	7						
KRO	QDB – Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
RO	QDB.001. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya														
RO	Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang mendapat fasilitasi dan pembinaan				271	272	272	272	272						
KRO	DCC/SCC – Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	DCC/SCC.001 Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur														
RO	Jumlah peserta pelatihan vokasi Aparatur		Oran g		34.911	31.258	31.258	31.258	31.258						
RO	DCC/SCC.002 Pelatihan vokasi pertanian bagi non aparatur														
RO	Jumlah peserta pelatihan vokasi NonAparatur		Oran g		117.428	117.428	117.428	117.428	117.428						
KRO	ADI/PDI – Sertifikasi Profesi dan SDM														
RO	ADI/PDI.001 – Sertifikasi profesi bidang pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satuan	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah peserta sertifikasi profesi bidang pertanian		Orang		1.085	1.050	1.386	1.722	2.058						
SK.4	Meningkatnya kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan	Pusat dan UPT													BBPMKP BBPP Bapeltan
IKK 4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan		Skala Likert		4	4,1	4,2	4,3	4,4						
Output	O.10 Penyelenggaraan Pelatihan														
IO	IO.10 Jumlah peserta pelatihan														
KRO	AEA – Koordinasi														
RO	AEA.001 – Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan		2	2	2	2	2						
KRO	AEC – Kerja Sama														
RO	AEC.001 – Kerja sama pelatihan bidang pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah kerja sama pelatihan bidang pertanian				2	2	2	2	2						
KRO	CAG – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup														
RO	CAG.001 – Sarana pelatihan pertanian														
RO	Jumlah sarana pelatihan pertanian		Unit		2	2	2	2	2						
KRO	CCG – OM Sarana Bidang Pertanian, dan Lingkungan Hidup														
RO	CCG.001 – OM Sarana pelatihan pertanian														
RO	Jumlah OM sarana pelatihan pertanian		Unit		2	2	2	2	2						
KRO	CBK – Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	CBK.001 – Prasarana Pelatihan Pertanian														
RO	Jumlah prasarana pelatihan pertanian		Unit			2	2	2	2						
KRO	QDB – Fasilitas dan Pembinaan Lembaga														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	QDB.001. Penumbuhan dan Penguatan P4S (Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya)														
RO	Jumlah P4S yang mendapatkan fasilitasi penumbuhan dan penguatan Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang mendapat fasilitasi dan pembinaan				39	39	39	39	39						
KRO	DCC/SCC – Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	DCC/SCC.001 Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur														
RO	Jumlah peserta pelatihan vokasi Aparatur		Oran g		8.823	7.692	7.692	7.692	7.692						
RO	DCC/SCC.002 Pelatihan vokasi pertanian bagi non aparatur														
RO	Jumlah peserta pelatihan vokasi NonAparatur		Oran g		30.420	30.420	30.420	30.420	30.420						
KRO	ADI/PDI – Sertifikasi Profesi dan SDM														
RO	ADI/PDI.001 – Sertifikasi profesi bidang pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah peserta sertifikasi profesi bidang pertanian		Oran g		293	276	366	456	546						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN										107.5 23,84	1.483.65 2,72	1.657.39 8,65	1.909.76 4,37	2.183 .047, 32	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian	Pusat dan UPT													Pusat Penyuluha n Pertanian
IKK 1.1	Persentase penyuluh yang meningkat kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) (%)		%		6	7	8	9	10						
Output	O.1. Pembinaan penyuluh pertanian														
IO	IO.1 Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan pembinaan				36.493	36.493	36.493	36.493	36.493						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian														
RO	Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian				1	1	1	1	1						
KRO	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
RO	BDB.001 Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan				1100	5867	5867	5867	5867						
KRO	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	BDC.001 Fasilitasi dan pembinaan penyuluh pertanian														
RO	Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan					36493	36493	36493	36493						
KRO	BMA Data dan Informasi Publik														
RO	BMA.001 Data dan informasi penyuluhan pertanian														
RO	Jumlah dokumen data dan informasi penyuluhan pertanian				1	39	39	39	39						
KRO	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	CAG.001 Sarana Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian														
RO	Jumlah Sarana Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian					38	38								
KRO	CAN – Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	CAN.001 Sarana TIK penyuluhan pertanian														
RO	Jumlah Sarana TIK penyuluhan pertanian					39	39								
KRO	CCL – OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
RO	CCL.001 – Pemeliharaan sarana TIK penyuluhan pertanian														
RO	Jumlah sarana TIK yang dilakukan pemeliharaan					39	39	39	39						
KRO	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
RO	FBA.001 Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi														
RO	Jumlah daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang mendapat fasilitasi dan pembinaan				38	38									
RO	FBA.002 Koordinasi Kegiatan SIMURP														
RO	Jumlah koordinasi kegiatan SIMURP dengan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)														
Output	O.2 Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IO	IO. 2 Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kompetensi														
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi pelaksanaan peningkatan kompetensi penyuluh														
RO	Jumlah kegiatan Koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi penyuluh				2	39	39	39	39						
Output	O.3 Pembinaan petani														
IO	IO.3 Jumlah petani yang mendapatkan pembinaan				7.095.920	9.461.227	14.191.841	18.922.454	21.287.761						
KRO	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	BDC.001 Fasilitasi dan pembinaan Petani														
RO	Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan				1	7.095.920	9.461.227	14.191.841	18.922.454						
KRO	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	BDD.001 Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (KEP)														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan				1	91,203	136,804	182,406	228,007						
RO	BDD.002 Percontohan penerapan Teknologi Pertanian														
RO	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan percontohan penerapan teknologi pertanian					5829	5829	5829	5829						
RO	BDD.003 Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan														
RO	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan					514	514	514	514						
SK.2	Meningkatnya jumlah petani millennial														Pusat Penyuluhan Pertanian
IKK 2.1	Persentase Petani muda terhadap total petani* (data dari Simluhtan) (%)		%		22,03	22,13	22,23	22,33	22,43	64.686,00	165.244,00	181.154,00	208.179,00	256.051,00	
Output	O.5 Regenerasi Petani														
IO	IO.5 Jumlah petani muda/millennial yang dibina				1.351.430	1.801.906	2.702.860	3.603.813	4.054.289						
KRO	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	AFA.001 – Peraturan /norma /pedoman regenerasi petani														
RO	Jumlah Peraturan/norma /pedoman regenerasi petani yang dihasilkan				1	1	1	1	1						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi regenerasi petani														
RO	Jumlah kegiatan koordinasi regenerasi petani					39	39	39	39						
KRO	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	BDC.001 Fasilitasi dan pembinaan petani muda														
RO	Jumlah petani muda yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pertanian					450.477	675.715	900.953	1.126.192						
KRO	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	BDD.001 Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (KEP)														
RO	Jumlah kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang					38	38	38	38						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	mendapatkan fasilitasi dan pembinaan														
Output	O.11 Pembinaan brigade pangan nasional														
IO	IO.11 Jumlah pembinaan brigade pangan				7.095.920	9.461.227	14.191.841	18.922.454	21.287.761						
KRO	AEA Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi Brigade Pangan														
RO	Jumlah kegiatan koordinasi Brigade Pangan				15	17	19	21	23						
KRO	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	BDC.002 Fasilitasi dan pembinaan Penyuluh pertanian pendamping Brigade pangan														
RO	Jumlah penyuluh pertanian pendamping brigade pangan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan				567	624	655	688	722						
KRO	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
RO	BDD.001 Fasilitasi dan pembinaan Brigade pangan														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah brigade pangan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan				1.790	4.290	6.790	9.290	11.790						
KRO	ABR/PBR – Kebijakan bidang pertanian dan perikanan														
RO	ABR/PBR.001 – Kajian kebijakan brigade pangan														
RO	Jumlah rekomendasi kebijakan brigade pangan					2	2	2	2						
KRO	AFA – Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	AFA.001 – NSPK Brigade Pangan														
RO	Jumlah NSPK Brigade pangan					2	2	2	2						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN										367.637,00	414.310,00	586.820,00	630.650,00	674.340,00	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian	Pusat dan UPT													Pusat Pendidikan Pertanian
IKK 1.1	Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian (%)		%		80	80,1	80,2	80,2	80,2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	O.6 Pembinaan Politeknik vokasi Pertanian di bawah Kementan														
IO	IO.6 Jumlah Politeknik Vokasi Pertanian di bawah Kementerian Pertanian yang dibina														
KRO	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	AFA.001 – Peraturan /norma/ pedoman pembinaan Politeknik vokasi Pertanian di bawah Kementan														
RO	Jumlah Peraturan/norma /pedoman pembinaan Politeknik vokasi Pertanian di bawah Kementan yang dihasilkan				6	6	6	6	6						
KRO	AEA – Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan				1	1	1	1	1						
KRO	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	QDC.001 Fasilitasi dan pembinaan Politeknik vokasi Pertanian di bawah Kementan														
RO	Jumlah Politeknik vokasi Pertanian di bawah Kementan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan					7	7	7	7						
KRO	BMA Data dan Informasi Publik														
RO	BMA.001 Data dan informasi pendidikan pertanian														
RO	Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan pertanian					1	1	1	1						
SK.2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi Pertanian	Pusat dan UPT													UPT Pendidikan
IKK 2.1	Persentase lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian terhadap total lulusan		%		80	80,1	80,2	80,2	80,2						
Output	O.7 Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang pertanian (Tri Dharma Perguruan Tinggi)														
IO	IO.7 Jumlah layanan pendidikan tinggi bidang pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	AEA – Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
RO	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan				7	7	7	7	7						
KRO	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
RO	BDC.001 – Pengabdian kepada masyarakat														
RO	Jumlah Pengabdian kepada masyarakat					7	7	7	7						
KRO	CAA Sarana Bidang Pendidikan														
RO	CAA.001 Sarana pendidikan vokasi pertanian														
RO	Jumlah sarana pendidikan vokasi pertanian				7	7	7	7	7						
KRO	CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi														
RO	CBJ.001 Prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian				1	7	7	7	7						
KRO	SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan														
RO	SAC.001 Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (DIV)														
RO	Jumlah peserta didik Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (DIV)				4.886	4.970	5.100	5.200	5.300						
RO	SAC.002 Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (DIII)														
RO	Jumlah peserta didik Pendidikan menengah Vokasi Pertanian Diploma tiga (DIII)				908	950	990	1.100	1.200						
KRO	DBA – Pendidikan Tinggi														
RO	DBA.001 – Penelitian Terapan Politeknik di lingkup Kementerian Pertanian														
RO	Jumlah penelitian terapan Politeknik di lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan					7	14	21	28						
KRO	DDD – Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satuan	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	DDD.001 – Pendaftaran HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT														
RO	Jumlah HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT yang didaftarkan					7	7	7	7						
Output	O.8 Penyelenggaraan pendidikan menengah bidang pertanian														
IO	IO.8 Jumlah layanan pendidikan menengah bidang pertanian														
KRO	AEA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
RO	AEA.002 – Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pendidikan Vokasi Pertanian														
RO	Jumlah Peraturan/norma/pedoman pendidikan menengah vokasi pertanian yang dihasilkan				3	3	3	3	3						
KRO	CAA Sarana Bidang Pendidikan														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	CAA.002 Sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian														
RO	Jumlah sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian				3	3	3	3	3						
KRO	CBI Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah														
RO	CBI.001 Prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian														
RO	Jumlah prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian				3	3	3	3	3						
KRO	BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat														
RO	BDC.002 – Pengabdian kepada masyarakat														
RO	Jumlah pengabdian kepada masyarakat				3	3	3	3	3						
KRO	SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan														
RO	SAC.003 Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian														
RO	Jumlah peserta didik Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian				908	950	980	1.010	1.040						BPPSDMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satuan	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN										41.74 1,00	298.816, 55	334.138, 21	369.472, 03	424.8 99,23	
SK.1	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	Pusat dan UPT													Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
IKK 1.1	Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian		%		80	80	80	80	80						
IKK 2.1	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian		%		25	50	60	70	80						
Output	O.12 Penyelenggaraan peningkatan kompetensi ASN Pertanian														
IO	IO.12 Jumlah ASN Pertanian yang mendapatkan penilaian dan pengembangan kompetensi				1.847	9.300	10.400	11.500	13.205						
KRO	ABR – Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	ABR.001 – Kajian kebijakan penilaian dan pengembangan kompetensi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Jumlah rekomendasi kebijakan penilaian dan pengembangan kompetensi				1	1	1	1	1						
KRO	AFA – Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
RO	AFA.001 Peraturan / norma/ pedoman pelatihan pertanian														
RO	Jumlah Peraturan/ norma/pedoman pelatihan pertanian yang dihasilkan				7	7	7	7	7						
KRO	AEA – Koordinasi														
RO	AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Peningkatan Kompetensi ASN Pertanian														
RO	Jumlah kegiatan Koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi ASN pertanian				1	1	1	1	1						
KRO	AEC – Kerja sama														
RO	AEC.001 Kerjasama penilaian dan pengembangan kompetensi														
RO	Jumlah kerjasama dan pengembangan kompetensi														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satua n	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	FAC – Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara														
RO	FAC.001 Uji kompetensi														
RO	Jumlah peserta uji kompetensi				1.847	9.300	10.400	11.500	13.205						
RO	FAC.002 Assessment kompetensi														
RO	Jumlah peserta assessment kompetensi				1.097	7.300	7.400	7.500	8.205						
RO	FAC.003 Pengembangan kompetensi ASN pertanian														
RO	Jumlah ASN pertanian peserta pengembangan kompetensi				750	2000	3000	4000	5000						
KRO	CAG – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	CAG.001 – Sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian														
RO	Jumlah sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian				1	1	1	1	1						
KRO	CCG – OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	LOK ASI	Satuan	Bas elin e	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	CCG.001 – Pemeliharaan sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian														
RO	Jumlah pemeliharaan sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian				1	1	1	1	1						
KRO	CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	Layanan														
RO	Jumlah prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian				1	1	1	1	1						
KRO	CDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
RO	CDK.001 – Pemeliharaan prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian														
RO	Jumlah pemeliharaan prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian				1	1	1	1	1						

Lampiran 2: Matrik Pendanaan APBN dan Belanja Negara Non APBN Terhadap Kegiatan Prioritas Tahun 2025 – 2029

Matriks Pendanaan Anggaran TA 2025-2029																														
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target RPJMN					Satuan	Target Renstra 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELON I	Total (dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	SS.1, KSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	%	3,5	3,8	4	3,6	3,3	%	3,5	3,8	4	3,6	3,3	942.316	2.965.309	3.021.854	3.142.545	3.063.674						BPSDM	942.316	2.965.309	3.021.854	3.142.545	3.063.674	
	01 - Meningkatkan pendapatan petani								82.903	69.295	70.167	71.423	58.881	658.642.392	1.999.678.410	2.045.583.398	2.125.324.860	2.107.224.958						BPSDM	658.642.392	1.999.678.410	2.045.583.398	2.125.324.860	2.107.224.958	
	01 - Meningkatkan kelas kemampuan pelaku usaha tani								49.098	56.385	57.257	58.414	45.971	283.673.198	965.630.450	976.270.342	1.017.220.198	956.449.533							283.673.198	965.630.450	976.270.342	1.017.220.198	956.449.533	
PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani	SS1, KSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)		0,7445	0,7731	0,8038	0,8324	0,8599	%	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27	22.468	29.602	30.899	31.566	32.943						TP	22.468	29.602	30.899	31.566	32.943	
	KP 1.1 Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan							%	135,19	136,57	137,96	139,36	140,78	3.269	3.302	3.335	3.369	3.404							3.269	3.302	3.335	3.369	3.404	
	KP 5.1 indeks harga yang diterima petani Hortikultura								133,3	135,97	138,69	141,46	144,29	8.800	15.810	16.470	16.470	17.145						HORTI	8.800	15.810	16.470	16.470	17.145	
	KP 11.1 Indeks harga yang diterima Pekebun								154,8	160,1	165,7	171,4	177,3	9.732	9.770	10.230	10.690	11.150						BUN	9.732	9.770	10.230	10.690	11.150	
	KP15.1 Indeks Harga yang diterima peternak								124,75	126,62	128,62	130,45	132,41	667	720	864	1.037	1.244						PKH	667	720	864	1.037	1.244	
KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton)	SP2. Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Ton	196.984	844.362	1.332.808	1.821.255	2.309.701	Persen	55,44	55,59	55,94	56,19	56,45	114.221	8.901.148	46.224.458	29.731.312	417.654.625						TP	114.221	8.901.148	46.224.458	29.731.312	417.654.625	
	KP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional								55,44	55,59	55,94	56,19	56,45		2.555	9.609	27.499.684	26.303	36.100					TP	2.555	9.609	27.499.684	26.303	36.100	
KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (ton)	KK 5.1 luas panen komoditas serelia pada kawasan sentra produksi pangan	Ha	146.806	590.872	941.637	1.292.402	1.643.167		146.806	520.896	894.987	1.269.077	1.643.167	97	97	97	97	97						TP	97	97	97	97	97	
	KP. Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional																								-	-	-	-	-	
	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223	
	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	
	KK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan								90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864							692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton)	KK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan								93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908							18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	KK 4.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha)	Ha	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700	ha	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700	1.000	5.000	50.000	75.000	100.000							1.000	5.000	50.000	75.000	100.000	
	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223	
	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	
	KK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan								90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864							692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
KP 02.10.3 Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	KK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan								93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908							18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	KP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional	Ton	65.724	443.784	1.375.883	2.307.982	3.240.081		55,44	55,59	55,94	56,19	56,45		497	12.382	25.691	40.552	57.105					TP	497	12.382	25.691	40.552	57.105	
	KK 5.1 luas panen komoditas serelia pada kawasan sentra produksi pangan	Ha	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240		28.568	671.236	1.313.904	1.956.572	2.599.240	97	97	97	97	97						TP	97	97	97	97	97	
	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223	
	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402
KP 02.10.4 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	KK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan								90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864							692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
	KK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan								93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908							18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	KP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional	Ton	33.624	71.324	126.889	182.454	238.020		55,44	55,59	55,94	56,19	56,45	190	996	1.897	2.903	4.023						TP	190	996	1.897	2.903	4.023	
	KK 5.1 luas panen komoditas serelia pada kawasan sentra produksi pangan	Ha	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111		10.930	53.975	97.021	140.066	183.111	97	97	97	97	97						TP	97	97	97	97	97	
	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223	
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402
	KK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan								90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864							692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
	KK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan								93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908							18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	KP. Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional	Ton	49.100	60.687	81.260	117.177	181.038		55,44	55,59	55,94	56,19	56,45	109.880	114.679	119.678	124.277	129.077						TP	109.880	114.679	119.678	124.277	129.077	
	KK 5.1 luas panen komoditas serelia pada kawasan sentra produksi pangan	Ha	9.048	10.857	14.114	19.760	29.540		117.864	123.012	128.160	133.308	138.456	97	97	97	97	97						TP	97	97	97	97	97	
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223	
	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402				

Matriks Pendanaan Anggaran TA 2025-2029																													
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target RPJMN					Satuan	Target Renstra 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELON I	Total (dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
KP 02.10.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	KKP. Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional	Ton	1,31	3.847	6.535	9.382	12.393		55,44	55,59	55,94	56,19	56,45	1,099	1,519	2,144	2,448	2,750						TP	1,099	1,519	2,144	2,448	2,750
KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	KK 5.1 Luas panen komoditas serelia pada kawasan sentra produksi pangan	Ha	189	539	889	1.239	1.589		1,179	1,579	1,879	2,179	2,579	97	97	97	97	97						TP	97	97	97	97	97
	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223
	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402
	KK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan								90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864							692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
	KK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan								93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908							18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
KP 02.10.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	KKP 2.1 Persentase produksi komoditas TP pada KSPP terhadap target produksi untuk cadangan pangan nasional	Ton	0	964.000	2.121.000	3.168.000	3.719.000		55,44	55,59	55,94	56,19	56,45	93.243	97.725	102.452	107.327	112.220						TP	93.243	97.725	102.452	107.327	112.220
KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	KK 5.1 Luas panen komoditas serelia pada kawasan sentra produksi pangan	Ha	0	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000		-	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000	97	97	97	97	97						TP	97	97	97	97	97
	KK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223							1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223
	KK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan								90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402							4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402
	KK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan								90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864							692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
	KK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan								93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908							18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
	Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	Ton							196.984	740.163	1.283.343	1.826.522	2.369.701	2,555	9,609	27,499.684	26,303	36,100							2,555	9,609	27,499.684	26,303	36,100
	Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	Ton							65.724	859.313	1.652.903	2.446.492	3.240.081	497	12.382	25.691	40.552	57.105							497	12.382	25.691	40.552	57.105
	Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton							33.624	84.723	135.822	186.921	238.020	190	996	1.897	2.903	4.023							190	996	1.897	2.903	4.023
	Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Ton							342.152	375.137	408.121	441.106	474.090	109.880	114.679	119.678	124.277	129.077							109.880	114.679	119.678	124.277	129.077
	Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	Ton							5.223	7.994	10.765	13.536	16.306	1,099	1,519	2,144	2,448	2,750							1,099	1,519	2,144	2,448	2,750
	Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	Ton							-	929.750	1.859.500	2.789.250	3.719.000	-	8.761.964	18.575.364	29.534.828	417.425.570							-	8.761.964	18.575.364	29.534.828	417.425.570
	Kawasan Padi KSPP	Hektar							296.332	2.613.950	4.931.567	7.249.185	9.566.802	3.242	8.784.950	46.102.635	29.604.587	417.522.798							3.242	8.784.950	46.102.635	29.604.587	417.522.798
	Kawasan Jagung KSPP	Hektar							347.376	383.131	418.886	454.641	490.397	110.979	116.198	121.822	126.725	131.827							110.979	116.198	121.822	126.725	131.827
	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah	Hektar							146.806	520.896	894.987	1.269.077	1.643.167												-	-	-	-	-
	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	Hektar							28.568	671.236	1.313.904	1.956.572	2.599.240												-	-	-	-	-
	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	Hektar							10.930	53.975	97.021	140.066	183.111												-	-	-	-	-
	Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	Hektar							117.864	123.012	128.160	133.308	138.456												-	-	-	-	-
	Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua	Hektar							1.179	1.579	1.879	2.179	2.579												-	-	-	-	-
	Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan	Hektar							-	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000												-	-	-	-	-
KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak	KK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak	ribu ha	42	80	80	80	80	Ha	50.000	75.000	100.000	150.000	225.000	1.870.000	2.840.000	3.800.000	5.700.000	8.500.000						LP	1.870.000	2.840.000	3.800.000	5.700.000	8.500.000
KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	KK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	ribu ha	7	12	12	12	12	Ha	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000						LP	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000
	Kontribusi tidak langsung:																								-	-	-	-	-
KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah		Ha	146.806	590.872	941.637	1.292.402	1.643.167																		-	-	-	-	-
KP 02.10.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara	• IKK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan	Ha	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700	%	90,5	91	91,5	92	92,5	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223						PSP	1.230.200	1.293.719	1.360.292	1.430.074	1.503.223
KP 02.10.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan	• IKK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan	Ha	28.568	309.179	1.072.532	1.835.886	2.599.240	%	90,5	91	91,5	92	92,5	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402						PSP	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402	4.219.402
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	• IKK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan	Ha	10.930	38.435	86.660	134.886	183.111	%	90	90,5	91	91,5	92	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864						PSP	692.551	1.198.864	1.198.864	1.198.864	1.198.864
KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	• IKK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan	Ha	9.048	10.857	14.114	19.760	29.640	%	93	93	94	94	95	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908						psp	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua		Ha	189	539	889	1.239	1.589																		-	-	-	-	-
KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan		Ha	0	665.000	1.330.000	1.900.000	1.900.000																		-	-	-	-	-
	RAG.005 - Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan untuk lumbung pangan	unit	12.249	12.249	12.249	12.249	12.249																		-	-	-	-	-
	RAG.006 - Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan	unit																							-	-	-	-	-
	RAG.005 - Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan untuk lumbung pangan	unit	34.567	34.567	34.567	34.567	172.837																		-	-	-	-	-
	RAG.006 - Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan	unit	50.076	50.076	50.076	50.076	50.076																		-	-	-	-	-
	QAA.001 - Layanan verifikasi																												

Matriks Pendanaan Anggaran TA 2025-2029																													
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target RPJMN					Satuan	Target Renstra 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELON I	Total (dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
KP 02.10.10 Produksi:	KP 2.1 % produksi peternakan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal peternakan dalam negeri:						%	77,42	78,32	79,18	80,19	81,33	2.967.053	3.549.038	4.261.946	3.731.597	3.817.199	51.120.875	83.139.322	102.233.250	19.102.428	-	PKH	54.087.928	86.688.360	106.495.196	22.833.995	3.817.199	
- Daging (Sapi dan kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik)	- Daging Sapi dan Kerbau	Juta Ton	4,96	5,1	5,25	5,41	5,56																PKH	-	-	-	-	-	
- Telur	- Daging Ayam Ras	Juta Ton	7,43	7,75	8,04	8,43	8,79																	-	-	-	-	-	
- Susu	- Daging Kambing/Domba	Ribu Ton	855,57	866,43	877,53	888,85	900,4																	-	-	-	-	-	
	- Telur Ayam Ras																							-	-	-	-	-	
	- Susu Sapi							Ha	180	360	540	720	900											-	-	-	-	-	
	QEG.001 Bantuan Hijauan Pakan Ternak							ton	21.268	1.711.413	2.055.325	2.389.968	5.143.215											-	-	-	-	-	
	QEG.002 Bantuan pakan olahan/bahan pakan							Ha	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339											-	-	-	-	-	
	RAG.003 Sarana pakan hijauan di UPT							unit	-	35	35	35	35											-	-	-	-	-	
	RAG.004 Sarana pakan/bahan pakan							kegiatan	1	1	1	1	1											-	-	-	-	-	
	AEA.001 Supervisi, monitoring, dan evaluasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan							NSPK	2	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	AFA.001 NSPK bidang pakan/bahan pakan							rekomendasi kebijakan	-	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	ABR.001 Kebijakan bidang pakan/bahan pakan							orang	-	150	210	300	360											-	-	-	-	-	
	QDC.001 Fasilitas dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan							produk	3.400	5.000	6.000	7.000	8.000											-	-	-	-	-	
	QJA.001 Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan							unit	5	5	5	5	5											-	-	-	-	-	
	RAG.005 Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan							Kegiatan	5	5	5	5	5											-	-	-	-	-	
	AEA.002 Supervisi, monitoring, dan evaluasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan							rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1											-	-	-	-	-	
	ABR.002 Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan							NSPK	2	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	AFA.002 NSPK penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan							orang	10	15	15	20	20											-	-	-	-	-	
	QDC.002 Fasilitas dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan							Kegiatan	2	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	AEA.001 Supervisi, monitoring, dan evaluasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan							Kegiatan	2	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	AEA.002 Supervisi, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri							Kegiatan	10	10	10	10	10											-	-	-	-	-	
	AFA.001 NSPK bidang pakan/bahan pakan							NSPK	2	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	ABR.001 Kebijakan bidang pakan/bahan pakan							rekomendasi kebijakan	-	2	2	2	2											-	-	-	-	-	
	FBA.001 Fasilitas dan pembinaan Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri							Provinsi	11	11	11	11	11											-	-	-	-	-	
	QAH.001 Layanan Optimalisasi Reproduksi							Layanan	-	2.500.000	2.750.000	2.750.000	3.000.000											-	-	-	-	-	
	QAH.002 Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak							Layanan	-	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.900.000											-	-	-	-	-	
	RAG.006 Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak							Unit	-	100.000	100.000	100.000	100.000											-	-	-	-	-	
	AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak							NSPK	7	10	10	10	10											-	-	-	-	-	
	AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak							Kegiatan	7	7	7	7	7											-	-	-	-	-	
	AEA.002 Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah							Kegiatan	-	38	38	38	38											-	-	-	-	-	
	QDD.001 Fasilitas dan pembinaan penguatan uji zurat sapi perah untuk kelompok peternak							Kelompok Masyarakat	-	25	25	25	25											-	-	-	-	-	
	QDD.002 Fasilitas dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak							Kelompok Masyarakat	-	13	13	13	13											-	-	-	-	-	
									-															-	-	-	-	-	
KP 02.10.11 Produksi:	KP 1.1 % produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri:						%	68,39%	68,68%	68,98%	69,27%	69,57%	2.244.626	2.257.521	2.402.732	2.558.292	2.723.528						TP	2.244.626	2.257.521	2.402.732	2.558.292	2.723.528	
	KK 1.1 Rata-Rata produktivitas komoditas tanaman serealia prioritas						Ku'ha	58,79	59,15	59,47	59,81	60,17	1.963.101	1.489.414	1.577.057	1.669.174	1.765.104							1.963.101	1.489.414	1.577.057	1.669.174	1.765.104	
	KK 3.1 Jumlah luas panen komoditas tanaman serealia prioritas						Hektar	12.914.345	13.032.453	13.223.964	13.427.610	13.619.423	1.963.101	1.489.414	1.577.057	1.669.174	1.765.104							1.963.101	1.489.414	1.577.057	1.669.174	1.765.104	
- Padi	- Padi	Juta Ton	54,45	54,85	55,27	55,68	56,05		101,33%	101,82%	102,32%	102,82%	103,32%											-	-	-	-	-	
- Jagung	- Jagung	Juta Ton	21	23	24	25	26		106,09%	106,97%	107,87%	108,77%	109,67%											-	-	-	-	-	
- Aneka Kacang	- Kedelai	Ribu Ton	540	553	566	579	592		8,46%	8,50%	8,54%	8,58%	8,62%											-	-	-	-	-	
- Sorgum	- Ubi Kayu	Ribu Ton	18,21	18,4	18,58	18,77	18,95		103,81%	103,89%	103,96%	104,03%	104,11%											-	-	-	-	-	
- Ubi jalar	- Ubi jalar	Ton	1.517.449	1.562.072	1.609.861	1.658.157	1.707.902		106,26%	106,27%	106,28%	106,30%	106,31%											-	-	-	-	-	
- Kedelai	- Kacang tanah	Ton	370.359	381.470	392.914	404.701	416.842		52,61%	53,14%	53,67%	54,21%	54,78%											-	-	-	-	-	
	- Kacang hijau								68,56%	68,86%	69,17%	69,48%	69,78%											-	-	-	-	-	
	- Sorgum								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											-	-	-	-	-	
	Kawasan Padi								1550000	2434710	2646710	2880610	3137900	1.500.085	1.500.085	1.500.085	1.500.085	1.500.085						1.500.085	1.500.085	1.500.085	1.500.085	1.500.085	
	Kawasan Jagung								300000	1000000	1000000	1000000	1000000	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400						275.400	275.400	275.400	275.400	275.400	
	Kawasan Sorgum							Ha	500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	4.725	4.725	4.725	4.725						-	4.725	4.725	4.725	4.725	
	Kawasan Kedelai							Ha	115	50.000	50.000	50.000	50.000	-	62.805.000	62.805.000	62.805.000	62.805.000						-	62.805.000	62.805.000	62.805.000	62.805.000	
	Kawasan Ubi Kayu							Ha	0	1.428	1.428	1.428	1.428	-	2.100	2.100	2.100	2.100						-	2.100	2.100	2.100	2.100	
	Kawasan Ubi Jalar							Ha	1500	2.778	2.778	2.778	2.778	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579						4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	
	Kawasan Kacang Tanah							Ha	0	1.302	1.302	1.302	1.302	-	5.490	5.654	5.824	5.999						-	5.490	5.654	5.824	5.999	
	Kawasan Kacang Hijau							Ha	0	6.349	6.349	6.349	6.349	-	1.125	1.159	1.194	1.229						-	1.125	1.159	1.194	1.229	
	Pekarangan Ubi Jalar								1.500	1.736	1.736	1.736	1.736	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	
	001 - Pekarangan Ubi jalar							Kelompok masyarakat	1500	6000	12000	24000	40808	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	

Matriks Pendanaan Anggaran TA 2025-2029																														
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target RPJMN					Satuan	Target Renstra 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELON I	Total (dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur	IKP 2.1 % produksi hortikultura terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian hortikultura dalam negeri	Juta Ton	30,66	31,85	33,04	34,25	35,47		91	91,12	91,28	91,45	91,58	432.308	675.652	818.631	960.160	1.097.660						Horti	432.308	675.652	818.631	960.160	1.097.660	
	IKK 2.1 Rata-rata luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas	Ton	529523,45	532171,06	534831,92	537506,08	540193,61	Ha	71.792	72,37	72,948	73,502	74,074	286.100	320.100	332.100	344.100	363.100							286.100	320.100	332.100	344.100	363.100	
	Rata-rata produktivitas komoditas buah prioritas								65,4	66,71	70,4	71,71	75,4	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595							1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	
	Rata-rata luas panen komoditas buah prioritas								93,143	93,787	93,998	94,666	94,933	34.820	85.070	85.070	97.070	97.070							34.820	85.070	85.070	97.070	97.070	
																									-	-	-	-	-	
KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	IKK 2.1Jumlah komoditas serealita terfortifikasi	komoditas	3	3	3	4	4	Komoditas	1	1	1	1	1		81.500	81.500	81.500	81.500						TP	-	81.500	81.500	81.500	81.500	
	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan							-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000											pkh	-	-	-	-	-	
	625 - Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)							-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	40.750	40.750	40.750	40.750							-	40.750	40.750	40.750	40.750	
																									-	-	-	-	-	
KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	IKK2.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	%	100	100	100	100	100		80	85	90	95	100	396	780	936	1.123	1.348							396	780	936	1.123	1.348	
	QIC 001 Pengawasan penerapan jaminan mutu pada unit usaha produk hewan							Lembaga	-	1	2	2	2												-	-	-	-	-	
																									-	-	-	-	-	
	QDB 001 Pembinaan penjaminan mutu produk hasil peternakan pada unit usaha produk hewan							Lembaga	1	1	1	1	1												-	-	-	-	-	
	QIC 001 Pengujian Penerapan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hewan							lembaga	1	0	0	0	0												-	-	-	-	-	
																									-	-	-	-	-	
																									-	-	-	-	-	
																									-	-	-	-	-	
KP 02.10.13 Persentase wilayahkawasan terkendali dari penyakit hewan	IKP 8.1 Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus bebas atau terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan keseluruhan	%	70	75	80	85	90	%	80	80,3	80,6	80,9	81,2	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721						pkh	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721	
	AFA.007 NSPK pelaporan dan deteksi dini potensi wabah penyakit hewan							NSPK	1	1	1	1	1												-	-	-	-	-	
	AFA.008 NSPK respon potensi wabah penyakit hewan							NSPK	1	1	1	1	1												-	-	-	-	-	
	AEA.005 koordinasi deteksi dini potensi wabah penyakit hewan							Laporan	2	2	2	2	2												-	-	-	-	-	
	AEA.006 Koordinasi respon potensi wabah penyakit hewan							Laporan	1	1	1	1	1												-	-	-	-	-	
	QAH.005 Layanan untuk deteksi dini potensi wabah penyakit hewan							Layanan	0	11	11	11	11												-	-	-	-	-	
	QAH.006 Layanan untuk respon potensi wabah penyakit hewan							Layanan	0	9	9	9	9												-	-	-	-	-	
	QAH.007 Layanan untuk Pemberantasan penyakit hewan							Layanan	0	6425000	6425000	6425000	6425000												-	-	-	-	-	
	QAH.008 Layanan surveilans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan							Layanan	0	11	11	11	11												-	-	-	-	-	
	AFA.009 NSPK Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan							NSPK	1	1	1	1	1												-	-	-	-	-	
	AEA.007 Koordinasi Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan							Laporan	1	1	1	1	1												-	-	-	-	-	
	QAH.009 Layanan unit pelayanan kesehatan hewan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan							Layanan	0	30	38	20	20												-	-	-	-	-	
	QAH.010 Layanan Penyidikan Penyakit dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan							Layanan	0	1500	1500	1500	1500												-	-	-	-	-	
KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	IO.1 Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan pembinaan	Lembaga	125	130	135	140	145		36.493	36.493	36.493	36.493	36.493	33.888	965.554	1.027.442	1.107.714	1.208.055						BPPSDMP	33.888	965.554	1.027.442	1.107.714	1.208.055	
				33	33	33	33																		BPPSDMP	-	-	-	-	-
			5.829	5.829	5.829	5.829	5.829																		-	-	-	-	-	
KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani	IKK 2.2 % petani muda terhadap total petani* (data dari: Simluhan)	%	22,03	22,13	22,23	22,33	22,43		22,03	22,13	22,23	22,33	22,43	64.686	165.244	181.154	208.179	256.051						BPPSDMP	64.686	165.244	181.154	208.179	256.051	
																									-	-	-	-	-	
KP 02.10.17 Produksi Tanaman obat	Rata-rata produktivitas komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas	Ton	529523,45	532171,06	534831,92	537506,08	540193,61	Ha	26,93	27,06	27,2	27,34	27,48	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700							43.700	45.700	45.700	45.700	45.700	
																									-	-	-	-	-	
KP 02.10.17 Produksi Florikultura	IKK 5.1 Persentase produksi komoditas florikultura siap ekspor terhadap kebutuhan produksi untuk ekspor	Ribu Tangkai	597622,499	597459,16	597.295,82	597132,48	596969,14	%	100	100	100	100	100	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985							2.985	2.985	2.985	2.985	2.985	
																									-	-	-	-	-	
KP 02.10.17 Produksi Vanili, Lada, Pala, Cengkeh, Kopi, Tebu, Karet, Kakao, Teh	IKP 9.1 Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri (Lada, Pala, Cengkeh, Vanili, Kopi, Kakao, Karet, Jambu Mela, Tebu, The, Tembakau, Kapas, Nilam, Serai Wangi), Kelapa Sawit, Kelapa, Sagu, Aren, Pinang)								88%	88%	88%	89%	91%	1.851.863	2.846.689	1.506.479	1.180.603	1.197.000	7.305.000	7.305.000	7.350.000	7.425.000	7.500.000	PERKEBUNAN	9.156.863	10.151.689	8.856.479	8.605.603	8.697.000	
KP 05.01.(06,08) Produktivitas kelapa, Produktivitas Sagu	IKK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma prioritas menuju swasembada (Kelapa Sawit, Kelapa, Sagu, Aren, Pinang) (Ton/Ha)								5,26	5,26	5,27	5,28	5,30	121.210	630.612	372.831	321.949	328.260	7.305.000	7.305.000	7.350.000	7.425.000	7.500.000		7.426.210	7.935.612	7.722.831	7.746.949	7.828.260	
KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu	IKP 2.1 Persentase produksi tanaman pangan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal pertanian tanaman pangan dalam negeri (salah satunya Ubi Kayu)																								-	-	-	-	-	

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN TA 2025-2029																													
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target RPJMN					Satuan	Target Renstra 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELON I	Total (dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu	KK 1.1 Rata-rata produktivitas komoditas tanaman aneka kacang dan umbi prioritas menuju swasembada (salah satunya Ubi Kayu)	Ton/Hektar	27,81	28,25	28,69	29,12	29,56	Kuha	152,3	153,07	153,8	154,48	155,14	281.525	768.107	825.675	889.118	958.424						TP	281.525	768.107	825.675	889.118	958.424
	KK 2.1 luas panen komoditas tanaman aneka kacang dan umbi prioritas	Hektar							1.221.965	1.233.003	1.244.170	1.255.467	1.266.895	281.525	768.107	825.675	889.118	958.424							281.525	768.107	825.675	889.118	958.424
																									-	-	-	-	-
KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan	Kontribusi tidak langsung: KP 6.1 Rata-rata volume ekspor komoditas Perkebunan (ribu ton)	Persen	2	2	2	2	3	ribu ton	2.124	2.134	2.145	2.156	2.166	1.100	1.100	1.600	2.100	2.500						PERKEBUNAN	1.100	1.100	1.600	2.100	2.500
KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura	KP 6.1 volume ekspor komoditas Hortikultura	Persen	1,36	1,77	2,35	2,65	3,04	Ribu Ton	464	465	466	467	468	630.798	330.798	430.798	700.798	161.098						HORTI	630.798	330.798	430.798	700.798	161.098
KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan		3	3,1	3,2	3,3	3,4		0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	3.990	4.411	4.849	5.381	5.941							3.990	4.411	4.849	5.381	5.941
	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura							Nilai	0,8	0,82	0,85	0,87	0,9	1.750.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.785.000							1.750.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.785.000
	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan								0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	16.078	16.116	17.576	18.836	19.896							16.078	16.116	17.576	18.836	19.896
	SP 3, IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas Peternakan								0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	396	780	936	1.123	1.348							396	780	936	1.123	1.348
KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	KK 1.1 Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	%	11	11,5	12	12,5	13	%	11	11,5	12	12,5	13	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000						LIP	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	KK 1.2 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	75	78	81	84	87	%	75	77	80	85	87	21.018	22.018	22.236	22.454	22.672						LIP	21.018	22.018	22.236	22.454	22.672
		%	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55																		-	-	-	-	-
KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	PDC.001 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (kelompok masyarakat)								24	23	23	23	23	3.008	4.389	4.585	4.838	5.054	-	-	-	-	-	PERKEBUNAN	3.008	4.389	4.585	4.838	5.054
KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IKSK 2 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyediaan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan (%)	varietas dan/vatau galur	30	30	30	30	30		-	20	20	20	20	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	-	-	-	-	-	BRMP	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431
	IKSK3. Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyediaan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura (%)								-	20	20	20	20	5.625	5.906	6.202	6.512	6.837	-	-	-	-	-	BRMP	5.625	5.906	6.202	6.512	6.837
	IKSK4. Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyediaan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan (%)								-	20	20	20	20	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	-	-	-	-	-	BRMP	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431
KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	IKK 1.1 Persentase ketersediaan SDG hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya	aksesi	4.700	4.725	4.750	4.775	4.800	%	95,5	96	97	98	99	2.649.610	481.818	1.162.452	601.684	649.557						PKH	2.649.610	481.818	1.162.452	601.684	649.557
	KK1. Persentase ketersediaan SDG tanaman pertanian tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya (%)							%	99,21	100	100	100	100	12.200	12.810	13.451	14.123	14.829	-	-	-	-	-	BRMP	12.200	12.810	13.451	14.123	14.829
KP 02.15.02 Persentase penurunan susut pangan	IKP 11.1 Indeks penurunan susut pertanian pasca panen	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	Indeks (0-10)	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000						PSP	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	IKK 2.1 Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	Kab/kota	100	200	300	400	514	Indeks	0,60	0,64	0,67	0,71	0,74	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721						PKH	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721
	IKK 2.2 Persentase kab/kota yang mampu menekan kasus rabies pada hewan							%	53	56	59	62	65	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721						PKH	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721
																								PKH	-	-	-	-	-
	QAH.007 Layanan untuk Pemberantasan penyakit hewan							Layanan	0	6.425.000	6.425.000	6.425.000	6.425.000												-	-	-	-	-
	QAH.008 Layanan surveilans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan							Layanan	0	11	11	11	11												-	-	-	-	-
KP 02.10.18 - Indeks Kepatuhan terhadap Standard dan Regulasi Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	KP 6.1 Indeks Keamanan komoditas peternakan							Indeks	61,3	63,4	65,6	67,8	69,5	28.128	43.181	49.088	55.698	63.399						PKH	28.128	43.181	49.088	55.698	63.399
	IKP 16.1 Indeks Mutu komoditas peternakan							Indeks	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	396	780	936	1.123	1.348						PKH	396	780	936	1.123	1.348
	QIC.001 Pengawasan unit usaha produk hewan dan unit penanganan hewan	Lembaga	39	39	39	39	39		39	39	39	39	39											PKH	-	-	-	-	-
	QJA.001 Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan	Produk	37915	65792	72802	79890	87721																		-	-	-	-	-
	IKP 16.1 Indeks Mutu komoditas peternakan							Indeks	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	396	780	936	1.123	1.348						PKH	396	780	936	1.123	1.348
																								PKH	-	-	-	-	-
																								PKH	-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-	-	-
																									-	-	-		

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN TA 2025-2029																													
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target RPJMN					Satuan	Target Renstra 2025-2029					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah)					ESELON I	Total (dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	Indikator ini tetap tidak diturunkan menjadi IKSS, karena:																								-	-	-	-	-
	- Potensi kerugian ekonomi melibatkan berbagai sektor pembangunan, tidak hanya pertanian & idealnya menjadi indikator Kemenko Pangan	Persen	0,091	0,187	0,276	0,36	0,439																		-	-	-	-	-
	- Indikator ini jauh berada diluar Tusi dan Kewenangan Kementerian Pertanian sesuai Perpres 192/2024																								-	-	-	-	-
	Namun Kementerian Pertanian tetap berkontribusi secara tidak langsung melalui:																								-	-	-	-	-
	- SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI							88,19	88,44	88,68	88,93	89,18	136	149	163	179	196						TP	136	149	163	179	196	
	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan							7077	7077	7077	7077	7077	23.389	23.389	23.389	23.389	23.389						TP	23.389	23.389	23.389	23.389	23.389	
	Areal Penanganan DPI							20000	20000	20000	20000	20000	1.200	1.260	1.323	1.389	1.459							1.200	1.260	1.323	1.389	1.459	
	- SK.1, IKK. 1.1 Persentase informasi hasil peramalan yang dimanfaatkan OPT							32	56	74	88	100												-	-	-	-	-	
	Data dan informasi Publik							50	52	54	56	56	2.500	9.765	10.230	10.695	10.695							2.500	9.765	10.230	10.695	10.695	
	- SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah hortikultura yang terkendali terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terserang OPT							%	95	95,5	96	96,5	97	27.110	40.702	45.132	50.110	68.110							27.110	40.702	45.132	50.110	68.110
- SK.1, IKK. 1.1 Persentase area/ wilayah hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI							%	90	90,5	91	91,5	92												27.110	40.702	45.132	50.110	68.110	
- SK.1, IKK 1.2 Persentase area/ wilayah perkebunan yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terkena DPI								40	41	41	42	42	11.999	16.539	16.735	17.338	17.554							11.999	16.539	16.735	17.338	17.554	
IKK2 Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan							indeks	0,6	0,64	0,67	0,71	0,74	1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721							1.625	1.427.296	1.433.271	1.401.346	1.401.721	

Lampiran 3: Matrik Kerangka Regulasi

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
1	RUU tentang Perubahan UU 16/2006 tentang SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan)	Uke I: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan Pertanian Uke II: Pusat Penyuluhan Pertanian	Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyuluhan pertanian dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga diperlukan pengaturan yang lebih holistik dan sistemik. Muatan Substansi Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu bentuk kelembagaan penyuluh secara spesifik sudah ditetapkan pada tiap tingkatan pemerintahan: a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di tingkat Pusat; b. Badan Koordinasi Penyuluhan di Tingkat Provinsi; c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; dan d. Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18	1. Penataan pengelolaan Penyuluhan Pertanian, (Kelembagaan dan Ketenagaan) untuk mendukung pewujudan swasembada pangan. 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian memperkuat pengembangan pertanian untuk semakin adaptif, maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan, kelayakan dan kemandirian pangan. 3. Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal	a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). b. Kementerian Dalam Negeri. c. Kementerian Hukum. d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. e. Badan Kepegawaian Negara. f. Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian. g. Komisi Penyuluhan Pertanian.	1. Penyusunan Kajian dan Naskah Akademik Tahun 2025 2. Penyusunan Draf dan Rapat PAK Tahun 2026 3. Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2027 4. Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2028	

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
			Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan perangkat daerah (tatacara, jenis dan kriteria tipologi perangkat daerah), yang mengakibatkan berubahnya kelembagaan Penyuluhan pertanian pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menjadikan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menjadi tidak efektif.				

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan)	Kementerian Pertanian (BPPSDMP)	Dengan dialihkannya Penyuluh Pertanian ASN dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Penyuluh Pertanian di Kementerian Pertanian diperlukan pengaturan yang komprehensif dengan melakukan penambahan urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian (Suburusan Penyuluhan Pertanian) yang belum tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut penambahan urusan konkuren ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.	1. Menyelaraskan dengan Pengaturan pada Undang-Undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Substansi pada Rancangan Perpres memuat pembagian Suburusan Penyuluhan Pertanian pada Aspek Kebijakan, Aspek Ketenagaan, Aspek Kelembagaan, dan Sasaran Penyuluhan Pertanian. 3. Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan	1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6. Badan Kepegawaian Negara 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Pembentukan Panitia Antar Kementerian 7 Maret 2025 2. Pembahasan Draft oleh Panitia Antar Kementerian (Maret sd September) 3. Harmonisasi (Oktober) 4. Penetapan (November)	

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
				Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal			

3	Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan /non-pemrakarsa) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan)	Diversifikasi Pengaturan Hewan/Ternak/ Unggas Memberikan kepastian hukum dalam rangka diversifikasi sumber negara produsen sapi manakala Indonesia terjadi keadaan dalam hal tertentu (akibat bencana, perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga) serta membatasi dominasi suatu negara eksportir sapi. Selain itu memberikan kesempatan yang sama bagi bagi Pelaku Usaha Lainnya dalam melakukan pemasukan/ importasi ternak ke Indonesia. Pelibatan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak diharapkan dapat mengakselerasi penambahan populasi dan kecukupan produk hewan, di samping dampak positif dari kebijakan dan regulasi yang membuka alternatif pasokan ternak dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit hewan karantina dengan dilakukan tindakan karantina pengamanan maksimal. Penguatan hilirisasi peternakan Pentingnya penguatan hilirisasi peternakan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang ekonomi baru bagi Masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak dan mendukung ketahanan pangan	Regulasi ini akan mendukung PP No.5/2025 tentang Perubahan Kedua PP No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, PP No. 29/2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pepres No. 66/2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional, PP No. 25/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, PP No.3/2017 tentang Otoritas Veteriner jo PP No.34/2024.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Karantina Indonesia, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Kementerian Perdagangan, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia.	2026: Penyusunan Kajian/NA 2027-2028: tahap penyusunan RUU (penyusunan DIM, Rapat PAK, Harmonisasi, dan partisipasi publik (sosialisasi, FGD, dan lokakarya) 2028: diusulkan sebagai Prolegnas Prioritas..	

		nasional. Hilirisasi peternakan dilakukan dengan menghasilkan produk akhir bernilai tambah, seperti daging, susu, dan produk olahan lainnya. Penguatan Otoritas Veteriner antara lain Dengan Membentuk VSB VSB merupakan salah satu upaya untuk menguatkan otoritas veteriner di Indonesia guna melindungi hewan, tumbuhan, dan Masyarakat dari risiko tersebarnya penyakit hewan menular. One Health Pentingnya one health dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan yakni untuk mengatasi potensi penyebaran penyakit hewan dari hewan ke manusia atau dari hewan ke hewan serta mendukung Pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Profesi Bidang Peternakan Dalam penyelenggaraan peternakan bahwa profesi-profesi di bidang peternakan terlibat dalam berbagai aspek penyelenggaraan peternakan, mulai dari pemeliharaan, pembiakan, hingga pemasaran. Kolaborasi lintas profesi di bidang peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan hewan			

			dan mendorong kemajuan peternakan nasional.				
4	RPerpres tentang Percepatan	Direktorat Jenderal	Peningkatan populasi & produksi dalam rangka mendukung Makan	Untuk mendukung strategi P2SDN perlu dukungan pembiayaan,	Kementerian Koordinator Bidang	Thn 2025: Draft RPerpres,	

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
	Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)	Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan /non-pemrakarsa) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan)	Bergizi dan menciptakan lapangan pekerjaan.	jaminan lahan, infrastruktur, jaminan pasar, pembiayaan, perkarantinaaan, dan perizinan dari kementerian/lembaga sehingga swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Presiden terwujud.	Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bank Tanah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perdagangan.	Partisipasi Publik (sosialisasi, FGD, dan lokakarya)	*masih dintern Kementan, dan 2026 akan diusulkan masuk dalam Progsun Perpres

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
5	Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.	Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kakao, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kakao; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. BRIN; 6. Perusahaan Perkebunan kakao; 7. Pekebun kakao.	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.	
6	Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan,	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.	Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kelapa, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa;	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.	

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
	Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa			penyediaan infrastruktur yang memadai.	2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Koordinator Bidang Pangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. BRIN; 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa; 7. Pekebun Kelapa.		
7	RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian (cq Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	mewujudkan swasembada pangan dengan menetapkan KP2B dan LP2B melalui pengecualian lahan baku sawah/lahan sawah produktif untuk dialihfungsikan oleh PSN atau kepentingan umum.	pengendalian alih fungsi lahan serta penetapan LBS non KP2B dan LP2B menjadi LBS peruntukkan KP2b dan LP2B. koordinasi dengan K/L untuk dukungan penetapan LBS dan pengendalian alih fungsi lahan serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah	Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian ATR/BPR, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2026-2029	dalam kajian
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi	Kementerian PU	1. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah; 2. pengaturan air irigasi; 3. Pembentukan UPT Irigasi Pertanian; 4. tata cara persetujuan pemanfaatan irigasi; dan	1. mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan 2. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah 3. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2025-2026, draft telah siap harmonisasi, namun terdapat perubahan organisasi kementerian masing-masing berdasarkan	partisipatif berkaitan dengan kewenangan irigasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
			5. pembinaan P3A 6. pelaksanaan pengelolaan aset 7. pengawasan pengembangan 8. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier	Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pusat dilakukan oleh Menteri PU paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku		Perpres, draft dikembalikan oleh Kementerian Hukum untuk dikaji kembali	
9	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT. 140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian	1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan; 2. Evaluasi terhadap tata cara alih fungsi LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan 3. Peningkatan Pengawasan LP2B.	mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2025, telah ditetapkan dalam prolegtan 2025 melalui Permentan No 22/Kpts /HK.140/M/01/2025.	
10	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT. 140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian	1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan; 2. Evaluasi terhadap tata cara penetapan LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan 3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Nasional; 4. mekanisme insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2026, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebijakan dan berkas public hearing	

No	Judul Kerangka Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Keterkaitan	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan	Keterangan
	Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan						
11	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT. 140/12/ /2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian	1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan; 2. evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan jaringan irigasi tingkat usaha tani	mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan penyesuaian kewenangan Kementan dalam bidang irigasi	Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota	2027, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebijakan dan berkas public hearing	

Lampiran 4. Manajemen Resiko

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Anjloknya harga produk pertanian	Kurangnya sistem penyangga harga (Bulog)	Koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk penguatan mekanisme penyerapan dan penetapan harga dasar komoditas pertanian.	Kementan, Bulog, Kementerian Perdagangan, Bapanas
					Overproduksi	Pengaturan pola tanam dan distribusi produks	Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan
2				Kenaikan harga input produksi	Kenaikan harga bahan baku global	Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida)	Kementan, Kemenkeu
4			Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	Terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian	Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan teknologi	Penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian untuk memperkenalkan dan meningkatkan adopsi teknologi tepat guna	BPPSDMP, BRIN

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
				Terbatasnya akses petani terhadap inovasi pertanian	Kurangnya diseminasi hasil riset dan inovasi dari lembaga penelitian ke tingkat petani.	Koordinasi dan kemitraan strategis dengan BRIN untuk sinkronisasi hasil riset dan inovasi pertanian dengan program Kementan.	BPPSDMP, BRIN
5				Perubahan iklim ekstrem	Perubahan pola curah hujan dan suhu yang memengaruhi musim tanam.	Penyusunan kalender tanam adaptif berbasis prakiraan cuaca (kerja sama BMKG).	Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan
				Serangan organisme pengganggu tumbuhan/hewan	Kelemahan dalam sistem deteksi dini dan pengendalian hama/penyakit.	Penguatan sistem monitoring dan deteksi dini OPT/OPH., Pelatihan petani dalam pengendalian hama terpadu (PHT).	Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan, BRMP
6				Kenaikan harga input produksi	Kenaikan harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global	Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida)	Kementan, Kemenkeu
				Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan, dan pemerataan infrastruktur pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan jalan usaha tani.	Ditjen PSP, LIP, Kementerian PU

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
				Degradasi dan konversi lahan	Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), program konservasi tanah dan air, penegakan regulasi terkait alih fungsi lahan.	Kementan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, KLH
7		Meningkatnya cadangan pangan nasional	Persentase Peningkatan cadangan pangan	Tidak adanya sinkronisasi kegiatan antara K/L/D di wilayah KSPP	Belum adanya rencana induk yang baru untuk KSPP Kalimantan Tengah	Menyusun dan mengesahkan Renduk KSPP Kalimantan Tengah serta perauran turunan dari Renduk tsb.	Bappenas, Kementan
8				Kesulitan petani dalam menjangkau pasar	Infrastruktur jalan banyak yang rusak dan kurang pemeliharaan,	perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah KSPP	Kementerian PU, Kementan
					Belum ada tata kelola penyimpanan dan distribusi dari pemerintah	Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk pengembangan rantai pasok hasil pertanian	Bulog, ID Food
9				Adanya penolakan masyarakat	Ketidakpercayaan masyarakat tentang tujuan program	Pelibatan Masyarakat lokal dalam perencanaan dan pembangunan	Pemerintah Daerah
				Lahan tidak bisa dikelola	Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Pembangunan jaringan irigasi yang terintegrasi	Kementan, Kementerian PU

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
					Kurang/tidak ada SDM (kualitas --> petani tidak terbiasa menanam padi dan kuantitas)	Pelatihan teknis budidaya padi, Pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL)	BPPSDMP Kementan
				Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dilaksanakan di luar wilayah pengembangan KSPP	Belum adanya kriteria pemilihan indikasi lokasi dalam kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, yang spesifik ke wilayah KSPP	Mengajukan revisi terhadap SE Bappenas terkait Pedoman Umum Inpres 2 Tahun 2025 untuk lebih spesifik dalam penetapan kriteria indikasi lokasi	Kementerian PU, Bappenas, Kementan

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
				Keterlambatan serah terima lahan/pembukaan lahan untuk proses Land Clearing	Pemda terlambat menyediakan lahan; Proses pelepasan kawasan hutan tidak tepat waktu karena data persyaratan belum lengkap; Bukti Legalitas lahan belum lengkap	Koordinasi intensif dengan pihak pemberi lahan dan instansi terkait sejak tahap perencanaan.	Kementan, Kemenhut, Pemda, Kementerian ATR/BPN
11				Keterbatasan akses pasar dan informasi ekspor	Terbatasnya jejaring kemitraan dengan pelaku ekspor dan buyer internasional	Memperluas jejaring kerja sama dengan buyer dan agregator ekspor	Dit.Hilirisasi lingkup Kementan
12		Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	Market share produk ekspor pertanian (%)	Belum meratanya penerapan standar mutu dan keamanan pangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/petani terhadap standar mutu dan keamanan pangan	Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi standar mutu	Dit.Hilirisasi lingkup Kementan
13				Kapasitas produksi berstandar ekspor yang belum stabil	ketersediaan bahan baku berfluktuasi	Mengembangkan kemitraan antara petani dan industri pengolahan	Kementan
					Keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan	Meningkatkan adopsi teknologi produksi modern	Kementan, Kementerian Perindustrian, BRIN

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
14		Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Ketersediaan bahan baku yang tidak konsisten	Musim tanam/panen yang tidak seragam	Pengembangan sistem rantai pasok terintegrasi	Ditjen TP, Hortikultura, Perkebunan, PKH
15				Rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan dan pascapanen	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha	Pelatihan dan pendampingan teknologi pengolahan	BPPSDMP, Dit Hilirisasi lingkup Kementan
16				Terbatasnya infrastruktur pendukung hilirisasi	Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur (jalan, listrik, air)	Ditjen PSP, Ditjen LIP, Kementerian PU
17		Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	Perubahan iklim ekstrem dan serangan hama penyakit	curah hujan tidak menentu, gelombang panas, kekeringan, banjir	Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tahan iklim dan hama (varietas unggul tahan panas, tahan penyakit)	Dit Perlindungan lingkup Kementan, BRMP, BRIN
18				Keterbatasan fasilitas pengolahan bahan baku bio energi	Investasi infrastruktur pengolahan yang renda	Mendorong investasi dan kemitraan untuk pengembangan fasilitas pengolahan bio energi	Dit Hilirisasi lingkup Kementan
19		Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan	Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner	Lemahnya pengawasan dan sistem deteksi dini di wilayah sentra	Ketidaksesuaian kebijakan atau belum sinkronnya regulasi lintas sektor	Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi lintas sektor terkait kesehatan hewan, energi, pertanian, dan lingkungan.	Ditjen PKP

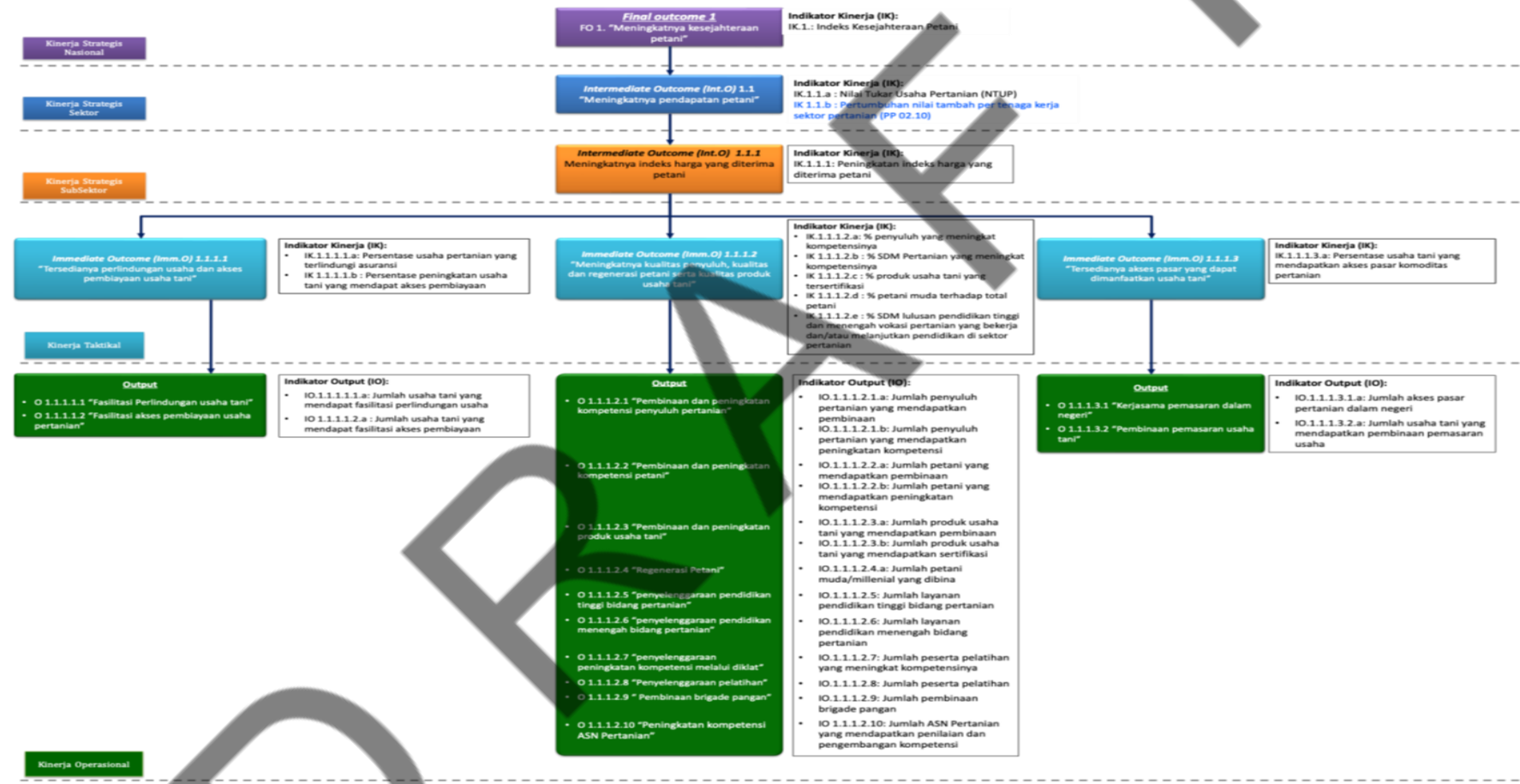
No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
		penyakit akibat hewan dan produk hewan		peternakan dan distribusi produk hewan	(energi, pertanian, dan lingkungan).		
20					Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan serta fasilitas laboratorium veteriner.	Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan.	Ditjen PKH, Pemda
21					Perubahan iklim yang memicu munculnya vektor atau pola penyebaran penyakit baru.	Penerapan sistem pemantauan dan deteksi dini penyakit hewan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Ditjen PKH
22					Minimnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi.	Kampanye dan sosialisasi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi.	Ditjen PKH

No	Jenis Konteks (pilih akan diisi)	Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis)	Indikator (Indikator SS)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	PJ
23		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Kegiatan pengawasan tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan anggaran	Keterbatasan SDM auditor yang berkompeten dan tersertifikasi	Membangun sistem pengawasan terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi penyimpangan secara real-time.	Inspektorat Jenderal
25				Lemahnya keamanan siber	Minimnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keamanan siber	Penguatan kapasitas SDM khususnya di bidang keamanan siber melalui pelatihan teknis dan sertifikasi profesional.	Pusdatin
26				Ketidaktertiban dan inefisiensi dalam pengelolaan aset	Lemahnya koordinasi antara unit kerja pemilik aset dan pengelola aset pusat	Menyusun dan menerapkan prosedur pengelolaan aset yang tertib dan efisien, serta rutin melakukan audit aset.	Biro KBMN

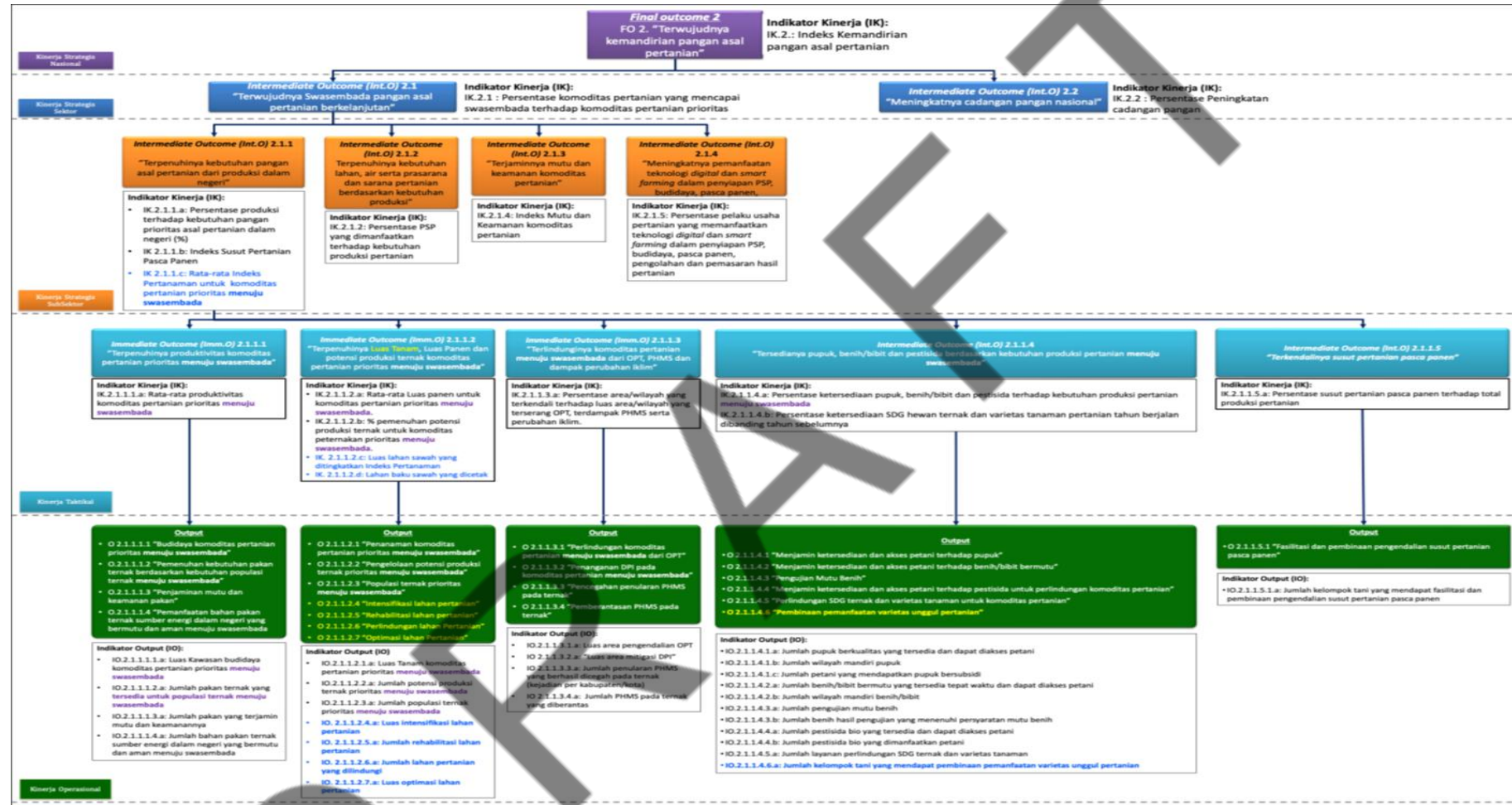
DRAFT

Lampiran 5. Pohon Kinerja

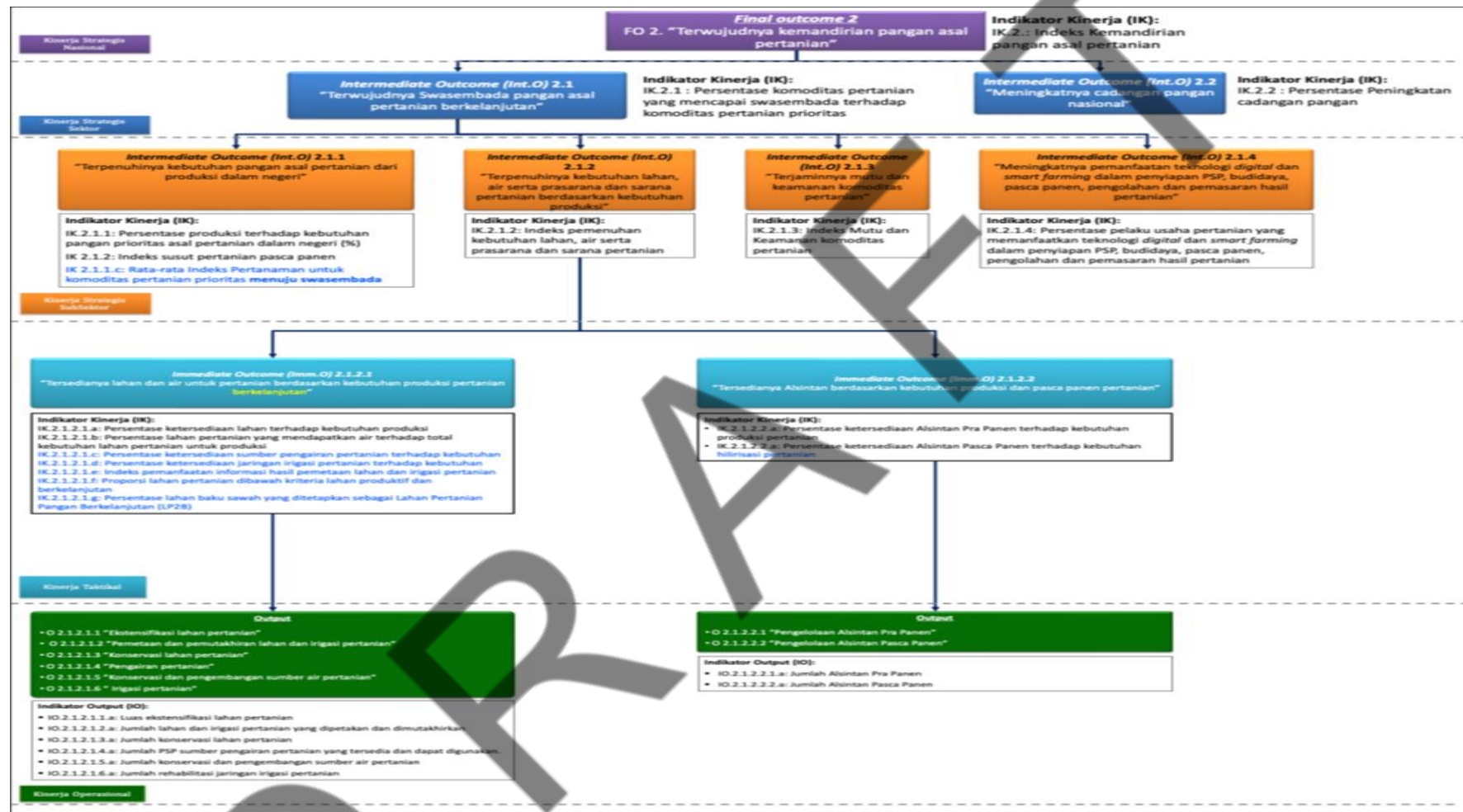
POHON KINERJA FO.1



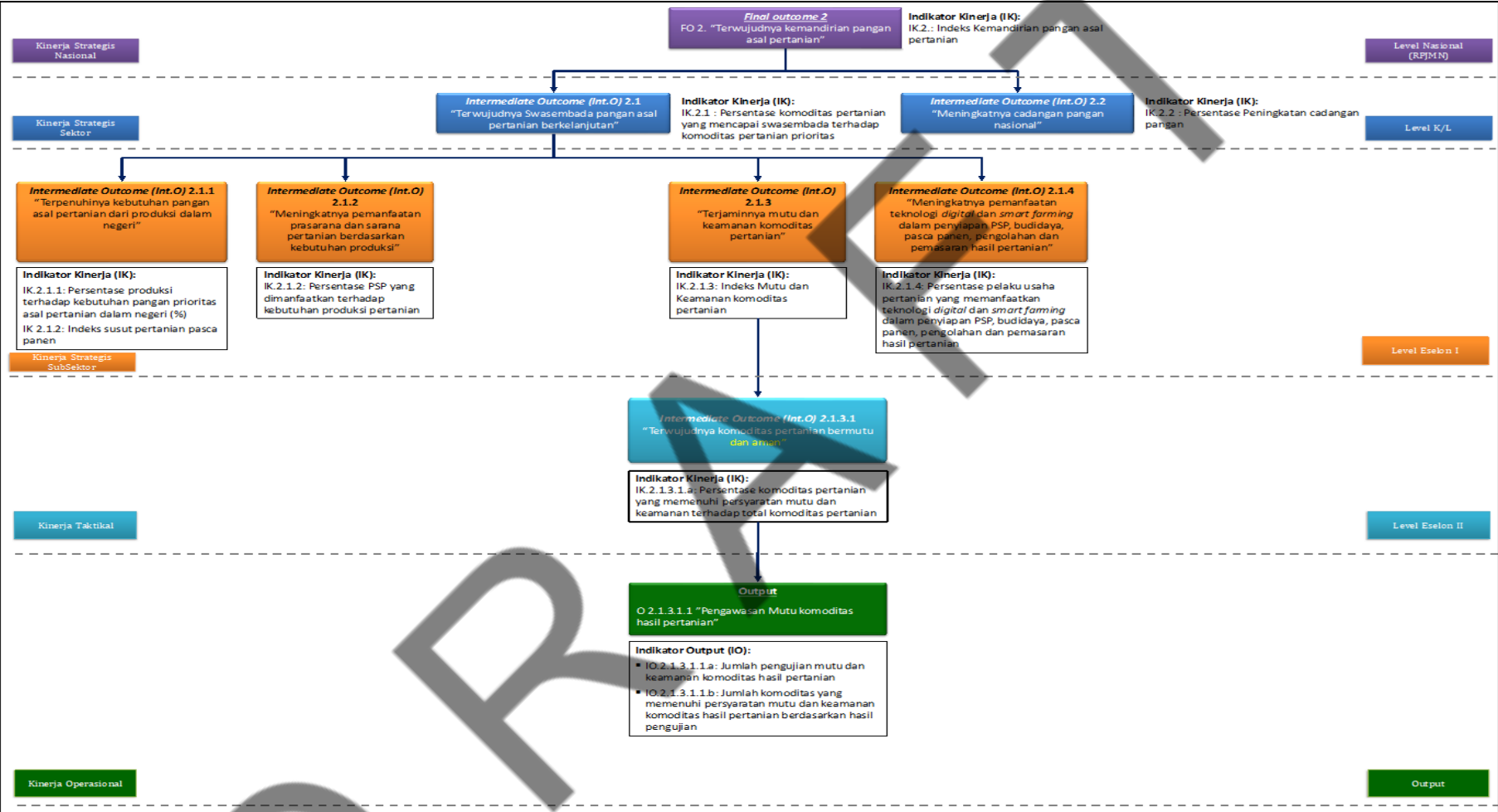
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.1



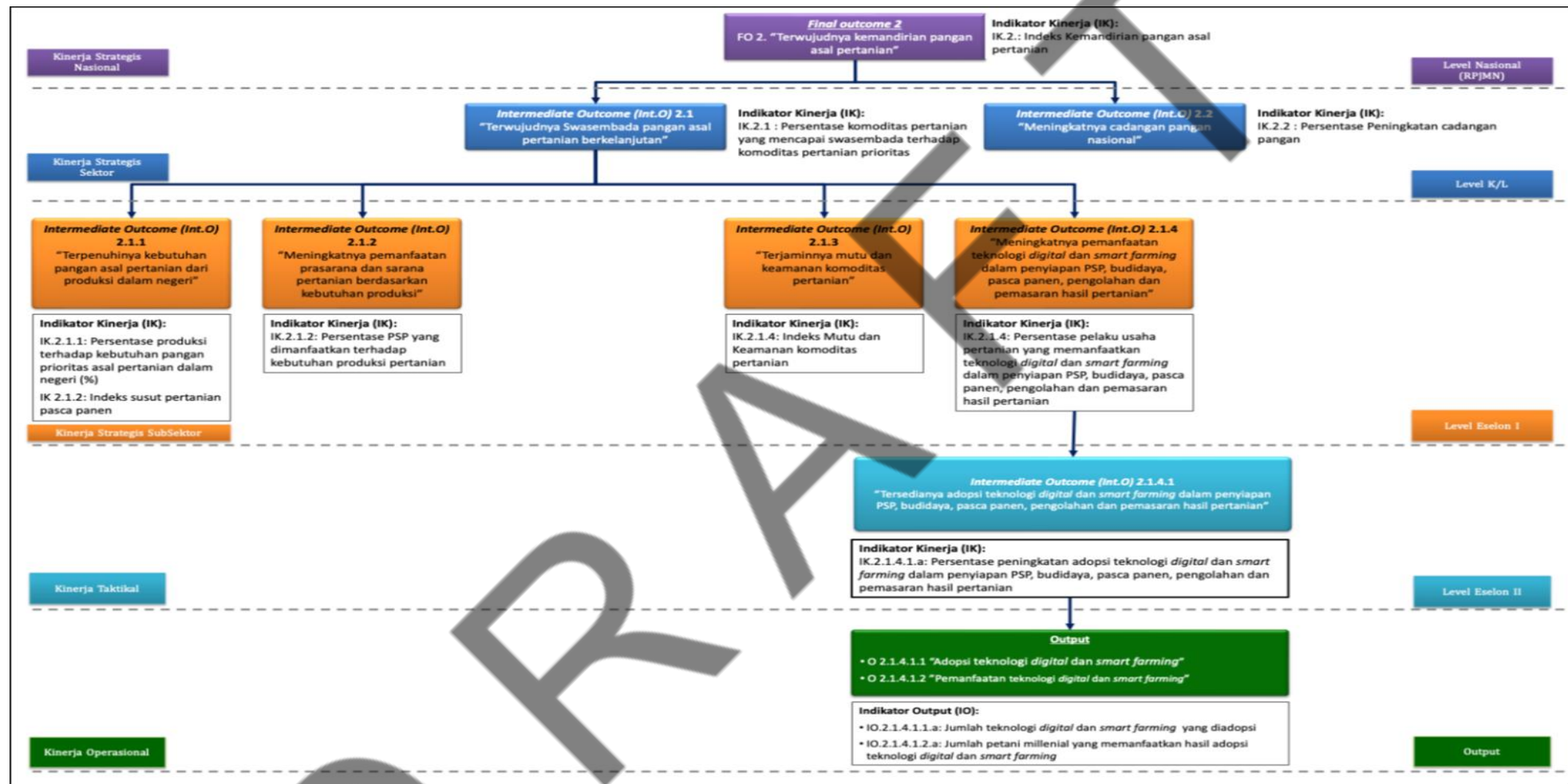
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.2



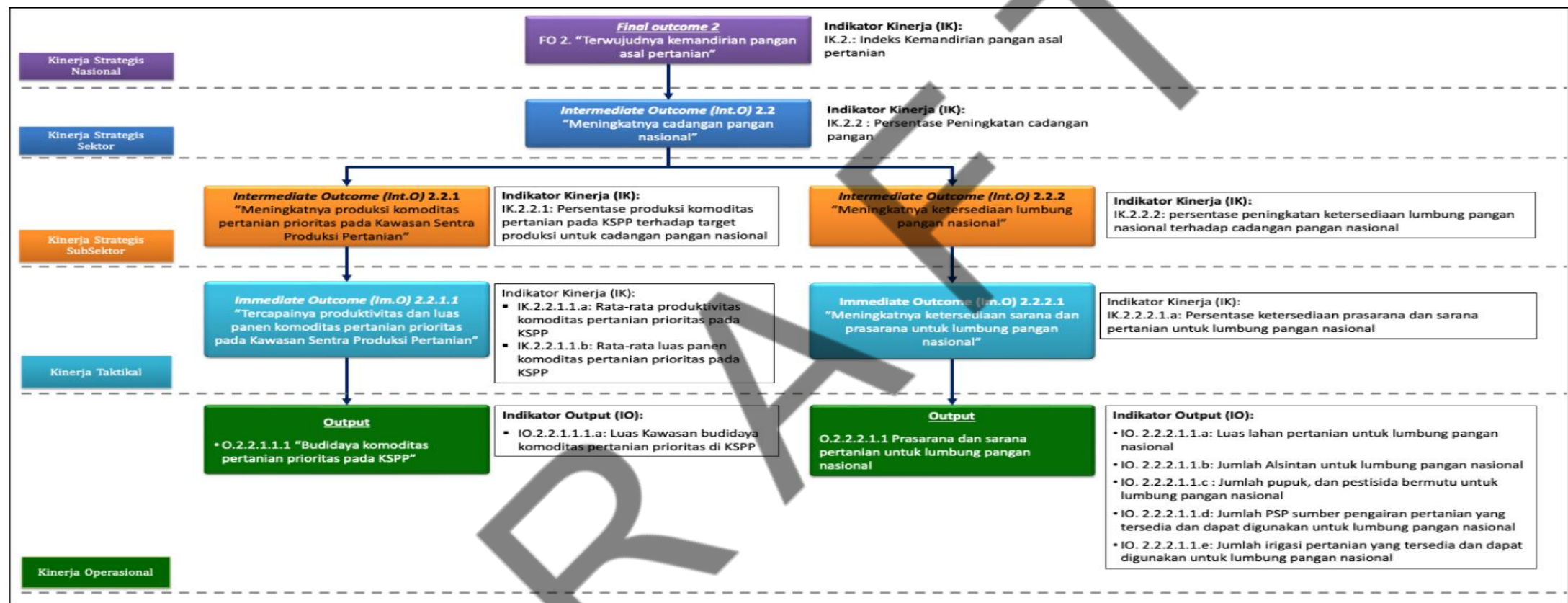
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.4



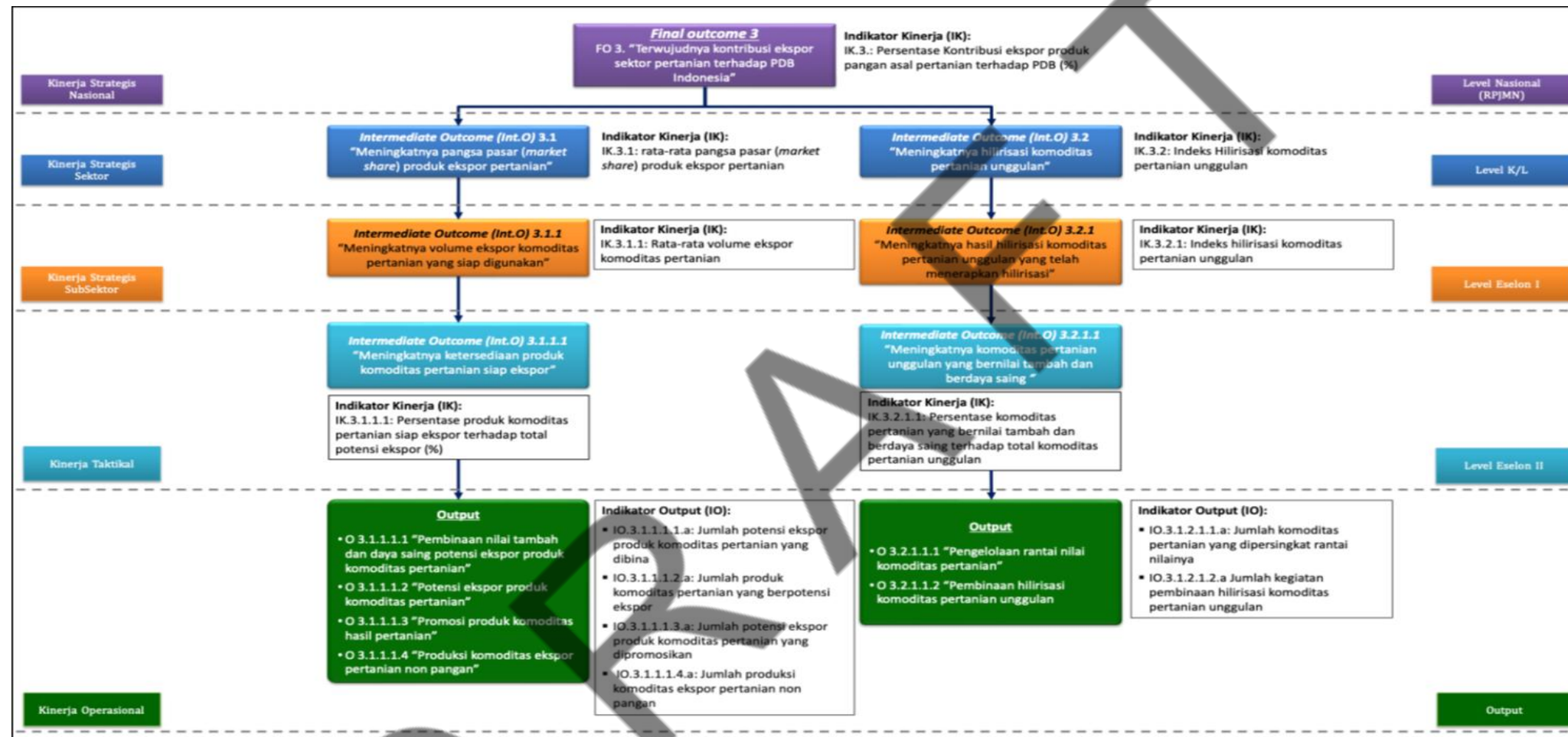
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.5



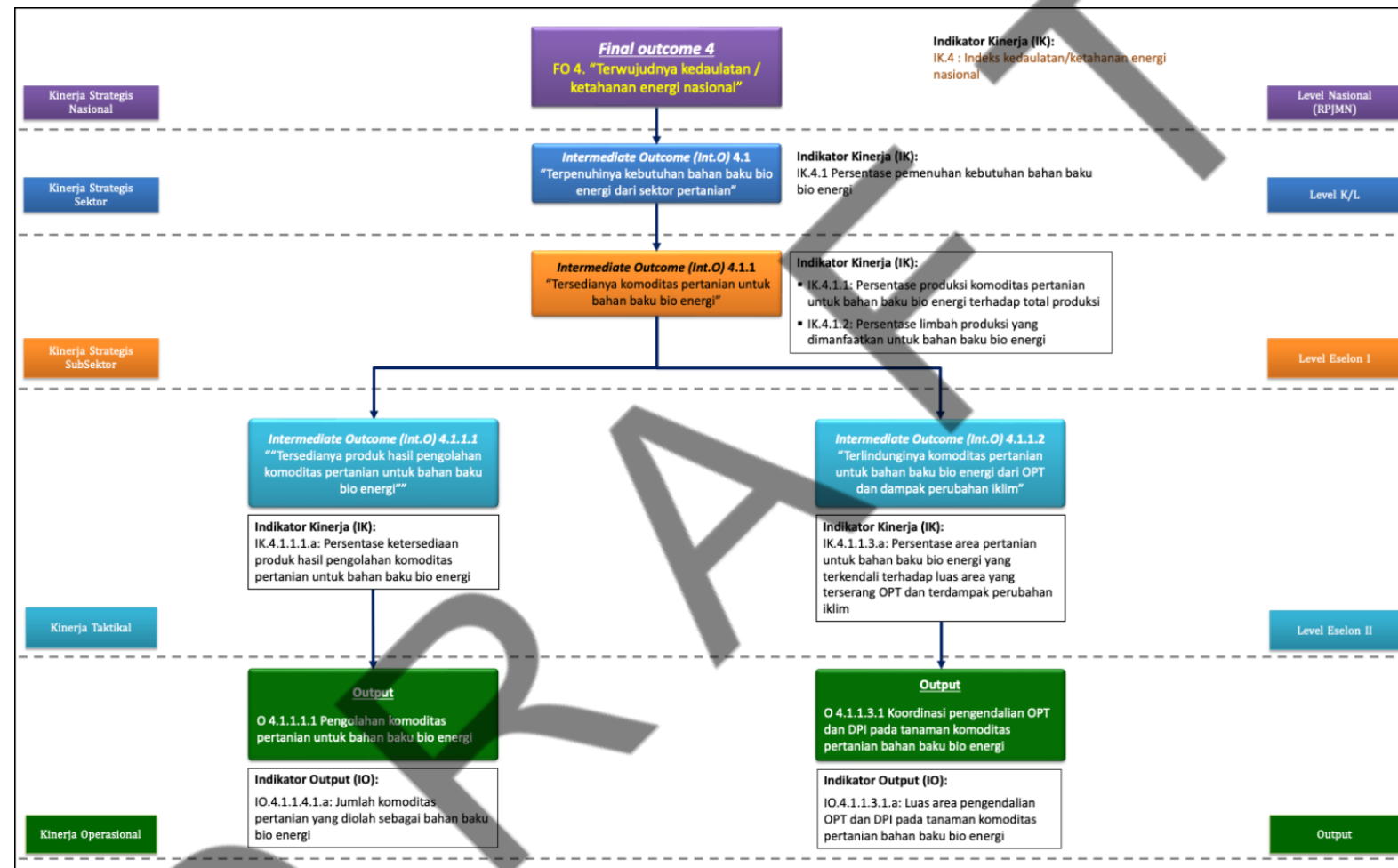
POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.2



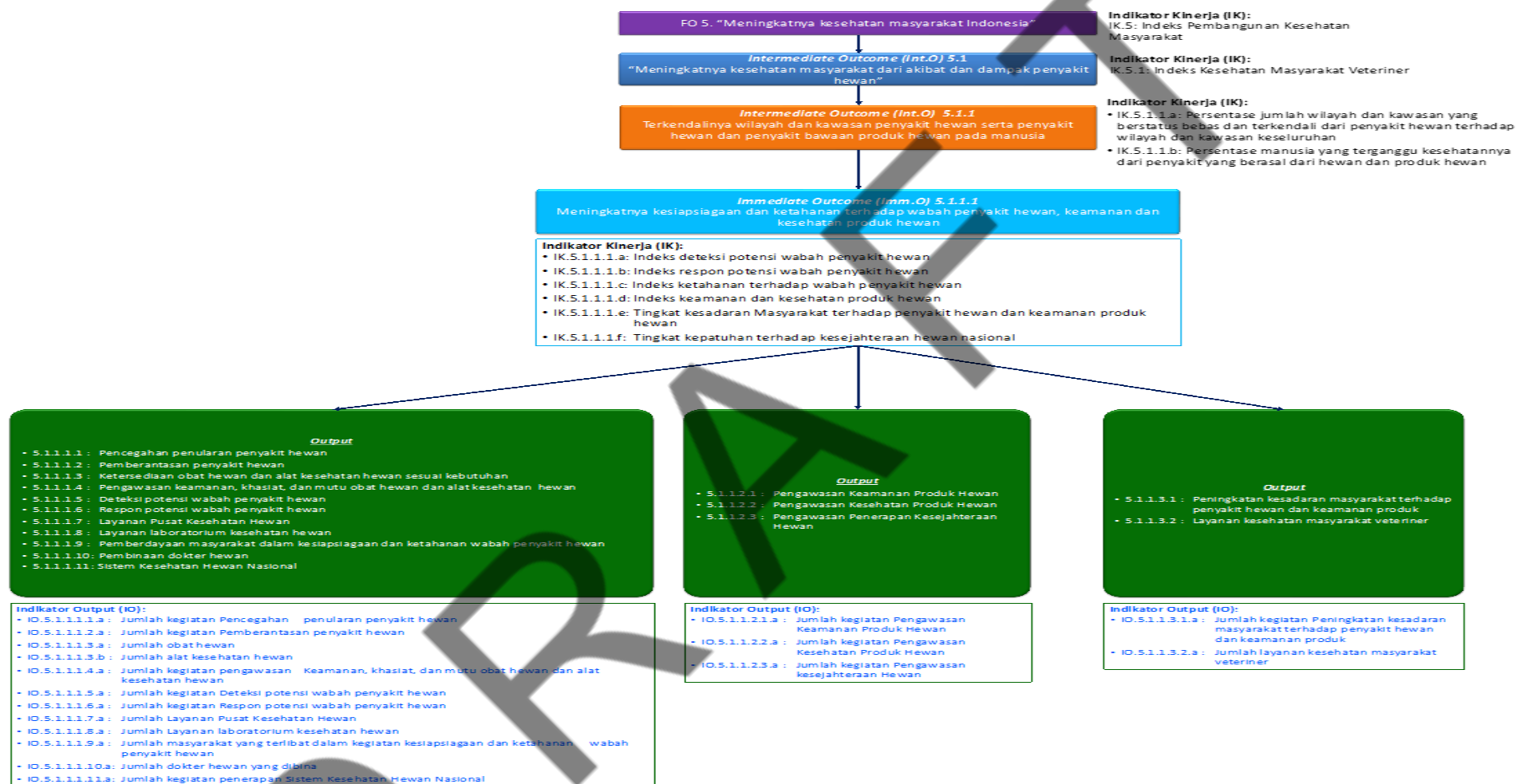
POHON KINERJA FO.3



POHON KINERJA FO.4



FINAL OUTCOME 5



POHON KINERJA F.6

DRAFT